

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, BELANJA MODAL,
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KELEMAHAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (STUDI EMPIRIS
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI
PULAU JAWA TAHUN 2013-2015)**

**YULIANTI
8335132552**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT SIZE, CAPITAL EXPENDITURE, GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT, AND OWN-SOURCE REVENUE ON INTERNAL CONTROL WEAKNESS (EMPIRICAL STUDY ON DISTRICT/ CITY LOCAL GOVERNMENT ON THE ISLAND OF JAVA IN 2013-2015)

**YULIANTI
8335132552**



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

**Study Program of S1 Accounting
Department of Accounting
Faculty of Economic
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

Yulianti. 2017; Pengaruh Ukuran Pemerintah, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Sampel dalam penelitian ini ada 80 pemerintah daerah dengan total observasi 240 pemerintahan daerah.. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dari Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto dari Badan Pusat Statistik. Hasil Uji t menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dan belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Sementara itu, produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Sedangkan hasil Uji F menunjukkan ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal.

Kata kunci : ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, kelemahan sistem pengendalian internal.

ABSTRACT

Yulianti. 2017; The influence of Government Size, Capital Expenditure, Gross Regional Domestic Product, and Own-Source Revenue on Internal Control Weakness.

This study aimed to examined the effect of government size, capital expenditure, gross regional domestic product, and own-source revenue on internal control weakness. The sample in this study there are 80 local governments with a total of 240 local government observations. This study using secondary data from the Overview of Semester Examination Results (IHPS) and Local Government Financial Report (LKPD) published by State Audit Agency (BPK), and reports on gross regional domestic product published by Central Bureau of Statistics (BPS). T-test results showed that the government size and capital expenditures has negative influence and no significant on internal control weakness. Meanwhile, gross regional domestic product and own-source revenue has positive influence and significant on internal control weakness. While the F-test results government size, capital expenditures, gross regional domestic product, and own-source revenue simultantly has positive and significant influence on internal control weakness.

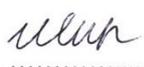
Keywords : government size, capital expenditures, gross regional domestic product, own-source revenue, internal control weakness.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si, Ak, CA.</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua Penguji		24 Juli 2017
<u>Ratna Anggraini ZR, SE, M.Si, Ak, CA.</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Sekretaris		1 Agustus 2017
<u>Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak.</u> NIP. 19780621 200801 2 011	Penguji Ahli		24 Juli 2017
<u>Susi Indriani, SE, M.S.Ak.</u> NIP. 19760820 200912 2 001	Pembimbing I		21 Juli 2017
<u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak.</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing II		24 Juli 2017

Tanggal Lulus: 17 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Yulianti

No. Reg 8335132552

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari dukungan, bimbingan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas petunjuk dan Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis;
2. Orang tua serta keluarga yang telah membimbing dan membantu penulis dalam hal materil dan motivasi;
3. Susi Indriani, SE., M.S.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun proposal penelitian;
4. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun proposal penelitian;
5. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

6. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si, Ak, CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
7. Seluruh Dosen UNJ yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat selama penulis masih berada di bangku perkuliahan;
8. Saepudin Iryana dan keenam sahabat saya yang sangat menginspirasi dan selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan segala kekurangan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Deskripsi Konseptual	14
1. <i>Agency Theory</i>	14
2. <i>Stakeholders Theory</i>	16
3. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	17
4. Ukuran Pemerintah	25

5. Belanja Modal	28
6. Produk Domestik Regional Bruto	31
7. Pendapatan Asli Daerah	37
B. Hasil Penelitian yang Relevan	41
C. Kerangka Teoritik	48
D. Perumusan Hipotesis	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	56
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	56
C. Metode Penelitian	57
D. Populasi dan Sampel	57
E. Operasional Variabel Penelitian	58
1. Variabel Dependen	59
2. Variabel Independen	59
a) Ukuran Pemerintah	59
b) Belanja Modal	60
c) Produk Domestik Regional Bruto	61
d) Pendapatan Asli Daerah	61
F. Teknik Analisis Data	63
1. Uji Analisis Statistik Deskriptif	62
2. Uji Asumsi Klasik	63
a) Uji Normalitas	63
b) Uji Multikolenieritas	64

c) Uji Autokorelasi	65
d) Uji Heterokedastisitas	65
3. Pengujian Hipotesis	67
a) Uji Statistik t	68
b) Uji Koefisien Determinasi (R ²)	68
c) Uji Statistik F	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	71
1. Hasil Pemilihan Sampel	71
2. Analisis Statistik Deskriptif	72
a) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	73
b) Ukuran Pemerintah	74
c) Belanja Modal	75
d) Produk Domestik Regional Bruto	76
e) Pendapatan Asli Daerah	76
3. Uji Asumsi Klasik	77
a) Uji Normalitas	77
b) Uji Multikolinearitas	78
c) Uji Autokorelasi	81
d) Uji Heterokedastisitas	82
4. Pengujian Hipotesis	84
a) Analisis Regresi Linier Berganda	84

b) Uji Statistik T	86
c) Koefisien Determinasi	88
d) Uji F	89
B. Pembahasan	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Implikasi	105
C. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	114
RIWAYAT HIDUP	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Judul	Halaman
Lampiran I	Daftar Sampel Pemerintah Daerah	114
Lampiran II	Hasil Penghitungan Ukuran Pemerintah (X1)	116
Lampiran III	Hasil Penghitungan Belanja Modal (X2)	122
Lampiran IV	Hasil Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (X3) ..	128
Lampiran V	Hasil Penghitungan Pendapatan Asli Daerah (X4)	134
Lampiran VI	Hasil Penghitungan Sampel	141
Lampiran VII	Uji Normalitas Histogram dan P-Plot	147
Lampiran VIII	Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot	148
Lampiran IX	Pemerintah Daerah Yang Belum Publikasi	149

DAFTAR TABEL

Tabel :	Judul	Halaman
Tabel II.1	Hasil Penelitian Yang Relevan	42
Tabel III.1	Dasar Pengambilan Keputusan Autokorelasi	65
Tabel IV.1	Perhitungan Pemilihan Sampel	72
Tabel IV.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	73
Tabel IV.3	Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	79
Tabel IV.4	Uji Multikolinearitas	80
Tabel IV.5	Dasar Pengambilan Keputusan Autokorelasi	80
Tabel IV.6	Uji Autokorelasi	81
Tabel IV.7	Uji Heterokedastistas	83
Tabel IV.8	Uji Regresi Linier Berganda	84
Tabel IV.10	Hasil Pengujian Uji t	86
Tabel IV.9	Uji Koefisien Determinasi	89
Tabel IV.11	Hasil Pengujian Uji Signifikan Simultan (F)	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Judul	Halaman
Gambar I.1	Kelompok Temuan SPI Pemerintah Daerah	3
Gambar I.2	Perkembangan Opini LKPD 2012-2014.....	5
Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian internal merupakan kunci untuk menjaga organisasi dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Demikian juga dalam instansi pemerintahan, pengendalian internal sangat penting dilakukan karena tujuan negara ini harus dicapai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap organisasi sektor publik demi terwujudnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan yang mencakup susunan pengendalian internal yang komprehensif dan memadai.

Di Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang teknis pelaksanaannya harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dari peraturan tersebut bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Peraturan SPIP ini diadaptasi dari model *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*

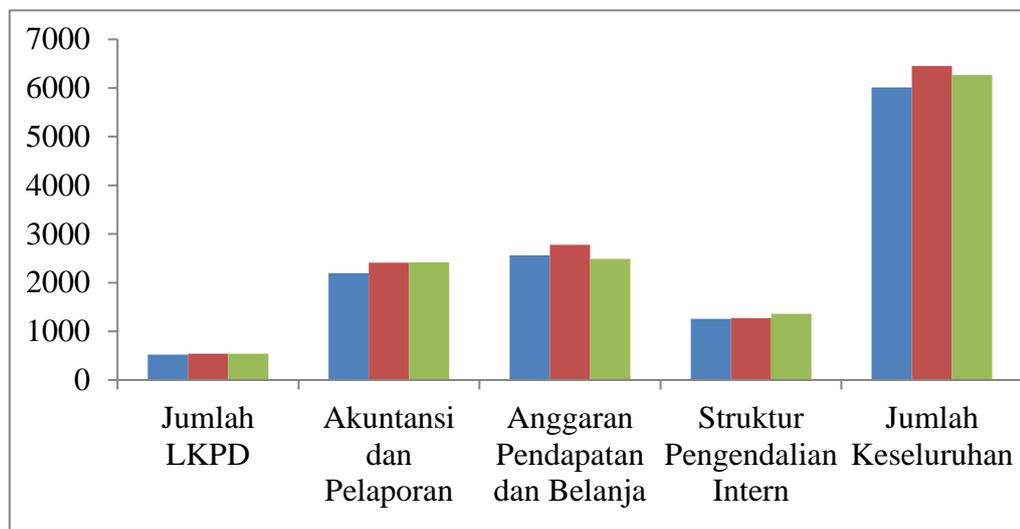
(COSO) berdasarkan publikasi laporan *Internal Control-Integrated Framework* tahun 1992.

Kelemahan yang dapat mengakibatkan permasalahan dalam aktifitas pengendalian diharapkan dapat dideteksi oleh SPIP, diantaranya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terkait dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kelemahan struktur pengendalian intern terkait efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan (Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK, 2013).

Berdasarkan penelitian Coe dan Curtis (dalam Martani dan Zaelani, 2011:2) menemukan kasus kelemahan pengendalian internal di Carolina Utara Amerika Serikat sebagian besar terjadi pada lembaga pemerintah, yaitu 42 % dari total 127 kasus. Sebagai lembaga pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat, maka kepercayaan yang diberikan masyarakat harus diimbangi dengan pemerintahan yang bersih atau *good governance* (Nurwati, 2015). Oleh karena itu, peningkatan jumlah permasalahan kasus kelemahan SPI yang terjadi mengakibatkan ketidaksesuaian dengan harapan pemerintah yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peningkatan

kualitas pengendalian internal sudah seharusnya menjadi prioritas utama di setiap instansi pemerintah. Kualitas pengendalian internal yang semakin baik akan membuat rasa keinginan dan kesempatan menjadi kecil dalam melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan menjadi baik di mata masyarakat.

Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah daerah pada tahun 2013-2015 menemukan banyak permasalahan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat dilihat pada Gambar I.1 sebagai berikut.



Gambar I.1: Kelompok Temuan SPI Pemerintah Daerah

Sumber: Laporan IHPS I BPK 2013-2016 (diolah)

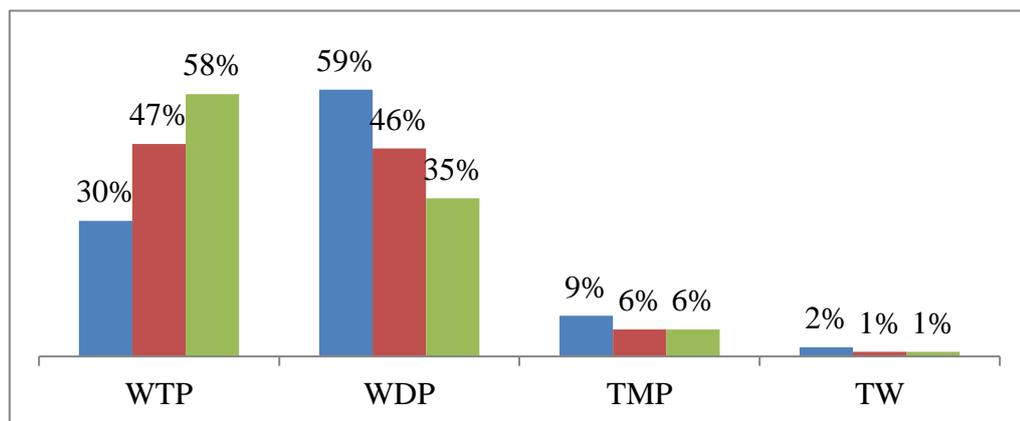
Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut pada umumnya terjadi dikarenakan para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab terhadap SPI belum seluruhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, perencanaan yang kurang

cermat, tidak tepatnya pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian yang lemah, serta kurang melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Maka dari itu, BPK harus melakukan perbaikan SPI dan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengurangi kasus-kasus yang menimbulkan potensi kecurangan dan kerugian daerah. Dalam menindaklanjuti temuan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk meminimalisir terjadinya kelemahan SPI. Namun, tidak semua daerah melaksanakan rekomendasi yang diajukan. Seperti halnya di kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada tahun 2006 ditemukan kelemahan SPI sebanyak tujuh temuan, tetapi pada tahun berikutnya justru terdapat peningkatan kelemahan SPI menjadi empat belas temuan. Dalam kasus tersebut, ada beberapa temuan yang diulangi ditahun berikutnya. Maka dari itu, kabupaten Purworejo terbukti tidak menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Hal inilah yang menjadikan kelemahan SPI menjadi salah satu penyebab penurunan opini atas LKPD di kabupaten tersebut dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi *disclaimer* di tahun anggaran 2007 (dalam www.inspektorat.purworejokab.go.id).

Selain itu, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2014, Anggota V BPK, Djanegara, menyampaikan bahwa opini LKPD Provinsi Jabar dalam empat tahun terakhir secara berturut-turut mendapat opini WTP, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan terkait dengan SPI. Tanpa mengurangi kebanggaan pencapaian opini yang diperoleh tersebut, BPK memandang perlu

untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi Jabar agar dapat mencermati, memberi perhatian, dan menindaklanjuti beberapa masalah yang menjadi temuan pemeriksaan (dalam dprd.jabarprov.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan. Penjelasan tersebut tercantum pada Pasal 16 ayat 1 bahwa: “*Opini yaitu pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya yang terkait dengan SPI adalah efektifitas SPP*”. Apabila dilihat secara keseluruhan, opini LKPD pada tahun 2013-2015 mengalami perbaikan, namun masih adanya opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) membuat SPI menjadi belum optimal. Perkembangan opini LKPD di Indonesia dapat dilihat pada Gambar I.2 sebagai berikut.



Gambar 1.2 Perkembangan Opini LKPD 2013-2015

Sumber: Laporan IHPS I BPK (2016)

Kelemahan pengendalian internal dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ukuran pemerintah daerah, belanja modal, produk domestik regional bruto, serta pendapatan asli daerah menjadikan setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi SPI. Ukuran diukur dari total aset yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyaknya aset yang ada pada suatu organisasi akan berpengaruh terhadap pengendalian internal. Pemerintah harus mampu mengelola dengan baik asetnya, karena pada hakekatnya aset tersebut adalah milik rakyat dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran pemerintah tersebut sebelumnya telah diteliti oleh Putri dan Mahmud (2015). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran memberikan pengaruh terhadap peningkatan masalah pengendalian internal pada suatu organisasi pemerintahan.

Adanya anggaran besar untuk belanja modal juga dapat menyebabkan sulit diterapkannya SPI yang sesuai dengan prosedur yang benar. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, jalan, gedung dan bangunan, jaringan dan irigasi, serta dalam bentuk fisik lainnya. Besarnya anggaran belanja modal pada pemerintah daerah dapat menyebabkan tingginya resiko kebocoran anggaran tersebut. Adanya pengadaan barang fisik pada pemerintah juga menyebabkan maraknya praktik korupsi dalam proses tendernya (Kristanto, 2009). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP tahun 2014, M Bahdin, yang

mengatakan bahwa salah satu penyebab timbulnya korupsi adalah lemahnya pengendalian internal (dalam bantenprov.go.id).

Produk domestik regional bruto yang merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi juga ikut berpengaruh terhadap pengendalian internal pemerintah. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah yang tingkat pertumbuhannya tinggi lebih rentan menghadapi masalah pengendalian internal. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan Martani dan Zaelani (2011). Pertumbuhan khususnya dalam hal ekonomi dapat meningkatkan aktivitas bisnis yang terjadi pada daerah tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat mengakibatkan angka kecurangan menjadi meningkat. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya, terutama terhadap pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Namun, besarnya dana yang dikelola dan luasnya kewenangan yang dimiliki dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menyebabkan kelemahan pengendalian internal menjadi tinggi.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan SPI pada pemerintah daerah tahun 2013-2015. Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kelemahan SPI pada pemerintah daerah telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah daerah, antara lain:

Penelitian yang dilakukan Kristanto (2009) mengemukakan adanya pengaruh positif antara ukuran pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian Putri dan Mahmud (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian internal. Namun, penelitian Nirmala dan Daljono (2013) juga Nurwati dan Trisnawati (2015) mengemukakan hal lain yaitu tidak adanya pengaruh antara ukuran pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian internal. Pada tahun 2010, Kristanto melakukan penelitian yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja modal dengan kelemahan sistem pengendalian internal. Sedangkan hasil penelitian Rachmawati dan Handayani (2016) mengemukakan adanya pengaruh negatif signifikan antara belanja modal dengan kelemahan pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari Puspitasari (2013) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian internal. Selain itu, dalam penelitian Asrullani (2016) dan Fauza (2015) mengemukakan hal lain mengenai pendapatan asli daerah yaitu tidak

adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan kelemahan pengendalian internal.

Sebagaimana uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu antara pengaruh ukuran, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan SPI. Untuk itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait dengan ketidakkonsistenan hasil-hasil tersebut.

Penelitian ini akan berfokus pada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang berada di Pulau Jawa, yang meliputi Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pulau jawa memiliki kabupaten/ kota kedua terbesar setelah sumatera dan memiliki opini wajar terbanyak dibanding pulau lainnya. Presentase besarnya permasalahan kelemahan SPI di Pulau Jawa berdasarkan IHPS I tahun 2013 sampai 2015 yaitu lebih dari 20% atau lebih dari 1000 kasus. Kondisi pengendalian internal pada masing-masing pemerintah daerah masih tergolong lemah dan tidak efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Jawa tahun 2013-2015.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) telah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus yang terjadi mengenai kelemahan pengendalian internal.
2. Pemerintah daerah yang bermasalah secara operasi dan fungsi, bukan hanya akan merugikan daerahnya tetapi dapat menyebabkan krisis nasional. Oleh karena itu, peningkatan pengendalian internal menjadi penting untuk dilaksanakan.
3. Adanya kecenderungan kenaikan kelemahan pengendalian internal di Indonesia selama periode penelitian.
4. Pemerintah daerah harus mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai terutama dalam mengelola asetnya agar terhindar dari tindak kecurangan.
5. Adanya pengadaan belanja modal menyebabkan maraknya praktik korupsi dalam proses tendernya.
6. Banyak kelemahan sistem pengendalian internal yang terjadi pada organisasi yang sedang mengalami pertumbuhan.
7. Besarnya pendapatan asli daerah dan luasnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan tersebut dapat memicu terjadinya *fraud* atau kecurangan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul mengenai kelemahan pengendalian internal pada Pemerintah Daerah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Jawa.
2. Periode pengamatan selama 3 tahun yaitu tahun 2013-2015.
3. Variabel Independen yang diuji yaitu ukuran, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah, dengan variabel dependen kelemahan pengendalian internal.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah pengaruh ukuran pemerintah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2015?
2. Apakah pengaruh belanja modal terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2015?
3. Apakah pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2015?

4. Apakah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2015?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal, sehingga dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa mengenai perkembangan kondisi pemerintah di Indonesia dan fenomena yang muncul didalamnya.
- b) Dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan pengendalian internal serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah agar

meningkatkan kemampuan daerah. Selain itu, dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pengendalian internal dan dapat lebih efektif dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan agar tidak berdampak pada pengendalian internal yang lemah.

b) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pengaruh ukuran, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, referensi tambahan, wawasan, dan sebagai literatur untuk penelitian lebih lanjut mengenai judul ini.

c) Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan khususnya mengenai akuntansi publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai teori keagenan dan teori *stakeholders* yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Teori keagenan berbicara mengenai permasalahan *agent* dengan *principal* yang menyebabkan adanya asimetri informasi. Sedangkan teori *stakeholders* berbicara mengenai suatu entitas yang harus memberi manfaat bagi para *stakeholdersnya*. Selanjutnya, akan dibahas pula terkait dengan teori-teori mengenai kelemahan sistem pengendalian internal sebagai variabel dependen dan ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, serta pendapatan asli daerah sebagai variabel independen. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kelemahan pengendalian internal dengan keempat variabel independen tersebut juga akan menjadi topik dalam sub bab ini.

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikemukakan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* merupakan ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Selama ini, teori keagenan dipakai sebagai basis yang mendasari praktik bisnis organisasi. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama dari teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang

menerima wewenang. Dalam hubungan keagenan tersebut, adanya suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Berdasarkan pendapat Tricker (dalam Saputro, 2015), Teori keagenan memandang bahwa *agent* tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal*.

Teori keagenan telah dipraktikkan, termasuk daerah di Indonesia terlebih lagi saat otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahun 1999. Menurut Halim dan Abdullah (2006), diakui atau tidak dalam pemerintahan daerah terhadap hubungan dan masalah keagenan. Dalam organisasi pemerintahan, hubungan keagenan dapat berupa hubungan pendelegasian (*chains of delegation*). Seperti yang dikemukakan oleh Strom (2000), yang menyatakan hubungan pendelegasian dalam pemerintahan yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya diparlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Dalam penelitian Puspitasari (2013), menyatakan teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* akan melakukan suatu tindakan dengan penuh kesadaran terhadap kepentingan mereka sendiri dan tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat selaku *principal*. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadi *information asymetry*, dimana salah satu pihak mempunyai informasi lebih banyak daripada pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat.

Adanya suatu *information asymetry* inilah yang menjadi pemicu terjadinya penyelewengan anggaran atau korupsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang efektif terhadap kinerja pemerintah daerah. Di Indonesia, banyak sekali temuan kasus mengenai kelemahan sistem pengendalian internal terutama pada organisasi pemerintahan. Permasalahan inilah yang menjadikan pengendalian internal sangat penting untuk ditingkatkan pada pemerintah daerah sebagai mekanisme *check and balances* agar *information asymetry* semakin berkurang. Selain itu, perlunya pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan pemerintah daerah dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih berimbang.

2. Stakeholder Teory

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial memiliki kepentingan serta hubungan terhadap suatu organisasi. Para *stakeholder* tersebut harus memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Irwan Nirawan (dalam Putro, 2013) yaitu memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap organisasi. Pada umumnya, teori *stakeholder* menyatakan bahwa organisasi bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholdersnya*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu entitas yang dalam menjalankan

aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan organisasinya saja, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan.

Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah menjadikan pemerintah memiliki kekuasaan dalam mengelola daerahnya terutama dalam mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Disamping itu, sistem demokrasi yang dianut merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi terhadap jalannya pemerintahan. Rakyat merupakan pihak yang berkuasa dan jalannya pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat sebagai *stakeholder*. Menurut Putro (2013), pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, seluruh aset daerah, serta pendapatan daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dengan adanya pasal tersebut, terdapat timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan. Dan dalam menciptakan keseimbangan tersebut diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai.

3. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

a) Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Dalam melaksanakan pelayanan publik perlu adanya penerapan *Good Governance*. Konsep ini muncul dikarenakan kinerja aparaturnya pemerintah

sebagai penyelenggara urusan publik dinilai kurang efektif. Menurut Rosyada (2016), Jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan maka:

“*Good Governance* adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan mandiri.”

Good Governance telah menjadi hal yang penting bagi entitas saat ini, tidak hanya sektor swasta, sektor publik dan pemerintah pun memperhitungkan hal ini. Bank Dunia mendefinisikan *Good Governance* pada sektor publik sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan *United Nations Development Program* (UNDP) menekankan definisi *Good Governance* pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Aspek politik mengacu pada proses pembuatan kebijakan, aspek ekonomi mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan aspek administratif mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Handayani, 2012).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah suatu cara dan gagasan untuk menyelenggarakan

pemerintah yang bersih dan sehat yang sesuai dengan UUD 1945. Menurut Mardiasmo (2009), terciptanya *good governace* didukung oleh tiga aspek utama, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ DPRD selalu pihak diluar eksekutif yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan untuk menjamin sistem dan kebijakan terlaksana dengan baik agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai, pengendalian dilakukan oleh eksekutif (pemerintah). Dan selanjutnya pemeriksaan, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memastikan hasil kinerja pemerintah telah selesai dengan standar kinerja yang ditetapkan, kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional seperti BPK atau akuntan publik.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah membentuk suatu sistem yang memadai dan bertujuan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI dirancang sebagai penguatan dari fungsi pengendalian.

b) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah salah satu bagian dari aspek *good governance*. Banyaknya isu mengenai kecurangan atau penyimpangan yang terjadi misalnya penggelapan anggaran baik skala besar maupun kecil yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah membuat penerapan sistem

pengendalian internal menjadi sangat penting. Menurut Hartadi (2004), sistem pengendalian internal dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki makna khusus dalam suatu organisasi. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya hutang yang tidak layak, menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, dapat diperolehnya operasi secara efisien, dan menjamin ditaatinya kebijakan organisasi. Sedangkan, Warren (2008) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti.

Selanjutnya, Menurut Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) yang mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319 mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

- a) kegiatan yang efektif dan efisien, artinya kegiatan instansi pemerintah telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b) keandalan pelaporan keuangan, yaitu informasi yang disajikan harus dapat dipercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya agar tidak menyesatkan dan merugikan organisasi.
- c) pengamanan aset negara, yaitu aset yang diperoleh dari masyarakat harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.
- d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang merupakan suatu perbuatan hukum sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (Kristanto, 2010), pengendalian adalah setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dapat bersifat preventif (untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan melakukan perbaikan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan yang telah terjadi), dan direktif (untuk mengarahkan terjadinya suatu kondisi yang diinginkan). Jadi, pemerintah

daerah perlu melakukan suatu pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu terutama dalam mengelola keuangan daerahnya.

Dari beberapa pengertian tentang sistem pengendalian internal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah satu proses yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dilakukan terus menerus serta berisi kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai kepada para pengguna informasi dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah, diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat menyebabkan ketidakhematan dan ketidakefektifan yang dapat menimbulkan kerugian daerah.

Menurut pendapat Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (dalam Hartono, 2014), Kelemahan SPI merupakan kelemahan yang signifikan dan tidak dapat dicegah maupun dideteksi, hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan. Kelemahan sistem pengendalian internal dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pengendalian internal terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Puspitasari, 2013). Berdasarkan UUD Pasal 23 ayat (5) tahun 1945, Lembaga pemerintah independen yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan indikator untuk menilai

sejauh mana pengendalian internal pemerintah daerah telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh audit BPK dapat menentukan tingkat audit internal.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2013, Kelemahan SPI dinilai BPK melalui tiga kategori, yaitu:

- (1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian mengenai kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri dari:
 - (a) proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
 - (b) tidak memadainya sistem informasi akuntansi dan pelaporan
 - (c) laporan terlambat disampaikan oleh entitas
 - (d) pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat
 - (e) sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya yang memadai
- (2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara atau daerah, perusahaan milik negara atau daerah, serta pelaksanaan program atau kegiatan pada entitas yang diperiksa, yang terdiri dari:
 - (1) mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penerimaan daerah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan
 - (2) adanya penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan mengenai pendapatan dan belanja

(3) perencanaan kegiatan tidak memadai

(4) hilangnya potensi penerimaan yang dapat diakibatkan oleh ketidaktepatan pelaksanaan kebijakan

(3) Kelemahan struktur pengendalian intern, kelemahan yang terkait ada atau tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa, yang terdiri dari:

(1) tidak adanya prosedur standar operasi formal yang dimiliki oleh entitas

(2) prosedur standar operasi yang ada tidak berjalan secara optimal

(3) tidak memiliki satuan pengawas internal

(4) satuan pengawas internal yang ada tidak memadai

(5) tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

Menurut Mulyadi (1998) dalam Saputro (2015), kelemahan dan keterbatasan pengendalian internal antara lain:

- a) Kesalahan dalam pertimbangan: Manajemen dan personel lain sering terjadi kesalahpahaman dalam mempertimbangkan keputusan bisnis untuk melakukan tugas rutin disebabkan informasi yang tidak memadai, waktu yang terbatas, dan tekanan lainnya.
- b) Gangguan: Seringkali personil keliru dalam memahami perintah dan membuat kelalaian, serta tidak adanya perhatian atau kelelahan yang mengakibatkan gangguan dalam pengendalian internal.

- c) Kolusi: Tindakan kolusi bertujuan untuk kejahatan yang dapat mengakibatkan kerusakan pengendalian internal dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
- d) Pengabaikan oleh manajemen: Manajemen dapat mengabaikan kebijakan untuk tujuan yang tidak sah seperti untuk keuntungan pribadi pihak tertentu.
- e) Biaya lawan manfaat: Manfaat yang didapatkan dari pengendalian tersebut lebih sedikit dibandingkan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal.

Kelemahan SPI di pemerintah daerah dilihat dari temuan atau kasus yang terjadi atas penyimpangan terhadap SPI dalam pemerintah daerah yang diterbitkan oleh BPK. Pengukuran variabel dependen ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Kelemahan SPI} = \text{Jumlah temuan kasus atas Sistem Pengendalian Internal}$

(Saputro dan Mahmud, 2015)

4. Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah adalah suatu pengukuran yang dapat menentukan nilai dari besar atau kecilnya suatu pemerintahan. Menurut Hartono (2014), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah. Ukuran juga menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut, biasanya organisasi besar

memiliki berbagai ketentuan dan aturan (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran pemerintah mencerminkan besar kecilnya suatu organisasi pemerintahan, dimana skala pemerintah tersebut dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan melalui beberapa cara tolak ukur. Dalam penelitian Saputro (2015), ukuran pemerintah dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun dan jumlah penduduk. Penggunaan penambahan proksi populasi penduduk dikarenakan perbedaan jumlah penduduk dan anggaran yang berbeda-beda disetiap daerah, hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal memajukan daerahnya. Semakin besar jumlah penduduk maka pendanaan yang digunakan akan lebih banyak dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut semakin kompleks.

Pemerintah daerah dengan ukuran besar diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat juga diukur dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Dalam penelitian Putri (2015) dan Martani dan Zaelani (2011) menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran, menemukan bahwa semakin besar ukuran dapat mengurangi kelemahan SPI pemerintah daerah. Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan *maintenance* terhadap SPI, contohnya memberikan pelatihan yang dilakukan secara berkala kepada pekerja mengenai SPI.

Dalam Buletin Teknis 02, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah serta dapat diukur dalam satuan uang yang terdiri dari:

- a) Aset lancar, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- b) Investasi jangka panjang, merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan *royalty* atau manfaat sosial.
- c) Aset tetap, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d) Aset lainnya, meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel independen memakai logaritma natural dikarenakan total aset pemerintahan bernilai besar maka dari itu disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural. Menurut Gujarati (2006), logaritma natural disebut transformasi nonlinear. Apabila ada hubungan tidak linier antara variabel independen dengan variabel dependen maka dapat menggunakan transformasi dari logaritma natural. Ukuran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

(Nurwati dan Trisnawati, 2015)

5. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembentukan modal dan dapat menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Didalamnya terdapat biaya pemeliharaan yang termasuk pengeluaran untuk menambah masa manfaat dan kualitas dari aset tersebut (Akbar, 2013). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipakai untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi dan meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Selanjutnya, Belanja modal merupakan pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja, dengan maksud memberikan pelayanan untuk masyarakat agar tercipta kesejahteraan (Saputro, 2015). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun yang bertujuan untuk menambah aset dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya.

Belanja modal didapat dengan cara membeli melalui proses lelang atau tender. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat syarat utama yang harus ada yaitu aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari adanya belanja modal. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, komponen

pengeluaran yang dapat digolongkan dapat digolongkan ke dalam belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Berikut ini adalah penjelasan dari komponen-komponen belanja modal tersebut:

- a) Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran yang digunakan sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah hingga tanah tersebut dalam kondisi siap pakai melalui pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama atau sewa tanah, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran yang dapat digunakan untuk memperoleh dan mempersiapkan hingga peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Pengeluaran tersebut meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya lainnya.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, seperti halnya biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak (kontraktual), serta biaya perencanaan dan pengawasan. Pengeluaran tersebut bertujuan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dapat menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai.
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi serta biaya yang menambah masa manfaat dan nilai aset. Pengeluaran tersebut digunakan untuk

memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan hingga dalam kondisi yang siap pakai.

- e) Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembentukan modal yang tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat belanja modal sebelumnya, yang termasuk kedalam belanja modal ini antara lain kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, serta jurnal ilmiah.

Dalam pengalokasiannya, belanja modal harus digunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Setiap pemasukan yang didapat daerah akan dimanfaatkan untuk penyusunan rencana belanja modal. Dan sumber pemasukan untuk belanja modal disetiap daerah pasti berbeda-beda sehingga alokasinya akan berbeda pula. Menurut Abdullah dan Halim (2006), alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melakukan pengadaan aset tetap. Dalam melakukan pengadaan tersebut, dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dari satuan kerja.

Belanja modal perlu suatu sistem pengawasan yang baik agar alokasi dari dana belanja modal yang dimiliki oleh daerah dapat tepat sasaran dan tujuan dilakukannya belanja modal bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Sistem pengawasan atau kontrol yang harus diterapkan bertujuan untuk meminimalisir anggaran belanja modal yang bocor dan dapat merugikan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, Pengukuran variabel independen menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

(Kristanto, 2009)

6. Produk Domestik Regional Bruto

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 1996). Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Terdapat tiga aspek yang ditekankan dalam pengertian ini. Aspek pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari perekonomian, yang artinya dapat berubah dari waktu ke waktu dan mengalami perkembangan.

Aspek yang kedua, terdapat kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan output perkapita, keduanya menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam jangka waktu yang cukup lama,

biasanya lebih dari sepuluh tahun dalam mengalami kenaikan output perkapita. Maka dari itu, proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self-generation* yang artinya bahwa proses pertumbuhan itu menelurkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode dimasa yang akan datang.

Menurut Puspitasari (2013), banyak masalah kelemahan SPI yang terjadi pada organisasi yang sedang mengalami pertumbuhan. Hal itu menyebabkan terjadi perubahan terutama saat organisasi tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat. Adanya perubahan menuntut organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap pengendalian internal yang dimiliki. Penyesuaian tentunya membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan prosedur yang baru. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah pada pengendalian intern dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kenaikan output perkapita dari suatu produksi yang terdapat dalam suatu daerah yang menyebabkan naiknya suatu pendapatan. Adapun aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Informasi dari PDRB merupakan sesuatu yang sangat penting terutama dalam mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia.

Dibawah ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan PDRB, yaitu:

a) Produk Domestik Regional Bruto

Data dari PDRB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Menurut Rahardja dan Manurung (2002) yang dimaksud dengan PDRB adalah nilai barang dan jasa akhir, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik (2002), PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Selain itu, menurut Puspitasari (2013), PDRB adalah keseluruhan nilai tambah dari berbagai aktivitas ekonomi yang menjadi dasar pengukurannya. Berdasarkan pengertian diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB merupakan keseluruhan nilai produksi berupa barang maupun jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah.

b) Perhitungan PDRB

Secara umum, perhitungan PDRB terbagi menjadi tiga yaitu menurut tahun dasar, harga berlaku, dan harga konstan. Tahun dasar adalah tahun yang menjadikan nilai-nilai agregat sebagai acuan untuk menghitung nilai-

nilai agregat konstan pada tahun-tahun berikutnya. Tujuan dari sistem penyajian yang dibedakan atas harga berlaku dan atas harga konstan adalah untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai agregat baik secara nominal maupun secara riil dibandingkan terhadap keadaan tahun dasar.

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang perhitungannya menggunakan harga pada tiap tahun. Dan yang terakhir adalah harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang tahun dasarnya dihitung menggunakan harga tahun tertentu. Selain itu, PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Saggaf (dalam Puspitasari, 2013), pertumbuhan ekonomi daerah dalam konsep regional merupakan angka yang didapat dari besarnya pertumbuhan PDRB yang pengukurannya atas dasar harga konstan.

c) Metode perhitungan PDRB

Menurut Tarigan (2013), terdapat dua metode yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB yang ditimbulkan dari suatu daerah yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

(1) Metode Langsung

Metode langsung adalah perhitungan yang menggunakan data asli daerah yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber

data yang ada di daerah itu sendiri. Dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:

(a) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan produksi terdiri dari sembilan kelompok lapangan usaha yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan/ konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

(b) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Balas jasa produksi yang dimaksud meliputi upah/ gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.

(c) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

Model pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, yaitu:

- (a) Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dari pemerintah.
- (b) Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pemerintah
- (c) Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto (investasi).
- (d) Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor neto.

Secara konsep ketiga pendekatan diatas akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Sehingga, ketiga konsep tersebut dapat mempresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada waktu tertentu.

(2) Metode Alokasi

Metode alokasi atau metode tak langsung adalah alternatif terakhir yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB. Biasanya digunakan untuk mengalokasikan PDRB suatu wilayah ke tingkat wilayah yang lebih kecil dengan menggunakan alokator tertentu antara lain nilai produksi bruto atau neto setiap sektor, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator langsung lainnya.

Melihat pada uraian PDRB diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB tidak hanya dikatakan sebagai alat ukur, tetapi juga merupakan salah

satu analisa statistik yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai laju pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kegunaan PDRB untuk menganalisis perubahan tingkat kemakmuran secara riil atas dasar harga konstan pada suatu wilayah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang PDRB. Pengukuran variabel independen pada penelitian ini diukur berdasarkan harga konstan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Produk Domestik Regional Bruto} = \frac{(\text{PDRB}_{t1} - \text{PDRB}_{t0}) \times 100\%}{\text{PDRB}_{t0}}$$

(Puspitasari, 2013)

7. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Renyowijoyo (2013), PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari lain-lain PAD yang sah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Selanjutnya, menurut Yani (2008), mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah dan sejalan dengan perundang-undangan.

Selain itu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa PAD adalah hasil pemungutan pemerintah daerah yang pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan bertujuan sebagai bentuk pendanaan otonomi daerah.

Menurut Renyowijoyo (2013), terdapat penjelasan secara terperinci mengenai PAD sebagai berikut:

a) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang bersifat wajib yang harus dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerahnya masing-masing. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2000 terdapat beberapa hal-hal pokok mengenai pengaturan pajak daerah.

Berikut ini adalah hal-hal pokok berdasarkan UU No. 32 tahun 2000, pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah (tingkat I) sebagai bagian dari pendapatan

Provinsi. Pajak provinsi diantaranya: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 5%, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebesar 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%.

2) Pajak Kabupaten

Pajak kabupaten adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah (tingkat II) sebagai bagian dari pendapatan Kabupaten atau Kota, Pajak Kabupaten atau Kota diantaranya: pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran sebesar 10%, pajak restoran sebesar 10%, pajak hiburan sebesar 35%, pajak reklame sebesar 25%, pajak penerangan jalan sebesar 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%, pajak parkir sebesar 20%, pajak lain-lain.

b) Hasil Restribusi Daerah

Mardiasmo (2003:100) menyatakan bahwa restribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi daerah terdiri dari:

- 1) Restribusi Jasa Umum, yaitu jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah untuk tujuan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen kekayaan daerah yang perolehannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah, yang diantaranya bersumber dari:

- 1) Bagian laba dari perusahaan daerah
- 2) Bagian laba dari lembaga keuangan bank (Bank Daerah)
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat berasal dari lain-lain PAD yang sah seperti:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 2) Lain giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
- 3) Pendapatan giro
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan aturan pengadaan barang dan atau aturan jasa oleh daerah.

Dalam penelitian ini, Pengukuran variabel independen ini menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 100\%$$

(Fauza, 2015)

B. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas mengenai kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) yang terbilang telah cukup banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya. Namun hingga saat ini, isu mengenai kelemahan SPI memang sangat berkembang sehingga penelitian ini penting untuk dikaji ulang. Penelitian ini membahas mengenai kelemahan SPI pada pemerintah daerah dengan menambahkan variabel ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah. Sebagai landasan serta acuan peneliti maka peneliti menggunakan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan telah teruji secara empiris sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini. Berikut ini disajikan tabel hasil penelitian yang relevan terdahulu, yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan SPI.

Tabel II.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Sumber dan Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh, Tahun 2011 Peneliti: Martani dan Zaelani (2011)	Dependen: Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Independen: 1. Ukuran Pemda 2. Tingkat Pertumbuhan Pemda 3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda 4. Jumlah Kecamatan Pemda 5. Jumlah Penduduk	Populasi: Pemda di Seluruh Indonesia Sampel: 229 Pemda Kabupaten / Kota tahun 2008	1. Pertumbuhan pemda dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan SPI Ukuran pemerintah dan Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap Kelemahan SPI 2. Jumlah kecamatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan SPI
2	<i>Accounting Analysis Journal</i> Vol 4 No. 3 tahun 2015, ISSN 2252-6765 Peneliti: Saputro dan Mahmud (2015)	Dependen: Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Independen: 1. Ukuran 2. PAD 3. Kompleksitas 4. Belanja Modal	Populasi: 141 Kabupaten / Kota di wilayah Indonesia Tengah Sampel: 104 Kabupaten / Kota di wilayah Indonesia Tengah tahun 2012	1. Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kelemahan pengendalian intern
3	<i>Syariah Paper Accounting</i> FEB UMS tahun 2015, ISSN	Dependen: Kelemahan Pengendalian	Populasi: Kabupaten dan Kota	1. Ukuran pemerintah daerah,

	2460-0784 Peneliti: Nurwati dan Trisnawati (2015)	Internal Independen: 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Penduduk 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4. Belanja Modal	Provinsi Jawa Tengah Sampel: 35 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2012	pertumbuhan ekonomi, dan PAD tidak berpengaruh terhadap Kelemahan pengendalian internal 2. Jumlah Penduduk dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan pengendalian internal
4	Jurnal Akuntansi UKRIDA, Vol. 9, No. 1, Januari 2009 ISSN: 1411-691X Peneliti: Kristanto	Dependen: Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Independen: 1. Ukuran Pemerintahan 2. PAD 3. Belanja Modal	Populasi: Pemda Kabupaten / Kota Se- Jawa/Bali Tahun Anggaran 2006 Sampel: 115 Pemda	Ukuran Pemerintahan, PAD, dan Belanja Modal secara bersama- sama signifikan mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal
5	Simposium Nasional Akuntansi, XVII Mataram, Lombok (2014) Peneliti: Hartono, Mahmud, dan Nanik Sri Utaminingsih (2014)	Dependen: Kelemahan Pengendalian Intern Independen: 1. Pertumbuhan 2. <i>Size</i> (Ukuran) 3. PAD 4. Kompleksitas Daerah	Populasi: 33 Pemerinta h Provinsi di seluruh Indonesia tahun 2011	1. Pertumbuhan dan ukuran memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern 2. PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 3. Kompleksitas berpengaruh

				positif terhadap kelemahan pengendalian intern
6	<p><i>Accounting Analysis Journal</i> Vol 4 No. 2 tahun 2015, ISSN 2252-6765</p> <p>Peneliti: Putri dan Mahmud (2015)</p>	<p>Dependen: Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PAD 3. Ukuran 4. Kompleksitas</p>	<p>Populasi: 263 Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang ada di Indonesia Bagian Barat</p> <p>Sampel: 76 Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada tahun 2012</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan Kompleksitas tidak memiliki pengaruh terhadap Kelemahan pengendalian intern</p> <p>2. Ukuran berpengaruh negatif terhadap Kelemahan pengendalian intern</p>
7	<p><i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Volume 2, Nomor 1, tahun 2013 Hal: 1-9</p> <p>Peneliti: Nirmala dan Daljono (2013)</p>	<p>Dependen: Kelemahan Pengendalian Internal</p> <p>Independen: 1. Profitabilitas Ukuran Perusahaan 3. Laju Pertumbuhan 4. Kompleksitas Transaksi</p>	<p>Populasi: Perusahaan BUMN yang telah diperiksa BPK periode 2008-2009</p> <p>Sampel: 25 perusahaan BUMN periode 2008-2009</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Kelemahan pengendalian internal</p> <p>2. Ukuran perusahaan, Laju pertumbuhan, dan Kompleksitas transaksi tidak memiliki pengaruh terhadap Kelemahan pengendalian internal</p>
8	<p><i>ResearchGate Conference Paper-</i> November 2010 Peneliti:</p>	<p>Dependen: Kelemahan Pengendalian Internal</p>	<p>Populasi: Pemda Kabupaten / Kota se-</p>	<p>1. PAD berpengaruh negatif terhadap Kelemahan</p>

	Kristanto	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Belanja Modal 	<p>Jawa/ Bali</p> <p>Sampel: 107 Pemda Kabupaten / Kota se-Jawa/ Bali tahun 2006</p>	<p>pengendalian internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belanja modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan pengendalian internal
9	<p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 4, April 2016 ISSN 2460-0585</p> <p>Peneliti: Rachmawati dan Handayani (2016)</p>	<p>Dependen: Kelemahan Pengendalian Internal</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Ukuran Pemerintah 3. PAD 4. Kompleksitas Daerah 5. Belanja Modal 	<p>Populasi: 38 Pemda Kabupaten / Kota di Jawa Timur</p> <p>Sampel: 38 Pemda Kabupaten /Kota di Jawa Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal 2. Ukuran, PAD, dan kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal 3. Belanja Modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal
10	<p><i>Journal of Accounting and Economics ScienceDirect 2007</i></p> <p>Peneliti: Doyle, Ge, dan McVay</p>	<p>Dependen: <i>Material Weakness in Internal Control</i></p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Firm Size</i> 2. <i>Firm Age</i> 	<p>Populasi: 877 Perusahaan tahun 2002-2005</p> <p>Sampel: 779</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpengaruh negatif terhadap kelemahan material pengendalian internal 2. Berpengaruh negatif

		3. <i>Financial Health</i> 4. <i>Financial Reporting Complexity</i> 3. <i>Rapid Growth</i> 4. <i>Restructuring Charges</i> 5. <i>Corporate Governance</i>	Perusahaan tahun 2002-2005	3. Berpengaruh positif 4. Berpengaruh positif 5. Berpengaruh positif 6. Berpengaruh positif 7. Berpengaruh negatif
--	--	---	----------------------------	--

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel II.1 diatas, Ukuran pemerintah dapat diukur dari jumlah total aset yang dimiliki, total pendapatan, dan dapat juga diukur dari jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Dalam Martani dan Zaelani (2011), Hartono (2014), serta Putri dan Mahmud (2015), ukuran berpengaruh negatif dikarenakan organisasi yang memiliki ukuran besar memiliki sumber daya yang cukup dalam merancang dan mengimplementasikan SPI yang lebih baik dan memadai. Sedangkan menurut penelitian Nurwati dan Trisnawati (2015), Saputro dan Mahmud (2015), Nirmala dan Daljono (2013), serta Rachmawati dan Handayani (2016), ukuran tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI. Hal ini mengindikasikan kenaikan dan penurunan jumlah penduduk tidak berpengaruh dan pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan aset yang dimiliki oleh pemerintah secara baik, memadai, dan terperinci. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Doyle *et.al.* (2007) tentang kelemahan SPI, ukuran organisasi diukur dari nilai pasar dari ekuitas dan hasilnya berpengaruh negatif, dikarenakan organisasi yang lebih kecil cenderung melaporkan kelemahan SPI lebih banyak dibandingkan organisasi yang lebih besar.

Belanja modal diukur dari realisasi belanja modal dari daerah tersebut dan presentase belanja modal dibagi belanja daerah. Berdasarkan penelitian Kristanto (2010), belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI, hal ini dikarenakan banyaknya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan perolehan aset tetap berwujud belanja modal bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif. Menurut Saputro dan Mahmud (2015), belanja modal tidak berpengaruh dikarenakan tidak terdeteksi adanya tindak korupsi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya pengendalian internal. Sedangkan menurut Rachmawati dan Handayani (2016), belanja modal berpengaruh negatif karena besarnya anggaran belanja modal menjadikan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola dan memanfaatkan belanja modal tersebut.

Pertumbuhan pemerintah daerah dapat diukur dari laju pertumbuhan PDRB. Dalam Martani dan Zaelani (2011) serta Rachmawati dan Handayani (2016), pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI dikarenakan pertumbuhan yang cepat dari suatu organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian internal. Sedangkan menurut Nurwati dan Trisnawati (2015) serta Putri dan Mahmud (2015), pertumbuhan tidak berpengaruh dikarenakan sebagian besar daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, namun pertumbuhan yang baik belum tentu diikuti dengan peningkatan maupun pengurangan jumlah kasus kelemahan SPI. Sedangkan menurut Hartono (2014), pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Selanjutnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah diukur dari total jumlah PAD didaerah tersebut. Menurut Martani dan Zaelani (2011) dan Kristanto (2010), PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI, PAD yang tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak dan tingkat pengawasan sistem pengelolaan penerimaan daerah yang kurang tepat. Sedangkan menurut Saputro dan Mahmud (2015), Nurwati dan Trisnawati (2015), serta Putri dan Mahmud (2015), PAD tidak memiliki pengaruh dikarenakan sejak semakin maraknya pengungkapan pejabat daerah dan anggota DPRD ke pengadilan akibat kasus korupsi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan APBD, membuat PAD sebagai salah satu obyek korupsi mendapat pengawasan khusus dalam peruntukkannya dengan tujuan agar pemerintah daerah efektif melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat.

C. Kerangka Teoritik

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian, kelemahan SPI dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah.

1. Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Besarnya kasus terkait dengan kelemahan SPI akan dipengaruhi oleh ukuran yang mencerminkan besar kecilnya skala dari pemerintah daerah tersebut. Ukuran mampu merepresentasikan kekayaan dan dapat menunjukkan aktivitas yang terjadi pada pemerintah daerah. Ukuran pemerintah biasanya ditunjukkan melalui total aset, total pendapatan, dan jumlah penduduk. Bila

ukuran pemerintah besar, maka kelemahan SPI cenderung rendah. Hal ini dikarenakan tingginya nilai aset suatu pemerintah daerah dianggap kegiatan ekonominya memiliki prospek yang baik dan mampu mendukung kegiatan ekonomi pada daerahnya masing-masing. Aset menggambarkan kekayaan daerah terutama dalam hal infrastruktur dan membuat tingkat pengawasan dari pihak manajemen pemerintah semakin meningkat.

Pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin mengerahkan sumber daya yang dimilikinya agar penjagaan terhadap aset semakin ketat sehingga terhindar dari kecurangan atau penyalahgunaan aset yang dapat menimbulkan kerugian daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan atau sistem pengendalian internal yang baik terhadap aset agar aset tersebut dapat terjaga dengan baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mahmud (2015), menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka dapat mengurangi kelemahan pengendalian intern. Pemerintah daerah dengan ukuran besar telah mampu mengelola sumber daya dengan baik sehingga tingkat resiko kecurangan dapat diminimalisir dan dapat mengimplementasikan SPI yang memadai dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran kecil.

Berdasarkan penelitian Martani dan Zaelani (2011), ukuran pemerintah juga berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Hal ini dikarenakan pemerintah yang berukuran besar memiliki sumber daya yang cukup dalam pengimplementasian SPI yang memadai. Disisi lain, menurut Nurwati dan

Trisnawati (2015), ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI. Hal ini mengindikasikan pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan yang baik terhadap asetnya dan besar kecilnya total aset tidak berpengaruh terhadap lemahnya SPI.

2. Belanja Modal terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk menambah aset tetap. Belanja modal dapat dilakukan melalui proses lelang maupun tender. Berdasarkan harian kompas dalam Kristanto (2009), terdapat delapan belas modus korupsi di daerah. Salah satunya adalah adanya pengusaha yang mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk melakukan intervensi terhadap proses pengadaan agar pengusaha tersebut dimenangkan dalam tender kemudian harga barang/ jasa dinaikkan (*markup*) dan selisih dari harga tersebut dibagi-bagikan. Selain itu, sebelum dilakukan suatu proyek seringkali kepala daerah meminta uang jasa kepada pemenang tender. Dapat terlihat bahwa belanja modal dapat menjadi obyek korupsi politik. Maka dari itu, diperlukan SPI yang baik sebagai mekanisme *check and balance* terhadap kinerja pemerintah daerah dan diharapkan pengawasan terhadap belanja modal semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2010), menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Sedangkan penelitian Rachmawati dan Handayani (2016), menemukan hasil sebaliknya yaitu terdapat pengaruh negatif dikarenakan tingginya kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola jumlah anggaran belanja modal yang relatif besar.

Disisi lain Saputro dan Mahmud (2015), menemukan bahwa kenaikan dan penurunan belanja modal tidak ada pengaruhnya terhadap kelemahan SPI dikarenakan tidak terdeteksi adanya tindakan korupsi yang menimbulkan lemahnya pengendalian internal.

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi didalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mencerminkan aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. PDRB yang tinggi dianggap kegiatan ekonomi di suatu daerah tersebut berjalan dengan baik. Namun besarnya PDRB harus diimbangi dengan tingkat pengawasan yang tinggi dan kompleks dikarenakan dapat menimbulkan potensi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Handayani (2016), pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Pertumbuhan terjadi sangat cepat dan menimbulkan banyak perubahan. Hal tersebut dapat membuat masalah pengendalian internal menjadi tinggi.

Sedangkan menurut Putri dan Mahmud (2015), PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI. Hal tersebut dikarenakan oleh penggunaan pengukuran pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur dengan Laju PDRB selama satu tahun. Berbeda dengan Hartono (2014), yang menyatakan pertumbuhan berpengaruh negatif, jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka kelemahan SPI cenderung rendah. Pemerintah daerah mampu mengatur

dalam hal manajemen daerahnya terutama dalam meminimalisir kelemahan SPI.

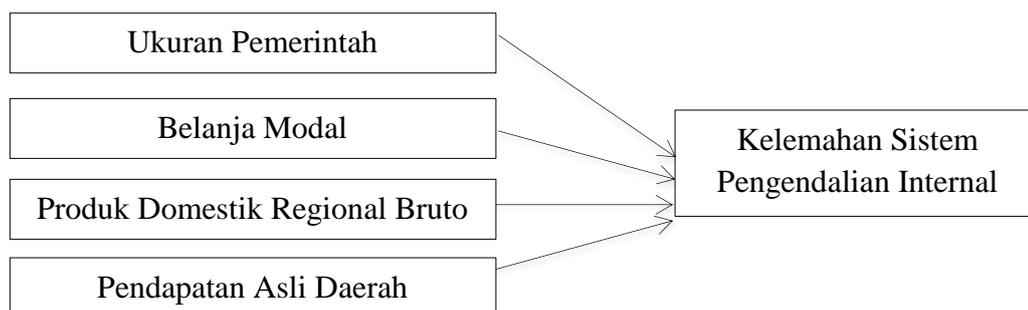
4. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat oleh daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan jumlahnya cenderung tidak terlalu besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi. Setiap organisasi termasuk organisasi pemerintah akan memiliki resiko kecurangan yang tinggi apabila pendapatan dari pos-pos penerimaannya juga tinggi. Disinilah peran dari SPI untuk mengawasi setiap pos penerimaan PAD agar resiko kecurangan dapat diminimalisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2010) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Hal ini dikarenakan tingkat pengawasan yang kurang ketat dalam mengawasi sistem pengelolaan penerimaan daerah serta fungsi kemampuan inspektorat daerah sebagai auditor internal pemda kurang optimal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Martani dan Zaelani (2011), bahwa PAD yang tinggi akan memiliki kelemahan SPI yang lebih banyak. Disisi lain, Saputro dan Mahmud (2015), menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI dikarenakan sudah mendapat pengawasan khusus dalam peruntukannya dan PAD yang

tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga menjadi lebih baik dibandingkan yang memiliki PAD rendah.

Berdasarkan kerangka teoritik diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2017

D. Perumusan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mahmud (2015), menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka dapat mengurangi kelemahan pengendalian intern. Pemerintah daerah dengan ukuran besar telah mampu mengelola sumber daya dengan baik sehingga tingkat kecurangan dapat diminimalisir dan dapat mengimplementasikan SPI yang memadai dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran kecil.

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y).

Kristanto (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pada

pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa belanja modal adalah fokus pemeriksaan BPK dikarenakan banyaknya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan perolehan aset tetap berwujud. Selain itu, pengelolaan belanja modal sudah diatur secara detail oleh pemerintah dan bila terjadi kesalahan akan dilaporkan dalam laporan kelemahan pengendalian internal. Belanja modal merupakan pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari. Semakin besar belanja modal yang dikelola oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kelemahan pengendalian internal pada daerah tersebut.

H₂: Belanja Modal (X₂) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y).

Menurut penelitian Rachmawati dan Handayani (2016), Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa PDRB yang menjadi proksi pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. PDRB merupakan keseluruhan nilai produksi kotor yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah dan biasanya dihitung pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan sehingga memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak.

H3: Produk Domestik Regional Bruto (X₃) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y).

Berdasarkan hasil penelitian Martani dan Zaelani (2011), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai salah satu dari kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak. Tingginya sumber pendapatan yang ada di suatu daerah akan menyebabkan terjadinya peningkatan kecurangan yang dapat merugikan daerah. Pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi tindakan kecurangan yang ada di suatu daerah.

H4: Pendapatan Asli Daerah (X₄) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal.
2. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal.
3. Untuk mengetahui apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal.
4. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa tahun 2013-2015. Ruang lingkup penelitian mencakup ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung dikarenakan adanya media perantara. Data jumlah kelemahan SPI diperoleh dari Laporan IHPS BPK di *website* Badan Pemeriksa Keuangan. Variabel independen yaitu ukuran, belanja modal, dan pendapatan asli daerah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh BPK. Serta Produk domestik regional bruto diperoleh dari laporan PDRB dari *website* Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka serta perhitungan, dan didalamnya terdapat aspek pengukuran dan menggunakan data dalam bentuk numerik.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota) yang ada di Pulau Jawa yang diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 113 kabupaten/ kota yang berada di pulau jawa. Data diambil dari laporan IHPS, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan laporan PDRB. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan dengan beberapa pertimbangan (Sugiyono, 2013).

Adapun sampel yang diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun anggaran 2013-2015 dan telah diaudit oleh BPK;

2. Pemerintah Daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK;
4. Pemerintah Daerah tidak memiliki nilai PDRB negatif;
5. Memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur, yaitu ukuran (total aset), belanja modal, produk domestik regional bruto (PDRB harga konstan), dan pendapatan asli daerah.

Dari kriteria di atas, maka jumlah populasi yang termasuk kedalam sampel penelitian ini adalah 80 pemerintah daerah kabupaten/ kota yang tersebar di Pulau Jawa.

E. Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini meneliti lima variabel, yaitu ukuran pemerintah daerah (variabel X_1), belanja modal (X_2), produk domestik regional bruto (X_3), dan pendapatan asli daerah (X_4) dengan kelemahan sistem pengendalian internal (Y). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh antara variabel independen, ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah, dengan variabel dependen kelemahan sistem pengendalian internal.

Adapun operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Kelemahan SPI)

Variabel dependen atau terikat adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

a) Definisi Konseptual

Kelemahan SPI merupakan kelemahan yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan.

b) Definisi Operasional

Pengukuran kelemahan SPI dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kelemahan SPI} = \text{Jumlah temuan kasus atas Sistem Pengendalian Internal}$$

(Saputro dan Mahmud, 2015)

2. Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu:

a) Ukuran Pemerintah

(1) Definisi Konseptual

Ukuran pemerintah mencerminkan besar kecilnya suatu organisasi pemerintahan, dimana skala pemerintah tersebut dapat

dikelompokkan atau diklasifikasikan melalui beberapa cara tolak ukur.

(2) Definisi Operasional

Ukuran pemerintah diproksikan dengan logaritma natural dikarenakan total aset pemerintahan bernilai besar maka dari itu disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah} = \text{Ln (Total Aset)}$$

(Nurwati dan Trisnawati, 2015)

b) Belanja Modal

(1) Definisi Konseptual

Belanja modal merupakan bagian dari suatu pengeluaran belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun yang bertujuan untuk menambah aset tetap dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya.

(2) Definisi Operasional

Belanja Modal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara jumlah realisasi belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah sehingga terbentuk presentase belanja modal. Alasan menggunakan rasio ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk penambahan aset tetap

pada tahun tertentu. Berikut ini adalah rumus dari Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

(Kristanto, 2009)

c) Produk Domestik Regional Bruto

(1) Definisi Konseptual

PDRB merupakan keseluruhan nilai produksi berupa barang maupun jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu daerah.

(2) Definisi Operasional

Pengukuran PDRB dalam penelitian ini menggunakan rasio perbandingan selisih antara PDRB tahun sekarang dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya. Dalam pertumbuhan PDRB dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Produk Domestik Regional Bruto} = \frac{(\text{PDRB}_{t1} - \text{PDRB}_{t0}) \times 100\%}{\text{PDRB}_{t0}}$$

(Puspitasari, 2013)

d) Pendapatan Asli Daerah

(1) Definisi Konseptual

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari hasil pemungutan pemerintah daerah berupa pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

(2) Definisi Operasional

Pengukuran PAD dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian daerah yang tercermin oleh rasio PAD terhadap total pendapatan sehingga membentuk presentase PAD. Alasan menggunakan rasio ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui porsi pendapatan daerah yang didapat dari PAD dalam bentuk pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun tertentu. Berikut ini adalah rumus dari Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 100\%$$

(Fauza, 2015)

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Berikut akan dijelaskan secara rinci terkait dengan hal tersebut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah statistik yang fungsinya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, dan *range* statistik. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari

sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2013).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik untuk menghindari dan mencegah terjadinya basis data, karena tidak semua data ditetapkan pada model regresi. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi residual memiliki distribusi normal atau tidak (Winarno, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan dua cara:

a) Grafik Histogram dan P Plot

Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan analisis grafik histogram. Sumbu vertikalnya menggambarkan variabel dependen dan sumbu horizontal merupakan nilai residual terstandarisasi. Jika membentuk kurva seperti lonceng dan sama kaki maka nilai residual adalah normal. Sedangkan Uji normal P Plot dilihat dari titik-titik pada p plot menyebar. Jika menyebar sesuai garis diagonal, maka distribusi data dapat dikatakan normal. Namun, apabila titik-titik menyebar tetapi tidak sesuai dengan garis

diagonalnya, maka data dapat dikatakan tidak normal. Uji ini merupakan cara termudah untuk dilakukan, tetapi dapat terjadi kesalahan analisis hasil, khususnya bagi ukuran sampel kecil.

b) Uji *Kolmogorov-Smirnov*

Uji ini dapat dikatakan sederhana dan memiliki validasi yang lebih baik dari uji p-plot. Konsep dasar dari pengujian ini adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku.

b) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen maka model regresi dikatakan baik. Multikolinearitas di dalam model regresi dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas (Winarno, 2009).

Selain itu, uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menganalisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:

- a) Nilai *tolerance* $< 0,10$, atau
- b) Nilai VIF > 10
- c) Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen.

c) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2009). Timbulnya autokorelasi dapat ditemukan pada data runtut waktu, tetapi dapat juga ditemui pada data yang sifatnya antarobjek (*cross section*). Bentuk dari autokorelasi dapat positif maupun negatif. Biasanya terjadi positif pada analisis berdasarkan runtut waktu dikarenakan variabel cenderung mengalami peningkatan misalnya pada variabel pertumbuhan ekonomi. Uji yang sering dipakai untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson. Semua program statistik rata-rata menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai d yang menggambarkan koefisien DW. Dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1
Dasar Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Tolak H_0 , berarti ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak menolak H_0 , berarti tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Tolak H_0 , berarti ada autokorelasi negatif
0	d_1 1,10	d_u 1,54	2 2,46	$4-d_u$ 2,90
				$4-d_1$ 4

Sumber: Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika, 2009.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Winarno, 2009). Namun, dalam penelitian ini dapat di deteksi dengan melihat Grafik Plot dan uji *Spearman`s rho*.

Grafik Plot dapat diketahui dengan melihat nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residunya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar analisis :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dikarenakan metode grafik memiliki jumlah kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi tampilannya. Maka dari itu, pengujian heterokedastisitas ditambah dengan Uji statistik, yaitu Uji *Spearman`s Rho* atau Rank Spearman. Uji *spearman`s Rho* dilakukan dengan cara mengkorelasikan semua variabel independen dengan nilai mutlak residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan

residual diatas 0,05 maka dikatakan bahwa tidak terjadi masalah Heterokedasitas pada model regresi.

3. Pengujian Hipotesis

Menurut Kuncoro (2004), pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual secara statistik hal ini dapat diukur dari koefisien determinasi (R²), Uji statistik f, Uji t, dan analisis regresi berganda.

Uji hipotesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan laporan tahunan yang dijadikan objek penelitian.
- b) Menghitung proksi dari masing-masing variabel.
- c) Melakukan uji regresi model.

Analisis regresi menggunakan regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu:

$$ICW_{it} = \alpha + b_1UPI_{it} + b_2BM_{it} + b_3PDRB_{it} + b_4PAD_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

ICW = kelemahan sistem pengendalian internal

a = konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = koefisien regresi

UP = ukuran pemerintah

BM = belanja modal

PDRB = produk domestik regional bruto

PAD = belanja modal

e = *error term*

i = observasi pada periode penelitian

t = tahun amatan

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji t, Uji Koefisien Determinasi (R²) dan Uji F.

a) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Kuncoro (2004), tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel penjelasan (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen, membandingkan antara *p value* dengan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat ditentukan apakah Ho ditolak atau diterima (Ho diterima apabila *p value* > 0,05, Ho ditolak apabila *p value* ≤ 0,05).

Kriteria signifikansi hipotesis menurut Kuncoro (2004) adalah:

- (1) Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- (2) Jika signifikansi ≤ 0,05 maka Ho ditolak (koefisien regresi signifikan).

Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Kuncoro, 2004), tetapi karena R² mengandung kelemahan mendasar, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka penelitian ini menggunakan adjusted R² berkisar antara nol dan satu, jika nilai adjusted R² semakin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen (Winarno, 2009).

c) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Kuncoro (2004), uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria signifikansi simulasi adalah:

- (1) Jika signifikansi $> 0,05$ maka, H_0 diterima
- (2) Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen terhadap kelemahan sistem pengendalian internal sebagai variabel dependen. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota) yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2013-2015. Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dipilih karena memiliki kabupaten/ kota kedua terbesar setelah Sumatera, memiliki opini wajar terbanyak dibanding pulau lainnya, dan presentase besarnya permasalahan kelemahan SPI lebih dari 20% pada periode tahun 2013-2015. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun anggaran 2013-2015 dan telah diaudit oleh BPK;
- b) Pemerintah Daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- c) Pemerintah Daerah menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian internal yang diterbitkan oleh BPK;

- d) Pemerintah Daerah tidak memiliki nilai PDRB negatif;
- e) Memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur, yaitu ukuran pemerintah (total aset), belanja modal, produk domestik regional bruto (PDRB harga konstan), dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 80 pemerintah dari 113 pemerintah daerah.

Tabel IV.1
Perhitungan Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Jawa	113
2	Pemerintah Daerah yang belum mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2015	(26)
3	Pemerintah Daerah yang tidak memiliki opini wajar	(5)
4	Pemerintah Daerah yang memiliki nilai PDRB negatif	(1)
5	Pemerintah Daerah yang tidak memiliki data secara lengkap pada laporan keuangannya selama tahun 2013-2015	(1)
	Jumlah Sampel	80
	Jumlah Observasi	240

2. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran analisis deskriptif dilakukan terhadap variabel ukuran perusahaan, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen dan kelemahan sistem pengendalian internal sebagai variabel dependen. Pengukuran dilakukan dengan aplikasi SPSS Versi 22. Analisis statistik deskriptif berkaitan dengan informasi *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi.

Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif yang dijelaskan pada tabel IV.2:

Tabel IV.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICW	240	2,00	16,00	7,7542	2,94901
UP	240	27,81	30,11	28,7079	,45624
BM	240	4,95	34,80	18,3360	4,98572
PDRB	240	2,64	8,37	5,5470	,69341
PAD	240	3,18	41,13	15,7714	7,71225
Valid N (listwise)	240				

Sumber: SPSS 22, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik deskriptif diatas, terdapat informasi mengenai nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan dependen yang diuji pada penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan analisis deskriptif berdasarkan tabel diatas:

a) Variabel Dependen (Kelemahan SPI)

Kelemahan SPI diukur dengan jumlah temuan kasus atas sistem pengendalian internal dari BPK. Dari 240 observasi, kelemahan SPI yang memiliki nilai minimum 2 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon tahun 2015 dan Kabupaten Boyolali tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan SPI di Pemda Kabupaten Cirebon dan Boyolali tergolong rendah yaitu hanya sebesar 2 temuan. Hal ini dikarenakan dua kabupaten tersebut menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya. Selain itu, ada beberapa kebijakan baru seperti belanja dinas dilakukan dengan lebih selektif lagi dan dibatasi harinya, adanya pembinaan kapasitas sumber daya manusia

bagi pengelola PAD, dan adanya pengawasan atas manajemen sumber-sumber keuangan daerah.

Nilai maksimum kelemahan SPI pada tabel diatas menunjukkan angka 16. Angka ini dimiliki oleh Pemda Kabupaten Purworejo tahun 2013. Sebenarnya Purworejo mengalami penurunan kelemahan dikarenakan tahun 2012 terdapat 25 temuan. Hanya saja kelemahan SPI yang masih ada dikarenakan belum tersedianya sumber daya manusia fungsional perencanaan, komposisi belanja daerah yang belum proporsional, dan belum optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa kelemahan SPI di Kabupaten Purworejo tergolong tinggi pada periode pengamatan 2013-2015, yaitu sebesar 16 temuan. Nilai *mean* sebesar 7,7542 menunjukkan bahwa kelemahan SPI rata-rata sebesar 7,7542. Sedangkan standar deviasi menunjukkan angka 2,94901. Nilai ini masih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya yaitu sebesar 7,7542. Hal ini menunjukkan simpangan data kelemahan SPI relatif baik dan terdapat variasi dalam kelemahan SPI pada Pemda Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa.

b) Variabel Independen

(1) Ukuran Pemerintah

Ukuran Pemerintah diproksikan dengan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan tabel IV.2, nilai minimum pada ukuran pemerintah adalah sebesar 27,81. Nilai ini dimiliki oleh Pemda Kota Batu pada LKPD tahun 2013. Hal ini dikarenakan sedikitnya kas dari bendahara penerimaan dan tidak adanya sumber kas dari bendahara

dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nilai maksimum menunjukkan angka 30,11 dan dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bekasi pada LKPD tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya kas dari Puskesmas, meningkatnya kas di daerah, adanya kas di bendahara penerimaan, serta peningkatan pada aset tetap. Dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah terbesar dimiliki oleh Kabupaten Bekasi sebesar 30,11 atau total aset Rp. 11.945.824.729.008,90. Nilai *mean* menunjukkan angka 28,7079. Besarnya standar deviasi yaitu 0,45624. Angka standar deviasi lebih kecil dari angka *mean*. Dapat dikatakan bahwa simpangan data ukuran pemerintah relatif baik dan menunjukkan terdapat variasi dalam ukuran pemerintah.

(2) Belanja Modal

Belanja modal pada penelitian ini diukur menggunakan rasio perbandingan antara besarnya belanja modal dengan total belanja daerah. Nilai minimum menunjukkan angka 4,95% yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Rembang tahun 2015. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembelian tanah, sedikitnya perbaikan jalan dan irigasi, serta anggaran belanja lebih banyak disalurkan ke belanja pegawai. Nilai maksimum sebesar 34,8% dan nilai ini dimiliki oleh Pemda Kota Depok tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada peralatan dan mesin. Nilai *mean* sebesar 18,336 dan nilai standar deviasi sebesar 4,98572. Nilai standar deviasi menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa

simpangan data pada belanja modal relatif baik dan menunjukkan terdapat variasi dalam belanja modal.

(3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada penelitian ini, PDRB diproksikan dengan PDRB harga konstan. Pada hasil analisis deskriptif, nilai minimum menunjukkan angka 2,64%. Angka ini dimiliki oleh Pemda Kabupaten Pekalongan tahun 2014. Hal ini dikarenakan terjadi banjir rob pada tahun tersebut yang menjadikan lahan pertanian terkena dampaknya. Sedangkan pertanian merupakan salah satu sektor dari PDRB, sehingga membuat pertumbuhan sedikit lambat. Sementara itu, nilai maksimum menunjukkan angka 8,37% dan angka ini dimiliki oleh Pemda Kabupaten Pekalongan tahun 2013. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah seperti batik pekalongan yang semakin mendunia. Selain itu, peningkatan di sektor peternakan dan perikanan. Nilai *Mean* menunjukkan angka 5,547 dan standar deviasi sebesar 0,69341. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada PDRB relatif baik dan terdapat variasi dalam PDRB.

(4) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diukur menggunakan rasio perbandingan antara besarnya PAD dengan total pendapatan. Berdasarkan tabel IV.2, nilai minimum pada PAD adalah sebesar 3,18%. Nilai ini dimiliki oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya pada LKPD tahun 2013. Hal ini dikarenakan

pendapatan pajak dan retribusi dari dinas koperasi belum memadai. Nilai maksimum menunjukkan angka 41,13% dan dimiliki oleh Pemda Kota Cilegon pada LKPD tahun 2015. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pada semua komponen PAD seperti peningkatan di pendapatan pajak, retribusi, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dapat disimpulkan bahwa PAD terbesar dimiliki oleh Kabupaten Bekasi sebesar 41,13%. Nilai *mean* menunjukkan angka 15,7714. Besarnya standar deviasi yaitu 7,71225. Angka standar deviasi lebih kecil dari angka *mean*. Dapat dikatakan bahwa simpangan data PAD relatif baik dan menunjukkan terdapat variasi dalam PAD.

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis, perlu dilakukan pengujian atas beberapa persyaratan asumsi klasik yang mendasari model regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolenieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil dari pengujian asumsi klasik:

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki data yang normal dalam

pendistribusiannya. Dalam pengujian normalitas ini menggunakan grafik histogram dan grafik P-Plot serta uji *one sample kolmogorov smirnov*.

(1) Uji Normalitas dengan Grafik

Berdasarkan hasil di (lampiran VII), tampilan grafik histogram terlihat seimbang karena tidak melenceng ke satu sisi dan pada grafik P-Plot terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Garis tersebut menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Dengan melihat hasil dari grafik P-Plot menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki data normal dan dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

(2) Uji *one sample kolmogorov-smirnov*

Hasil uji *one sample kolmogorov-smirnov* pada tabel dibawah ini menunjukkan nilai *kolmogorov smirnov* sebesar 0,056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,063 atau 6,3%. Tingkat signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Uji ini banyak dipakai karena analisisnya sederhana dan juga akan adanya persamaan persepsi antara satu pengamat dengan pengamat lainnya. Biasanya sering terjadinya perbedaan pendapatan jika hanya melakukan uji dengan menggunakan grafik maupun histogram. Dikarenakan hasil uji kolmogorov-smirnov

menunjukkan data yang normal (signifikansi diatas 0,05), maka uji normalitas sudah terpenuhi.

Perbandingan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku, yaitu data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal, perbandingan ini merupakan Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dengan kata lain, uji ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Berikut ini adalah hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov:

Tabel IV.3
Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		240
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,81656021
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,056
	Negative	-,026
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

b) Uji Multikolinearitas

Setelah dilakukan uji normalitas, maka dilakukan uji multikolinearitas.

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel

independen. Model regresi dapat terindikasi adanya masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance* < 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10. Sebagian besar para peneliti banyak menggunakan nilai *tolerance* dan VIF dalam menentukan apakah terjadi multikolinearitas atau tidak didalam model regresi linier berganda dibandingkan dengan menggunakan parameter-parameter yang lain.

Tabel dibawah ini menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah lebih dari 0,10 yaitu masing-masing sebesar 0,755; 0,815; 0,964; dan 0,765. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan nilai VIF untuk semua variabel yang kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen didalam model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Berikut ini adalah tabel hasil analisisnya:

Tabel IV.4
Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,885	12,917		,223	,823		
	UP	-,018	,463	-,003	-,038	,970	,755	1,324
	BM	-,060	,041	-,101	-1,460	,146	,815	1,227
	PDRB	,952	,270	,224	3,528	,001	,964	1,037
	PAD	,075	,027	,197	2,768	,006	,765	1,307

a. Dependent Variable: ICW

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

c) Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, cara pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t sebelumnya dalam model regresi. Dalam membaca tabel Durbin-Watson simbol “ k ” menunjukkan banyaknya variabel bebas dan “ n ” menunjukkan banyaknya observasi. Pada penelitian ini, taraf signifikansi menggunakan angka 5% dengan $k=4$ dan $n=240$. Maka diperoleh $d_L = 1,76325$ dan $d_U = 1,81384$. Berdasarkan data tersebut, dasar pengambilan keputusan autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5
Dasar Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Tolak H_0 , berarti ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak menolak H_0 , berarti tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Tolak H_0 , berarti ada autokorelasi negatif
0	d_L	d_U	2	4
	1,76325	1,81384	1,956	2,18616
			2,18616	2,23675

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Hasil pengujian Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,296 ^a	,088	,072	2,84043	1,956

a. Predictors: (Constant), PAD, PDRB, BM, UP

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,956 sehingga berada pada $dU < dW \leq 4-dU$ yaitu $1,81384 < 1,956 \leq 2,18616$ yang menunjukkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

d) Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Peneliti menggunakan dua cara untuk menguji heterokedastisitas, yaitu:

1) Scatterplot

Uji heterokedastisitas dengan Scatterplot memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu jika terdapat suatu pola tertentu seperti adanya titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar, kemudian menyempit), maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat gambar scatterplot dalam (lampiran VIII) dan disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan heterokedastisitas. Hal ini terlihat bahwa tidak adanya suatu pola tertentu yang teratur pada gambar tersebut dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

2) Uji Spearman's Rho atau Rank Spearman

Uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing variabel independen terhadap nilai mutlak residualnya atau absolut residual menggunakan korelasi Rank Spearman. Dari hasil data dalam

tabel dibawah ini, korelasi *rank spearman* antara ukuran pemerintah dengan variasi residual regresi (Ut) adalah 0,366, korelasi *rank spearman* antara belanja modal dengan Ut adalah 0,733, korelasi *rank spearman* antara produk domestik regional bruto dengan Ut adalah 0,497, dan korelasi *rank spearman* antara PAD dengan Ut adalah 0,242. Angka ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas. Berikut ini adalah tabel hasil uji *Spearman's Rho*:

Tabel IV.7
Uji Heterokedastisitas

			Correlations				
			UP	BM	PDRB	PAD	ABS_RES
Spearman's rho	UP	Correlation Coefficient	1,000	,305**	,151*	,218**	-,062
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,019	,001	,336
		N	240	240	240	240	240
	BM	Correlation Coefficient	,305**	1,000	,091	,206**	,022
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,159	,001	,733
		N	240	240	240	240	240
	PDRB	Correlation Coefficient	,151*	,091	1,000	,114	,044
		Sig. (2-tailed)	,019	,159	.	,079	,497
		N	240	240	240	240	240
	PAD	Correlation Coefficient	,218**	,206**	,114	1,000	,076
		Sig. (2-tailed)	,001	,001	,079	.	,242
		N	240	240	240	240	240
	ABS_RES	Correlation Coefficient	-,062	,022	,044	,076	1,000
		Sig. (2-tailed)	,336	,733	,497	,242	.
		N	240	240	240	240	240

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

4. Pengujian Hipotesis

a) Analisis Regresi Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak ada masalah dalam uji asumsi klasik. Maka dari itu, penelitian dilanjutkan dengan menguji regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui koefisien regresi yang akan menentukan hipotesis pada penelitian ini diterima atau ditolak dan untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan metode regresi linear, maka hasilnya adalah:

Tabel IV.8
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,885	12,917		,223	,823
UP	-,018	,463	-,003	-,038	,970
BM	-,060	,041	-,101	-1,460	,146
PDRB	,952	,270	,224	3,528	,001
PAD	,075	,027	,197	2,768	,006

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$ICW = 2,885 - 0,018UP - 0,060BM + 0,952PDRB + 0,075PAD + e$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 2,885 yang menjelaskan bahwa jika variabel ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan

pendapatan asli daerah bernilai konstan atau 0, maka kelemahan SPI akan meningkat sebesar 2,885.

- b. Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (UP) adalah sebesar -0,018 artinya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Hal ini menunjukkan bahwa jika ukuran pemerintah naik satu rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan kelemahan SPI sebesar 0,018.
- c. Koefisien regresi untuk belanja modal (BM) adalah sebesar -0,060. Ini artinya bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Ini mengindikasikan bahwa jika belanja modal naik satu persen, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan kelemahan SPI sebesar 0,060.
- d. Koefisien regresi untuk produk domestik regional bruto (PDRB) adalah sebesar 0,952. Ini berarti produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Ini mengindikasikan bahwa jika produk domestik regional bruto naik satu persen dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kelemahan SPI sebesar 0,952.
- e. Koefisien regresi untuk pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 0,075. Ini artinya bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI. Ini mengindikasikan jika pendapatan asli daerah naik satu persen, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kelemahan SPI sebesar 0,075.

b) Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian uji t dilakukan dengan menggunakan kriteria berdasarkan t_{hitung} dari masing-masing variabel independen terhadap nilai t_{tabel} dan berdasarkan probabilitas (ρ). Pada penelitian ini, df ($n-k$) yang dihasilkan sebesar 235 ($240-5$), dengan n merupakan jumlah observasi penelitian dan k menunjukkan jumlah variabel bebas dan terikat. Dengan nilai df 235 dan signifikansi 0,05, maka nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,970110 untuk *two tail* dan *one tail* sebesar 1,651364. Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka harus dibuat hipotesis.

Tabel IV.9
Hasil Pengujian Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,885	12,917		,223	,823
UP	-,018	,463	-,003	-,038	,970
BM	-,060	,041	-,101	-1,460	,146
PDRB	,952	,270	,224	3,528	,001
PAD	,075	,027	,197	2,768	,006

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis-hipotesis yang telah dijelaskan dalam bab III.

Berikut merupakan penjelasan pengujian hipotesis-hipotesis berikut:

(1) Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa H1: Ukuran Pemerintah (X1) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y). Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,970. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, variabel ini memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kelemahan SPI. Nilai t_{hitung} yang dihasilkan adalah sebesar -0,038. Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1,970110. Dapat disimpulkan bahwa arah hubungan ukuran pemerintah terhadap SPI berpengaruh negatif tidak signifikan.

(2) Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah H2: Belanja Modal (X2) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y). Berdasarkan hasil uji t, nilai t_{hitung} yang lebih kecil daripada t_{tabel} ($-1,460 < 1,970110$) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,146. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kelemahan SPI (Y).

(3) Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah H3: Produk Domestik Regional Bruto (X3) berpengaruh terhadap

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y). Berdasarkan hasil uji t, produk domestik regional bruto memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,528 > 1,970110$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI (Y).

(4) Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah H2: Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Y). Berdasarkan hasil uji t, nilai t_{hitung} yang lebih besar daripada t_{tabel} ($2,678 > 1,970110$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,006. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI (Y).

c) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai koefisien determinasi bernilai 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka variabel independen dinyatakan sangat baik dalam memberikan prediksi yang tepat terkait variabel dependen dalam suatu penelitian.

Berikut ini adalah hasil uji Koefisien Determinasi:

Tabel IV.10
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,296 ^a	,088	,072	2,84043

a. Predictors : (Constant), PAD, PDRB, BM, UP

b. Dependent variabel: ICW

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Berdasarkan tabel Uji R-Square tersebut, dapat dilihat besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,072 atau 7,2%. Nilai Adjusted R Square digunakan karena model regresi dalam penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel bebas. Menurut Santoso (2001), koefisien determinasi menggunakan Adjusted R² untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas atau independen. Hal ini berarti 7,2% variabel dependen, kelemahan SPI, dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang masuk dalam model regresi, yaitu ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar model penelitian ini. Variabel-variabel lain yang dimaksud seperti jumlah penduduk, jumlah SKPD, Dana alokasi Umum, dan lain sebagainya.

d) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dan juga

berdasarkan probabilitas (ρ). Dalam penelitian ini, $df_1 = 4$ (jumlah variabel-1) dan $df_2 = 235$ ($n-k$, dimana n sebesar 240 yang merupakan jumlah observasi dan $k = 5$ adalah jumlah variabel bebas dan terikat). Dengan demikian didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,410058. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi, maka harus dibuat hipotesis.

Tabel IV.11
Hasil Pengujian Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	182,506	4	45,627	5,655	,000 ^b
	Residual	1895,990	235	8,068		
	Total	2078,496	239			

a. Dependent Variable: ICW

b. Predictors: (Constant), PAD, PDRB, BM, UP

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Dari hasil diatas, besarnya F_{hitung} adalah 5,655. Hal ini menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu 2,410058. Tingkat signifikansi sebesar 0,000. Ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan SPI.

B. Pembahasan

1. Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara ukuran pemerintah terhadap kelemahan SPI, maka variabel ukuran pemerintah memiliki hubungan negatif tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Doyle *et.al.* (2007), Martani dan Zaelani (2011), Hartono (2014), serta Putri dan Mahmud (2015). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nirmala dan Daljono (2013), Saputro dan Mahmud (2015), Nurwati dan Trisnawati (2015), serta Rachmawati dan Handayani (2016), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI.

Penyebab tidak berpengaruhnya ukuran pemerintah terhadap kelemahan SPI dapat disebabkan karena pengukuran variabel ukuran yang tidak tepat. Selain itu, peneliti menemukan fakta bahwa memang terlihat tidak adanya pengaruh ukuran (total aset) terhadap kelemahan SPI. Faktanya, pemerintah daerah yang memiliki total aset yang tinggi belum tentu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sehingga banyak pemerintah daerah yang memiliki total aset tinggi ternyata ditemukan banyak temuan kecurangan oleh BPK. Hal ini terbukti dalam temuan kasus oleh BPK RI pada tahun 2013 di Kota Bekasi terdapat total aset Rp 7.082.243.848.883,46 namun

memiliki banyak kasus sekitar 15 temuan. Sehingga Kota Bekasi memperoleh opini WDP. Namun ada pula pemerintah daerah dengan total aset yang tinggi memiliki pengendalian internal yang cukup baik. Seperti halnya Kota Depok memiliki total aset sebesar Rp. 8.198.084.298.261,30 pada tahun 2014 dan hanya ditemukan 4 temuan kasus mengenai kelemahan SPI. Hal ini sejalan dengan laporan IHPS BPK yang memberikan opini WTP kepada pemerintah Kota Depok karena memiliki pengendalian internal yang cukup baik dan tidak ditemukan pelanggaran yang fatal oleh BPK.

Selain itu, alasan tidak berpengaruhnya total aset terhadap kelemahan SPI dikarenakan pemda berukuran besar maupun kecil sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi. Alasan pendukung lainnya karena pemerintah daerah yang memiliki total aset berukuran besar maupun kecil pasti memiliki misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat maupun dalam pengimplementasian SPIP. Dapat terlihat dalam perhitungan statistik besar kecilnya aset tidak berpengaruh, dikarenakan ada peran SDM/ strategi manajemen yang kurang optimal terutama dalam mengelola aset tersebut sehingga menimbulkan kelemahan Sistem Pengendalian Internal. Seperti halnya:

a) Kabupaten Bandung Barat

Pada tahun 2014, di Kabupaten Bandung Barat terdapat pengelolaan kas dan rekening bank yang belum memadai. Selain itu, pada bendahara

penerimaan adanya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang belum disetorkan ke Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan memiliki 34 Unit Pelaksana Teknis Daerah. Penyetoran retribusi tidak dilakukan secara langsung ke kas daerah melainkan ke bendahara penerimaan. Kemudian terjadi Kurang catat kas sebesar 45.979.900.

Selanjutnya, Pengelolaan piutang tidak mencerminkan nilai sebenarnya, denda keterlambatan bayar pajak tidak dikenakan dikarenakan pada saat *entry* data penerbitan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perhitungan denda diinput menggunakan tanggal *entry* bukan masa pajak. Sehingga terjadi *Human Error*. Selain itu, nilai persediaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar 371 juta. Perhitungan fisik dilakukan secara sampel dan hanya berdasarkan mutasi masuk (dokumen perjanjian) dan keluar (berita acara serah terima barang ke unit kerja/pengeluaran barang dr gudang). Karcis retribusi puskesmas pun tidak tercatat 60 blok sebesar 531 ribu dan Karcis retribusi 299 juta ternyata nihil tapi dicatat dineraca.

b) Kabupaten Banjar

Pada tahun 2015, dalam aset tetap terdapat peralatan dan mesin yang tidak ditemukan fisiknya sebesar 835 juta dan aset lain-lain sebesar 1,6 milyar.

c) Kabupaten Bekasi

Di Kabupaten Bekasi sedang ada penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata menuju tahun 2017. Dalam menempuh penguatan sektor tersebut, terdapat peran SDM yang belum memadai seperti ada saldo kas pada bendahara pengeluaran yang belum dilaporkan ke kas daerah seperti jasa giro pada tahun 2015. Pengelolaan persediaan juga belum optimal, adanya pencatatan mutasi pada puskesmas karang mulya tidak dilaksanakan padahal pemberian obat pasien sudah berjalan mengakibatkan berubahnya jumlah persediaan. Puskesmas melakukan pembelian obat mandiri tapi tidak ada catatan obat yg dibeli. Selanjutnya, Puskesmas kedungwaringin jumlah persediannya ada yang tidak dicantumkan sebesar 44 juta. Dan Saldo investasi non permanen dana bergulir UKM sebesar satu milyar belum disajikan sesuai dengan kondisi dapat tertagih. Terdapat 12 kecamatan yang angsurannya kurang dari 6 kali (sulit tertagih).

d) Kabupaten Kulon Progo

Di Kabupaten Kulon Progo sedang dilakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011-2016. Rencana tersebut tidak terlepas dari peran SDM. Pada tahun 2015, adanya selisih nilai perolehan dan nilai serah terima sehingga nilai 14 milyar yang dicatat tidak dapat diyakini. Kemudian, terdapat penghapusan ganda atas aset yang sama. Masing-masing senilai 14 juta. Selain itu, Saldo persediaan tidak sesuai dengan perhitungan fisik. Gudang penyimpanan tidak

memadai. Persediaan seperti karcis dan pupuk yang kadaluarsa, mati, tidak dilaporkan dan tidak dilakukan penghapusan.

e) Kabupaten Pati

Di Kabupaten Pati sedang adanya penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang tahun 2000-2025. Namun masih banyak penyelewengan yang terjadi oleh pihak SDM nya. Pada tahun 2015, adanya pencurian gabah yang dicuri 132 ribu kg oleh tenaga keamanan gudang kantor ketahanan pangan dan pencurian tersebut terjadi dalam beberapa tahap pengambilan untuk kemudian dijual tanpa sepengetahuan kepala KPP. Selanjutnya, Ada persediaan yang tidak jelas peruntukkannya yang masih berisi didalam kardus dan belum diketahui jumlahnya.

2. Belanja Modal terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara hubungan belanja modal terhadap kelemahan SPI, variabel belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kelemahan SPI. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Kristanto (2010) serta Rachmawati dan Handayani (2016). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputro dan Mahmud (2015), yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan SPI.

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdeteksi adanya tindak korupsi belanja modal oleh pemerintah daerah yang menimbulkan lemahnya pengendalian internal. Selain itu, belanja modal Pemda di Pulau Jawa hampir semuanya dibawah 28%, hanya ada 7 pemda dari total 80 pemda yang lebih dari 28% itupun tidak konsisten hanya beberapa tahun saja. Padahal pusat berharap belanja modal dari tahun 2013 setidaknya 28% bahkan target ditahun 2014 sebesar 30%. Pemerintah berharap adanya efisiensi terhadap belanja operasi terutama pada belanja pegawai dan belanja barang agar dana bisa dialihkan untuk belanja modal (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2013). Di sebagian besar LKPD, yang memicu terjadinya kelemahan SPI adalah belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Dapat dikatakan angka statistik untuk belanja modal tidak berpengaruh. Kemungkinan karena nilai dari belanja operasi terlalu besar dan mengakibatkan terjadinya kelemahan SPI. Berikut ini adalah bukti-bukti pendukungnya:

a) Kota Depok

Pada tahun 2014, Pengesahan belanja barang dan jasa tdk didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap pada 5 Organisasi perangkat daerah sebesar 690 juta. Seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja adanya pengeluaran yang tidak didukung bukti sebesar 4,3 juta dan perjalanan dinas 372 juta tidak divalidasi bendahara pengeluaran. Surat pertanggungjawaban fisik pun tidak dilengkapi dengan penomoran

sesuai dokumen yg tertera sehingga sulit dicek. Selanjutnya pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, serta Dinas Pemadam Kebakaran, semua dinas tersebut melakukan pengeluaran tetapi tidak ada bukti pengeluarannya dan terdapat salah catat dalam melaporkan transaksinya.

b) Kabupaten Blora

Pada tahun 2014, Pemberian hibah senilai 1,07 milyar tidak sesuai peruntukannya pada 2 satuan kerja. Seperti halnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM, penerima hibah 505 juta bukan merupakan kelompok usaha bersama. Bahkan ada usaha yang belum berjalan sebesar 240 juta. Kemudian, pada Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informatika terdapat Pemberian 325 juta kepada yg bukan kelompok masyarakat bidang kesenian. Pemberian hibah 749,4 juta oleh penerima Kelompok Usaha Bersama (19 kelompok usaha bermasalah seperti tidak ada aktivitas operasi, tidak ada pembelanjaan sesuai di proposal, dipakai pembangunan bendaraha Kelompok yang berindikasi pada kerugian daerah.

c) Kabupaten Brebes

Pada tahun 2015, Belanja pegawai (gaji dan tunjangan) belum memadai. Adanya Kelebihan pembayaran tunjangan anak sebesar 11 Juta. Kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai 13,5 juta. Selain itu, database pegawai kurang valid.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara PDRB terhadap kelemahan SPI, maka variabel PDRB memiliki hubungan positif signifikan terhadap kelemahan SPI. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Hartono (2014), Nurwati dan Trisnawati (2015), serta Putri dan Mahmud (2015). Penelitian ini sejalan dengan Martani dan Zaelani (2011) serta Rachmawati dan Handayani (2016).

Alasan yang mendasari adalah semakin cepat dan tinggi suatu pertumbuhan yang diprosikan dengan PDRB akan semakin sulit pengendalian internal untuk dijalankan. Pemerintah daerah akan mendapat tantangan yang lebih besar terutama dalam mengimplementasikan pengendalian internal secara konsisten. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan maka kasus kelemahan SPI semakin banyak. Hasil hipotesis pada penelitian ini mendukung *agency theory* bahwa akan banyak terjadi *information asymetry*, dimana salah satu pihak mempunyai informasi lebih banyak dari pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai informasi lebih banyak mengenai PDRB dibandingkan pihak masyarakat.

Berikut ini adalah bukti bahwa PDRB dapat mengakibatkan kelemahan SPI.

a) Kabupaten Boyolali

Pada tahun 2015, adanya pengelolaan belanja hibah yang tidak memadai. (Diberikan kepada kelompok masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah desa. Seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah lain (daerah otonom baru hasil pemekaran daerah) seperti kabupaten pangandaran. Selain itu, penerima hibah pada dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak ditetapkan dengan surat ketetapan penerima hibah seperti pembangunan irigasi tanah dalam, pembangunan embung desa wonosegoro, pengadaan bibit tanaman (program pengkayaan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan), dan pembangunan irigasi air permukaan desa karanggatak. Selanjutnya, belanja barang untuk dihibahkan kepada masyarakat pada dinas peternakan dan perikanan tidak memadai contohnya kegiatan pengembangan integrasi tanaman dan ternak. Dibagikan kepada 23 kelompok, 1 orang mendapatkan 2 hingga 3 ekor sapi betina) sebagai potensi ekonomi rakyat. Setelah mendapat konfirmasi dari penerima hibah terdapat banyak sapi yang mati dikarenakan dikirim dengan kondisi tidakk sehat, kecil, dan kurus.

b) Kabupaten Jombang

Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan berperan sebagai penyumbang kedua dalam PDRB di Kabupaten Jombang. Namun, terdapat masalah kelemahan SPI seperti persediaan induk ternak pada Dinas

Peternakan dan Perikanan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar 170 Juta.

c) Kota tasik

Pada tahun 2014, penambangan galian mineral bukan logam dikota tasik tidak memiliki izin usaha penambangan. Tujuh perusahaan terdaftar wajib pajak sedangkan 14 perusahaan tidak terdaftar. Pertambangan di Kota Tasik sebanyak 34 lokasi.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara PAD terhadap kelemahan SPI, maka variabel PAD memiliki hubungan positif signifikan terhadap kelemahan SPI. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Saputro dan Mahmud (2015), Nurwati dan Trisnawati (2015), serta Putri dan Mahmud (2015). Penelitian ini sejalan dengan Martani dan Zaelani (2011) serta Kristanto (2010). Alasan yang mendasari adalah ketika PAD tinggi, tingkat pengawasan terhadap PAD kurang optimal terutama mengenai sistem pengelolaan penerimaan daerah. Pemerintah daerah akan mendapat tantangan yang lebih besar terutama dalam mengimplementasikan pengendalian internal secara konsisten.

Dengan demikian, semakin tinggi PAD maka kasus kelemahan SPI semakin banyak. Hasil dari penelitian hipotesis ini mendukung teori

stakeholders, yang menyatakan bahwa pemerintah harus mampu mengelola seluruh kekayaan, aset, dan pendapatan daerah untuk kesejahteraan rakyat dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Jika PAD tinggi maka kelemahan pengendalian internal cenderung semakin banyak. Maka dari itu, PAD harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan dari *stakeholders*. Berikut ini adalah bukti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI:

a) Kota Cilegon

Pada tahun 2015, adanya pengelolaan pajak daerah yang tidak tertib seperti:

(1) Pendataan pajak kurang optimal

Bidang pajak belum optimal dalam validasi dan verifikasi data Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Adanya nilai piutang PBB yang tinggi ditahun berjalan serta bidang pajak membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (data dari KPP PBB dan belum divalidasi) ditambah utang yg harus dibayar dan penulisan alamat lengkap untuk selanjutnya dikirim via pos ke alamat lengkap tersebut. Apabila alamatnya tidak jelas maka dititipkan melalui kelurahan. Padahal Validasi dan verifikasi sangat diperlukan untuk melihat kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya agar penda tahu tingkat ketertagihan piutang. Selanjutnya, Adanya NPWP daerah ganda yang mengakibatkan kesalahan pada surat teguran. Jadi surat tersebut tidak tepat sasaran. Sebenarnya NPWP ganda atas

permintaan wajib pajak untuk membedakan jenis pajaknya, hanya saja pihak pemungut pajak harus teliti dalam memberikan surat teguran.

(2) Penetapan pajak kurang optimal

Saat pemungutan pajak *self-assessment*, Unit Pelaksana Teknis Daerah tidak menguji kelengkapan dokumen pendukung Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sehingga masih ditemukan SPTPD yg tdk lengkap.

(3) Penagihan kurang optimal

Seksi penetapan tidak menerbitkan SKPD jabatan atas Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPTPD. Jumlah yang terlambat menyampaikan yaitu 1605 SKPD (pajak restoran). Selain itu, belum diterapkannya penagihan dengan surat paksa/ peringatan.

(4) Pemeriksaan pajak blm optimal dikarenakan hanya ditujukan untuk pajak hotel dan restoran saja.

b) Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2014, Laporan realisasi pendapatan pajak daerah belum seluruhnya didukung bukti transaksi Surat Setoran Pajak Daerah yang sesuai. Bendahara penerimaan tidak memperoleh bukti sehingga pendapatan Pajak tidak dapat diberikan keterangan sumber wajib pajaknya. Selain itu, Pemungutan pendapatan pajak tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, terdapat reklame dan pajak yang belum dipungut pajak. Masih ditahun yang sama, Pendapatan retribusi pada Dinas pemuda

olahraga kebudayaan dan pariwisata kurang memadai. Pengelolaan parkir di GOR satria dilaksanakan swakelola dg masyarakat. Pengelola mendapat 5 Juta/bulan. Pendapatan ini tidak didukung dengan butki karcis yg terjual.

c) Kabupaten Bondowoso

Pada tahun 2014, Pemanfaatan kebun kopi andungsari 240.000 M2 pada Dinas kehutanan dan perkebunan tidak memberikan kontribusi pada PAD. Kebun Kopi di tanam tahun 2009, namun panen hanya sekali yaitu pada tahun 2014 sebanyak 2250 kg gelondong basah. Dinas mendapat 1125 kg atau 5,6 Juta dan tidak disetorkan ke kas daerah tetapi untuk pemeliharaan kebun kopi. Jumlah hasil, penjualan, serta penggunaannya tidak ada laporan kepada pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

C. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah. Objek penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa dengan periode 2013-2015. Dari kriteria-kriteria yang di tentukan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 sampel per tahun, sehingga total observasi digunakan berjumlah 240 observasi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan negatif tidak signifikan antara ukuran pemerintah dengan kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya apabila ukuran pemerintah meningkat belum tentu memiliki kelemahan sistem pengendalian internal yang tinggi juga, begitupun sebaliknya. Sehingga pemerintah daerah yang memiliki ukuran (total aset) yang tinggi maupun rendah dituntut untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap pengendalian internalnya dikarenakan keduanya memiliki kemungkinan terjadi penyimpangan akibat lemahnya pengendalian internal yang dimiliki.
2. Belanja modal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya apabila belanja modal

meningkat, belum tentu terjadi peningkatan pada kelemahan sistem pengendalian internal, begitupun sebaliknya.

3. Produk domestik regional bruto memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB maka kelemahan SPI akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan yang cepat atau tinggi akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerahnya dan lebih rentan menghadapi masalah-masalah pada pengendalian internal.
4. Pendapatan asli daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka akan terjadi peningkatan pada kelemahan SPI nya. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola daerahnya, terutama terhadap pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Besarnya dana PAD yang dikelola dan luasnya kewenangan yang dimiliki menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menyebabkan kelemahan sistem pengendalian internal menjadi tinggi.

D. Implikasi

Kelemahan sistem pengendalian internal dapat memicu terjadinya penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian daerah. Pentingnya informasi mengenai penyebab terjadinya kelemahan sistem pengendalian internal membuat semakin dibutuhkannya sebagai dasar dalam menentukan

perencanaan bagi pemerintah daerah, pihak eksternal, regulator, maupun auditor terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang lebih ketat agar pengendalian internal dapat dijalankan dengan baik dan konsisten.

Bagi para pemerintah daerah yang menyusun strategi bagaimana cara agar pemahaman sistem pengendalian internal dapat memadai, produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah dapat menjadi salah satu motivasi untuk meminimalisir kelemahan SPI sebab pemerintah daerah yang mampu mengelola keduanya dengan baik akan semakin menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan memadai. Pemerintah daerah yang memiliki opini wajar dalam laporan keuangannya akan lebih baik jika tidak ada kelemahan sistem pengendalian internal didalamnya.

Bagi pihak eksternal, mereka dapat melihat dan menilai seberapa besar kelayakan laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya dengan melihat temuan kasus pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah yang besar cenderung memiliki masalah pengendalian internal yang lebih banyak.

Bagi pihak regulator, hasil penelitian ini dapat menambah literatur yang bisa dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan dan sanksi yang tegas mengenai kelemahan sistem pengendalian internal. Dengan adanya peraturan mengenai SPI yang jelas, maka dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang

terjadi. Dan pihak auditor pemerintah daerah seperti BPK harus menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan yang diberikan terhadap pemda. Meskipun rekomendasi tersebut kadang diabaikan, tetapi ada beberapa pemda yang berusaha untuk memperbaikinya sehingga tidak terjadi lagi kelemahan yang serupa dan sistem pengendalian internalnya semakin baik.

E. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Sampel penelitian ini terbatas hanya pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa sehingga kurang menggambarkan kondisi seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
2. Periode penelitian hanya tiga tahun, yaitu 2013, 2014, dan 2015.
3. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas atau rendah.

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memilih sampel di pulau sumatera atau meneliti seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
2. Menambah periode penelitian menjadi lima tahun untuk hasil yang lebih optimal.
3. Menggunakan variabel independen yang terbaru dikarenakan masih ada peluang untuk peneliti selanjutnya dalam mencari tahu variabel

independen yang mampu menjelaskan kelemahan sistem pengendalian internal, misalnya belanja operasi, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus.

4. Peneliti selanjutnya bisa memilih proksi lain untuk ukuran pemerintah, seperti jumlah penduduk.
5. Menggunakan pengukuran yang berbeda pada kelemahan pengendalian internal dengan memilih klasifikasi kelemahan pengendalian internal yang lebih spesifik misalnya hanya terbatas dibagian akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2013. Akuntansi Pemerintah, Cetakan I. Jakarta: CV. Bumi Metro Jaya.
- Asrullani, Muhamad. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemerintah Daerah. Jakarta: Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Doyle, Jeffrey, et.al. (2007). Determinants of Weakness in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*, Utah State University, University of Washington, dan New York University.
- Fauza, Nailatul. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *JOM FEKON*, Vol.2, No.2.
- Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillan, Stuart L. (2006). Recent Development in Corporate Governance: An Overview. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 12 pp. 381-402
- Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2 No.1 Hal: 53-64.
- _____. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2, No.2.
- Handayani, Desi. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.5 Hal 12-16

- Hartadi, Bambang. 2004. Sistem Pengendalian Intern (Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit). Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE.
- Hartono, Rudi. (2014). Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- _____. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram, Lombok.
- Jensen Michael C. Dan William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No.4 pp 305-360.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
- Kristanto, Septian Bayu. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol.9 No.1 Hal: 1-17
- _____. (2010). Kelemahan Pengendalian Internal dilihat dari Kemampuan dan Pemekaran Pemerintah Daerah. *ResearchGate Conference Paper*.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Metode Kuantitatif: Teori Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Pertama. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nirmala, Swastia dan Daljono. (2013). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan, dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2 No.1 Hal: 1-9.
- Nurwati, Ika dan Rina Trisnawati. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Syariah Paper Accounting*. FEB UMS. Hal: 363-373

- Petrovits, Christine, et.al. (2009). The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *Accounting Review*. Vol.86 Issue 1, p 325-357
- Puspitasari, Titus. (2013). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putri, Novi Kumala dan Amir Mahmud. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda. *Accounting Analysis Journal*, Vol.4 No.2
- Putro, Prima Utama Wardoyo. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Rachmawati, Dian Eka dan Nur Handayani. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5, No.4.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2002. Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Edisi ke-3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rosyada, Ayu Amrina. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 No.1 Hal 102-114
- Ruslina Elli. (2012). Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1
- Santoso, Singgih. 2001. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT ELEK Media Komputindo. Jakarta
- Saputro, Eko Adi dan Amir Mahmud. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, Vol.4 No.3
- Storm, K. (2000). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. *European Journal of Politic Research* 37: 261-289

- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhardjanto dan Yulianingtyas. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret.
- Sukirno, Sardono. (1996). *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi ke-2*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warren, Carl S. 2008. *Pengantar Akuntansi I*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber dari Internet:

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2012-2016 (online). <http://www.bpk.go.id>. (Diakses pada 15 Maret 2017).
- Badan Pusat Statistika. (2002). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*.
- _____. (2016). *Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015* (online). <http://www.bps.go.id>. (Diakses tanggal 13 Maret 2017).
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Temuan BPK dalam LKPD TA 2014 Perlu Perhatian*. <http://dprd.jabarprov.go.id/>. (Diakses pada tanggal 09 Maret 2017).
- Inspektorat Kabupaten Purworejo. *Pengaruh SPIP terhadap Opini BPK*. <http://www.inspektorat.purworejokab.go.id/>. (Diakses pada tanggal 10 Maret 2017).
- Kurniawan, Deny. *Forum Statistika*. <http://ineddeni.wordpress.com/>. (Diakses pada tanggal 07 Juli 2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang *Bagan Akuntansi Standar (BAS)*. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/>. (Diakses pada 7 Mei 2017).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>. (Diakses pada 7 Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <http://www.bpkp.go.id/>. (Diakses pada 9 Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Belanja Modal. <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. (Diakses pada 6 Mei 2017).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah. <http://www.ksap.org/>. (Diakses 10 Maret 2017).
- Provinsi Banten. Banten Terus Benahi Korupsi. <http://bantenprov.go.id/>. (Diakses pada tanggal 09 Maret 2017).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Pengaturan Pajak Daerah. <http://laman.dgip.go.id/>. (Diakses 11 Maret 2017).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/>. (Diakses pada 7 Mei 2017).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. (Diakses pada 6 Mei 2017).
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. <http://www/bpk.go.id/>. (Diakses pada tanggal 21 April 2017).
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319. <http://natawidnyana.files.wordpress.com/>. (Diakses pada 1 Mei 2017).

Lampiran I. Daftar Sampel Pemerintah Daerah

1	Kab. Bandung Barat
2	Kab. Bekasi
3	Kab. Ciamis
4	Kab. Cianjur
5	Kab. Cirebon
6	Kab. Garut
7	Kab. Karawang
8	Kab. Kuningan
9	Kab. Majalengka
10	Kab. Purwakarta
11	Kab. Sukabumi
12	Kab. Sumedang
13	Kab. Tasikmalaya
14	Kota Banjar
15	Kota Bekasi
16	Kota Bogor
17	Kota Cimahi
18	Kota Cirebon
19	Kota Depok
20	Kota Sukabumi
21	Kota Tasikmalaya
22	Kab. Banjarnegara
23	Kab. Banyumas
24	Kab. Blora
25	Kab. Boyolali
26	Kab. Brebes
27	Kab. Grobogan
28	Kab. Karanganyar
29	Kab. Kebumen
30	Kab. Kendal
31	Kab. Magelang
32	Kab. Pati
33	Kab. Pekalongan
34	Kab. Pemasang
35	Kab. Purbalingga

Sumber: Laporan IHPS BPK 1 2016 (diolah)

36	Kab. Purworejo
37	Kab. Rembang
38	Kab. Semarang
39	Kab. Sragen
37	Kab. Rembang
38	Kab. Semarang
39	Kab. Sragen
40	Kab. Tegal
41	Kab. Temanggung
42	Kab. Wonogiri
43	Kab. Wonosobo
44	Kota Magelang
45	Kota Pekalongan
46	Kota Salatiga
47	Kota Surakarta
48	Kota Tegal
49	Kab. Bantul
50	Kab. Kulon Progo
51	Kab. Sleman
52	Kota Yogyakarta
53	Kab. Bondowoso
54	Kab. Gresik
55	Kab. Jember
56	Kab. Jombang
57	Kab. Kediri
58	Kab. Lamongan
59	Kab. Lumajang
60	Kab. Madiun
61	Kab. Magetan
62	Kab. Malang
63	Kab. Ngawi
64	Kab. Pacitan

Sumber: Laporan IHPS BPK 1 2016 (diolah)

65	Kab. Pamekasan
66	Kab. Ponorogo
67	Kab. Probolinggo
68	Kab. Sidoarjo
69	Kab. Situbondo
70	Kab. Trenggalek
71	Kab. Tuban
72	Kab. Tulungagung
73	Kota Batu
74	Kota Madiun
75	Kota Mojokerto
76	Kota Pasuruan
77	Kota Probolinggo
78	Kab. Lebak
79	Kab. Serang
80	Kota Cilegon

Sumber: Laporan IHPS BPK 1 2016 (diolah)

Lampiran II. Hasil Penghitungan Ukuran Pemerintah (X1)

No	Pemda	Tahun	Total Aset	Ln (Total Aset)
1	Kab. Bandung Barat	2013	2.495.377.407.316,34	28,54546110
		2014	4.623.427.540.392,67	29,16215744
		2015	3.012.835.058.823,70	28,73390263
2	Kab. Bekasi	2013	8.309.527.686.947,99	29,74842389
		2014	11.945.824.729.008,90	30,11140294
		2015	10.494.816.945.648,90	29,98190263
3	Kab. Ciamis	2013	4.450.143.591.397,51	29,12395748
		2014	3.579.137.338.463,73	28,90614292
		2015	2.528.259.062.417,78	28,55855206
4	Kab. Cianjur	2013	4.376.329.402.066,50	29,10723145
		2014	5.019.727.453.814,68	29,24439676
		2015	4.500.258.865.277,11	29,13515604
5	Kab. Cirebon	2013	3.201.752.187.395,50	28,79471933
		2014	3.881.890.021.889,73	28,98734327
		2015	3.090.145.392.375,51	28,75923926
6	Kab. Garut	2013	3.562.896.905.217,62	28,90159507
		2014	3.966.764.515.560,68	29,00897189
		2015	3.028.846.888.115,10	28,73920310
7	Kab. Karawang	2013	4.814.828.041.005,03	29,20272145
		2014	5.592.497.171.595,24	29,35244702
		2015	4.208.729.756.901,87	29,06818200
8	Kab. Kuningan	2013	3.415.427.999.724,58	28,85932393
		2014	3.401.795.802.666,99	28,85532459
		2015	2.793.537.370.187,00	28,65832978
9	Kab. Majalengka	2013	3.699.212.909.208,81	28,93914119
		2014	4.145.928.277.813,08	29,05314783
		2015	3.812.278.221.542,19	28,96924808
10	Kab. Purwakarta	2013	1.807.442.360.768,41	28,22293390
		2014	2.238.401.002.560,49	28,43678289
		2015	1.971.230.968.666,94	28,30967932
11	Kab. Sukabumi	2013	4.246.049.809.489,82	29,07701021
		2014	4.650.491.921.373,21	29,16799412
		2015	3.407.066.304.622,44	28,85687272
12	Kab. Sumedang	2013	2.586.424.359.513,79	28,58129748
		2014	3.107.278.004.406,45	28,76476822
		2015	2.228.850.997.710,41	28,43250732
13	Kab. Tasikmalaya	2013	3.274.455.774.144,35	28,81717280
		2014	4.287.140.779.583,76	29,08664114

		2015	3.970.224.481.595,01	29,00984375
14	Kota Banjar	2013	1.540.181.128.551,41	28,06292114
		2014	1.719.988.056.191,40	28,17333846
		2015	1.351.756.386.482,91	27,93242589
15	Kota Bekasi	2013	7.082.243.848.883,46	29,58861190
		2014	7.776.755.170.073,43	29,68216029
		2015	8.497.526.233.635,80	29,77079621
16	Kota Bogor	2013	5.438.033.205.130,55	29,32443857
		2014	6.263.429.999.064,93	29,46574907
		2015	6.570.436.063.068,10	29,51360132
17	Kota Cimahi	2013	1.972.931.804.430,40	28,31054178
		2014	2.218.543.225.767,84	28,42787189
		2015	2.105.547.383.558,84	28,37559659
18	Kota Cirebon	2013	2.818.228.815.255,67	28,66712972
		2014	3.373.856.254.013,82	28,84707750
		2015	3.565.733.758.787,34	28,90239097
19	Kota Depok	2013	6.970.086.707.897,48	29,57264878
		2014	8.198.084.298.261,30	29,73492162
		2015	7.311.394.046.453,06	29,62045508
20	Kota Sukabumi	2013	1.557.251.558.894,50	28,07394356
		2014	1.962.304.218.698,00	28,30514052
		2015	1.412.920.429.808,00	27,97667991
21	Kota Tasikmalaya	2013	3.356.331.263.849,20	28,84186961
		2014	3.799.596.475.799,70	28,96591599
		2015	2.879.766.467.961,02	28,68873032
22	Kab. Banjarnegara	2013	2.974.824.342.748,00	28,72120611
		2014	3.172.923.089.317,00	28,78567439
		2015	3.773.105.046.826,50	28,95891940
23	Kab. Banyumas	2013	5.708.723.334.995,13	29,37301653
		2014	4.574.530.489.773,98	29,15152518
		2015	4.996.293.115.180,36	29,23971738
24	Kab. Blora	2013	2.301.203.417.899,10	28,46445333
		2014	2.748.176.930.592,83	28,64195887
		2015	2.200.545.645.446,73	28,41972647
25	Kab. Boyolali	2013	2.568.486.391.950,37	28,57433789
		2014	2.938.810.770.335,75	28,70902612
		2015	2.362.547.346.330,43	28,49076154
26	Kab. Brebes	2013	2.661.305.757.441,57	28,60983800
		2014	3.101.580.047.657,01	28,76293279
		2015	2.504.881.095.295,42	28,54926238
27	Kab. Grobogan	2013	2.354.118.079.503,45	28,48718728

		2014	1.670.771.630.566,07	28,14430669
		2015	2.110.181.560.904,25	28,37779511
28	Kab. Karanganyar	2013	2.516.480.436.376,33	28,55388239
		2014	2.386.386.692.836,31	28,50080149
		2015	2.639.214.244.404,46	28,60150235
29	Kab. Kebumen	2013	3.261.629.442.888,98	28,81324802
		2014	3.058.190.295.412,58	28,74884445
		2015	3.910.364.384.326,75	28,99465168
30	Kab. Kendal	2013	3.033.367.556.685,40	28,74069452
		2014	2.558.670.403.770,84	28,57050887
		2015	3.253.883.143.115,29	28,81087021
31	Kab. Magelang	2013	2.637.938.457.474,59	28,60101884
		2014	2.999.462.420.001,87	28,72945420
		2015	2.889.293.466.866,26	28,69203311
32	Kab. Pati	2013	2.022.087.748.464,76	28,33515163
		2014	1.666.553.040.774,24	28,14177856
		2015	4.058.238.306.203,88	29,03177008
33	Kab. Pekalongan	2013	2.482.582.946.232,74	28,54032064
		2014	2.745.266.615.288,85	28,64089931
		2015	2.176.088.770.013,91	28,40855024
34	Kab. Pemasang	2013	2.703.013.950.812,31	28,62538854
		2014	2.331.851.529.095,79	28,47768372
		2015	2.711.293.161.540,02	28,62844682
35	Kab. Purbalingga	2013	2.122.903.437.509,00	28,38380581
		2014	1.616.399.279.547,08	28,11122212
		2015	1.947.434.687.329,10	28,29753408
36	Kab. Purworejo	2013	2.198.204.188.183,72	28,41866186
		2014	1.737.901.463.258,62	28,18369945
		2015	1.988.247.880.168,82	28,31827490
37	Kab. Rembang	2013	1.720.547.286.999,81	28,17366355
		2014	1.450.840.887.158,30	28,00316443
		2015	1.632.557.326.614,45	28,12116881
38	Kab. Semarang	2013	2.201.929.332.430,74	28,42035506
		2014	2.433.852.296.609,74	28,52049643
		2015	2.614.285.239.519,03	28,59201185
39	Kab. Sragen	2013	2.362.868.977.611,20	28,49089767
		2014	2.684.376.923.429,46	28,61846976
		2015	2.351.849.252.834,83	28,48622305
40	Kab. Tegal	2013	2.540.361.400.343,66	28,56332747
		2014	1.837.393.155.150,11	28,23936892
		2015	2.258.256.911.143,30	28,44561435

41	Kab. Temanggung	2013	1.960.448.677.116,78	28,30419448
		2014	2.186.321.514.985,14	28,41324157
		2015	2.608.342.350.119,60	28,58973602
42	Kab. Wonogiri	2013	3.815.167.723.143,29	28,97000574
		2014	3.289.682.423.460,06	28,82181215
		2015	2.773.957.987.499,53	28,65129629
43	Kab. Wonosobo	2013	2.468.385.322.425,26	28,53458534
		2014	1.461.802.117.395,76	28,01069112
		2015	1.618.325.931.483,77	28,11241336
44	Kota Magelang	2013	2.123.402.967.041,75	28,38404109
		2014	2.457.297.212.068,93	28,53008317
		2015	2.573.083.505.298,98	28,57612610
45	Kota Pekalongan	2013	2.238.972.657.341,62	28,43703824
		2014	1.782.339.791.627,60	28,20894811
		2015	1.893.808.840.396,88	28,26961118
46	Kota Salatiga	2013	1.764.541.562.235,12	28,19891203
		2014	1.579.285.672.765,05	28,08799375
		2015	1.695.025.718.315,05	28,15871903
47	Kota Surakarta	2013	7.095.444.206.531,67	29,59047403
		2014	6.724.390.955.813,17	29,53676247
		2015	7.058.634.910.205,42	29,58527279
48	Kota Tegal	2013	2.002.349.845.219,56	28,32534253
		2014	1.615.611.729.030,34	28,11073478
		2015	1.830.740.165.647,06	28,23574146
49	Kab. Bantul	2013	3.206.001.751.708,65	28,79604572
		2014	3.685.475.372.431,55	28,93542064
		2015	2.335.978.506.550,93	28,47945198
50	Kab. Kulon Progo	2013	1.483.447.764.569,02	28,02539007
		2014	1.727.982.789.886,06	28,17797583
		2015	1.378.179.861.472,25	27,95178480
51	Kab. Sleman	2013	3.766.716.105.470,02	28,95722468
		2014	4.262.999.633.893,27	29,08099417
		2015	3.851.706.294.558,73	28,97953736
52	Kota Yogyakarta	2013	4.280.459.057.193,95	29,08508138
		2014	4.412.321.054.978,00	29,11542198
		2015	2.547.197.509.161,52	28,56601485
53	Kab. Bondowoso	2013	2.219.610.732.850,86	28,42835295
		2014	2.605.551.415.907,37	28,58866544
		2015	1.785.957.236.777,65	28,21097565
54	Kab. Gresik	2013	5.487.252.274.324,01	29,33344875
		2014	6.212.561.878.497,30	29,45759447

		2015	4.744.141.046.271,64	29,18793151
55	Kab. Jember	2013	5.105.740.514.376,42	29,26138661
		2014	5.818.720.847.016,13	29,39210157
		2015	3.594.608.351.252,57	28,91045616
56	Kab. Jombang	2013	4.054.362.995.330,80	29,03081470
		2014	4.525.648.017.776,69	29,14078189
		2015	2.451.264.262.296,02	28,52762503
57	Kab. Lamongan	2013	3.635.719.961.252,90	28,92182827
		2014	4.205.271.867.511,70	29,06736006
		2015	3.336.672.664.119,40	28,83599522
58	Kab. Lumajang	2013	2.283.163.251.763,60	28,45658299
		2014	2.608.309.067.875,62	28,58972326
		2015	2.100.544.617.854,74	28,37321777
59	Kab. Madiun	2013	5.255.838.238.717,44	29,29036062
		2014	5.575.416.729.767,47	29,34938818
		2015	3.659.535.328.306,91	28,92835730
60	Kab. Magetan	2013	2.648.934.954.741,77	28,60517877
		2014	3.065.105.677.703,69	28,75110316
		2015	1.695.462.075.281,58	28,15897643
61	Kab. Malang	2013	5.944.030.513.016,49	29,41340856
		2014	6.776.658.036.415,92	29,54450518
		2015	5.167.826.670.137,41	29,27347334
62	Kab. Ngawi	2013	2.489.546.676.670,13	28,54312175
		2014	2.870.053.422.563,19	28,68535176
		2015	2.534.246.704.367,23	28,56091755
63	Kab. Pacitan	2013	1.548.126.482.775,46	28,06806659
		2014	1.752.626.886.070,77	28,19213686
		2015	1.858.482.700.749,08	28,25078152
64	Kab. Pamekasan	2013	2.530.674.183.567,09	28,55950686
		2014	2.795.158.835.753,36	28,65891005
		2015	2.512.081.247.821,94	28,55213271
65	Kab. Ponorogo	2013	2.715.827.287.723,52	28,63011773
		2014	3.148.789.266.894,24	28,77803914
		2015	2.097.142.822.965,14	28,37159697
66	Kab. Probolinggo	2013	2.558.279.514.435,09	28,57035608
		2014	2.956.899.417.395,39	28,71516234
		2015	2.199.668.062.365,53	28,41932758
67	Kab. Sidoarjo	2013	8.706.645.052.259,99	29,79510765
		2014	9.710.496.819.119,24	29,90422856
		2015	6.777.683.233.928,22	29,54465645
68	Kab. Situbondo	2013	2.062.703.077.628,28	28,35503841

		2014	3.284.174.666.839,44	28,82013649
		2015	2.878.656.196.995,80	28,68834470
69	Kab. Trenggalek	2013	1.927.884.310.770,72	28,28744431
		2014	2.408.143.321.281,48	28,50987716
		2015	1.881.551.491.067,61	28,26311781
70	Kab. Tuban	2013	3.716.653.151.627,63	28,94384469
		2014	4.979.419.367.250,36	29,23633441
		2015	4.465.044.292.476,35	29,12730025
71	Kab. Tulungagung	2013	2.138.130.003.488,16	28,39095273
		2014	2.567.868.858.413,09	28,57409743
		2015	2.271.304.074.849,20	28,45137526
72	Kota Batu	2013	1.192.702.794.835,48	27,80724310
		2014	1.413.897.311.758,25	27,97737106
		2015	1.219.806.981.072,25	27,82971375
73	Kota Blitar	2013	1.897.581.826.867,78	28,27160147
		2014	1.995.428.753.442,04	28,32188006
		2015	2.090.348.165.137,97	28,36835175
74	Kota Madiun	2013	3.091.907.760.094,72	28,75980941
		2014	2.245.986.602.424,20	28,44016601
		2015	1.788.582.503.618,64	28,21244452
75	Kota Mojokerto	2013	1.670.698.403.131,61	28,14426286
		2014	1.899.306.687.095,59	28,27251003
		2015	1.626.988.264.379,60	28,11775173
76	Kota Pasuruan	2013	1.383.352.274.150,99	27,95553085
		2014	1.529.820.915.751,92	28,05617180
		2015	1.935.889.947.619,52	28,29158826
77	Kota Probolinggo	2013	1.610.683.606.364,99	28,10767981
		2014	1.799.999.771.872,66	28,21880765
		2015	1.404.218.057.744,74	27,97050172
78	Kab. Lebak	2013	4.969.300.833.576,53	29,23430027
		2014	5.440.945.638.554,84	29,32497399
		2015	4.163.960.587.666,97	29,05748780
79	Kab. Serang	2013	3.814.583.328.737,78	28,96985256
		2014	4.253.489.426.916,75	29,07876080
		2015	3.575.215.400.732,97	28,90504654
80	Kota Cilegon	2013	2.836.077.189.060,00	28,67344294
		2014	3.295.499.097.423,00	28,82357874
		2015	2.690.927.989.440,00	28,62090723

Sumber: Neraca Pemerintah Daerah 2013-2015 (diolah)

Lampiran III. Hasil Penghitungan Belanja Modal (X2)

No	Pemda	Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	%
1	Kab. Bandung Barat	2013	318.589.528.729	1.680.101.451.150	18,962517
		2014	331.152.301.131	1.749.991.600.972	18,923079
		2015	374.320.053.732	1.877.979.690.810	19,932061
2	Kab. Bekasi	2013	1.078.640.000.532	3.276.762.012.818	32,917862
		2014	1.168.556.174.474	3.574.354.506.932	32,692789
		2015	1.165.153.095.189	3.936.570.734.441	29,598175
3	Kab. Ciamis	2013	391.395.028.710	2.179.423.542.651	17,958649
		2014	349.432.436.497	1.888.642.351.138	18,501779
		2015	492.668.741.850	2.108.466.955.282	23,366206
4	Kab. Cianjur	2013	309.901.421.702	2.152.007.359.077	14,400574
		2014	468.287.520.155	2.585.016.019.357	18,115459
		2015	581.323.220.540	2.688.902.100.238	21,619352
5	Kab. Cirebon	2013	324.170.935.193	2.256.876.527.139	14,363698
		2014	323.301.978.738	2.490.895.300.147	12,979348
		2015	439.768.587.939	2.685.877.830.985	16,373365
6	Kab. Garut	2013	692.368.428.641	2.934.073.591.407	23,597514
		2014	487.453.748.076	3.044.084.138.136	16,013150
		2015	578.732.262.315	3.549.252.715.590	16,305750
7	Kab. Karawang	2013	571.414.149.618	2.762.122.438.446	20,687503
		2014	592.851.397.329	3.151.309.949.764	18,812856
		2015	631.019.911.645	3.614.140.806.168	17,459749
8	Kab. Kuningan	2013	259.869.947.676	1.576.541.981.019	16,483541
		2014	215.610.690.497	1.755.759.048.912	12,280198
		2015	393.510.702.302	2.123.945.312.911	18,527346
9	Kab. Majalengka	2013	385.174.996.026	1.726.776.332.879	22,306015
		2014	529.856.514.373	2.009.725.115.455	26,364626
		2015	672.132.609.304	2.388.706.556.376	28,137931
10	Kab. Purwakarta	2013	231.762.332.172	1.354.385.032.662	17,111997
		2014	330.239.453.173	1.508.999.032.373	21,884670
		2015	357.890.382.874	1.647.070.018.166	21,728911
11	Kab. Sukabumi	2013	392.139.039.436	2.419.989.128.345	16,204165
		2014	422.908.949.167	2.743.154.794.287	15,416882
		2015	508.051.546.242	2.884.849.234.377	17,611026
12	Kab. Sumedang	2013	253.554.444.160	1.640.920.557.120	15,451963
		2014	385.030.215.241	1.990.979.138.203	19,338737
		2015	557.223.725.256	2.226.354.569.008	25,028526
13	Kab. Tasikmalaya	2013	488.363.197.158	2.165.004.333.289	22,557146
		2014	558.496.505.928	2.322.575.709.695	24,046428

		2015	462.706.221.343	2.496.585.381.361	18,533563
14	Kota Banjar	2013	221.351.044.402	646.330.710.092	34,247335
		2014	150.062.123.762	619.940.304.926	24,205899
		2015	194.774.353.115	675.685.000.213	28,826206
15	Kota Bekasi	2013	888.422.432.910	2.959.889.954.879	30,015387
		2014	719.478.321.954	3.106.897.522.995	23,157453
		2015	1.249.954.669.378	3.881.179.278.034	32,205538
16	Kota Bogor	2013	224.308.059.020	1.421.277.460.779	15,782144
		2014	499.335.882.425	1.702.962.476.448	29,321602
		2015	440.919.551.227	1.862.982.871.234	23,667397
17	Kota Cimahi	2013	120.732.964.467	922.343.621.547	13,089803
		2014	151.446.501.358	1.042.608.970.972	14,525724
		2015	180.783.092.416	1.074.961.450.668	16,817635
18	Kota Cirebon	2013	169.462.451.965	975.249.676.763	17,376315
		2014	235.233.597.636	1.194.448.622.457	19,693907
		2015	264.561.671.148	1.354.729.318.775	19,528748
19	Kota Depok	2013	655.386.101.838	1.883.224.062.228	34,801281
		2014	582.004.462.577	2.011.328.640.125	28,936319
		2015	615.731.792.480	2.178.595.019.630	28,262793
20	Kota Sukabumi	2013	115.523.193.175	838.405.936.902	13,778909
		2014	116.080.255.515	917.115.741.592	12,657100
		2015	166.212.543.933	1.057.842.417.761	15,712411
21	Kota Tasikmalaya	2013	261.383.222.345	1.311.030.641.333	19,937232
		2014	276.775.401.438	1.455.177.086.903	19,020049
		2015	319.080.079.445	1.533.247.452.660	20,810736
22	Kab. Banjarnegara	2013	175.918.010.287	1.175.474.028.855	14,965708
		2014	206.495.161.626	1.349.769.030.982	15,298555
		2015	329.811.474.920	1.612.219.383.363	20,456985
23	Kab. Banyumas	2013	313.188.975.057	1.949.283.226.539	16,066879
		2014	360.164.898.641	2.212.822.513.238	16,276267
		2015	362.744.753.623	2.228.787.114.694	16,275433
24	Kab. Blora	2013	260.455.399.862	1.318.484.054.214	19,754156
		2014	335.136.756.246	1.468.208.051.148	22,826244
		2015	326.177.548.362	1.666.767.939.618	19,569464
25	Kab. Boyolali	2013	303.852.817.878	1.617.991.646.314	18,779628
		2014	303.852.817.878	1.537.318.103.664	19,765123
		2015	310.174.365.196	1.647.423.248.301	18,827849
26	Kab. Brebes	2013	325.840.766.312	1.661.266.202.697	19,614001
		2014	282.972.400.128	1.967.168.957.601	14,384753
		2015	469.584.321.351	2.392.376.921.588	19,628359
27	Kab. Grobogan	2013	353.074.204.294	1.505.508.782.417	23,452152

		2014	300.522.182.667	1.645.804.824.542	18,259892
		2015	294.527.977.085	1.752.438.812.621	16,806748
28	Kab. Karanganyar	2013	148.478.744.026	1.287.163.763.904	11,535342
		2014	223.287.900.900	1.543.887.294.095	14,462707
		2015	241.652.801.331	1.648.862.279.623	14,655730
29	Kab. Kebumen	2013	286.958.914.202	1.548.176.706.140	18,535282
		2014	465.778.357.808	1.825.308.649.911	25,517786
		2015	468.153.450.416	2.033.106.110.205	23,026513
30	Kab. Kendal	2013	155.398.900.968	1.270.620.865.836	12,230155
		2014	251.586.075.722	1.414.346.670.683	17,788148
		2015	282.090.070.438	1.692.434.768.232	16,667707
31	Kab. Magelang	2013	108.603.624.493	1.258.155.351.177	8,631973
		2014	319.022.187.365	1.655.080.222.422	19,275331
		2015	253.851.809.161	1.732.185.946.665	14,654998
32	Kab. Pati	2013	203.474.443.723	1.649.489.124.478	12,335604
		2014	224.653.195.934	1.763.048.605.644	12,742314
		2015	279.135.035.536	1.834.833.717.380	15,213097
33	Kab. Pekalongan	2013	184.320.225.104	1.223.169.683.250	15,069064
		2014	187.872.466.874	1.352.531.845.321	13,890428
		2015	190.291.494.232	1.431.813.954.915	13,290239
34	Kab. Pemasang	2013	249.976.019.799	1.477.106.031.341	16,923363
		2014	164.388.705.445	1.532.610.618.183	10,726058
		2015	267.766.979.163	1.777.978.292.423	15,060194
35	Kab. Purbalingga	2013	112.767.369.781	1.126.557.032.701	10,009912
		2014	112.249.667.286	1.220.009.161.392	9,200723
		2015	170.645.780.046	1.298.154.429.988	13,145260
36	Kab. Purworejo	2013	180.854.184.775	1.154.349.996.704	15,667188
		2014	216.762.938.712	1.359.058.301.172	15,949495
		2015	252.290.086.056	1.558.324.821.942	16,189827
37	Kab. Rembang	2013	135.447.797.344	1.060.648.437.288	12,770282
		2014	151.454.913.762	1.275.908.646.560	11,870357
		2015	51.980.727.019	1.049.597.949.568	4,952442
38	Kab. Semarang	2013	227.584.378.658	1.282.695.221.162	17,742670
		2014	272.265.415.043	1.451.522.682.358	18,757228
		2015	229.910.573.491	1.506.067.617.740	15,265621
39	Kab. Sragen	2013	141.263.725.821	1.408.595.385.453	10,028694
		2014	267.219.055.054	1.711.440.239.171	15,613695
		2015	324.140.892.998	1.896.201.082.906	17,094226
40	Kab. Tegal	2013	215.975.068.911	1.531.862.423.082	14,098855
		2014	226.087.648.919	1.714.883.146.223	13,183852
		2015	255.207.688.302	1.934.297.115.658	13,193820

41	Kab. Temanggung	2013	103.805.509.274	950.367.588.673	10,922669
		2014	198.451.766.079	1.170.880.302.872	16,948937
		2015	320.338.494.109	1.505.003.745.055	21,284897
42	Kab. Wonogiri	2013	192.048.802.286	1.424.756.991.272	13,479408
		2014	223.887.556.535	1.617.624.179.799	13,840517
		2015	311.990.827.171	1.877.830.219.839	16,614432
43	Kab. Wonosobo	2013	138.195.097.852	988.103.772.409	13,985889
		2014	206.098.010.151	1.220.323.640.367	16,888799
		2015	257.421.064.913	1.494.447.291.802	17,225169
44	Kota Magelang	2013	142.588.509.967	630.850.717.357	22,602576
		2014	127.624.029.216	681.723.820.007	18,720782
		2015	141.308.934.005	736.340.437.750	19,190707
45	Kota Pekalongan	2013	131.315.591.230	664.175.351.720	19,771223
		2014	159.183.156.133	736.794.861.264	21,604814
		2015	157.668.840.341	792.543.896.689	19,894020
46	Kota Salatiga	2013	69.203.906.339	529.237.634.485	13,076150
		2014	120.272.968.726	645.787.982.695	18,624219
		2015	107.149.176.492	673.865.039.498	15,900688
47	Kota Surakarta	2013	244.975.523.723	1.375.304.857.300	17,812452
		2014	286.491.756.994	1.479.827.902.467	19,359802
		2015	235.829.590.702	1.532.527.097.064	15,388282
48	Kota Tegal	2013	100.804.456.696	673.040.144.370	14,977481
		2014	115.598.831.594	783.099.149.188	14,761711
		2015	207.499.062.149	959.420.548.451	21,627540
49	Kab. Bantul	2013	183.269.840.475	1.387.719.170.740	13,206551
		2014	310.415.290.766	1.700.351.278.810	18,255951
		2015	334.880.395.261	1.933.302.495.457	17,321676
50	Kab. Kulon Progo	2013	123.313.526.117	964.587.545.893	12,784068
		2014	146.576.953.515	1.057.963.273.574	13,854635
		2015	226.055.713.904	1.243.069.952.899	18,185277
51	Kab. Sleman	2013	206.859.865.136	1.693.528.297.006	12,214727
		2014	282.862.049.259	1.826.460.106.503	15,486900
		2015	426.782.827.409	2.328.751.919.925	18,326676
52	Kota Yogyakarta	2013	167.079.742.204	1.232.911.934.134	13,551636
		2014	193.078.279.594	1.336.610.467.868	14,445366
		2015	256.395.156.433	1.539.699.344.285	16,652287
53	Kab. Bondowoso	2013	251.144.647.576	1.266.305.195.495	19,832869
		2014	311.495.490.129	1.471.104.168.998	21,174265
		2015	404.576.533.409	1.776.098.167.403	22,778951
54	Kab. Gresik	2013	417.766.098.409	1.897.270.106.456	22,019326
		2014	523.804.897.182	2.172.185.453.744	24,114189

		2015	584.223.675.905	2.529.213.281.777	23,099028
55	Kab. Jember	2013	478.577.397.312	2.347.242.519.489	20,388920
		2014	537.521.256.029	2.695.090.195.605	19,944463
		2015	556.408.885.143	3.083.637.991.191	18,043911
56	Kab. Jombang	2013	216.972.911.919	1.559.047.056.627	13,917021
		2014	355.049.118.263	1.706.370.932.653	20,807265
		2015	403.219.792.974	2.164.953.026.633	18,624875
57	Kab. Kediri	2013	292.282.260.615	1.595.444.481.821	18,319801
		2014	325.197.091.568	1.826.897.145.025	17,800515
		2015	457.787.623.448	2.274.442.061.439	20,127469
58	Kab. Lamongan	2013	240.071.772.482	1.604.225.143.820	14,964968
		2014	353.435.615.278	1.911.179.319.921	18,493064
		2015	459.305.792.650	2.407.389.245.871	19,079000
59	Kab. Lumajang	2013	163.055.838.729	1.237.250.864.103	13,178883
		2014	236.756.736.151	1.472.595.339.059	16,077515
		2015	242.225.159.241	1.660.465.122.739	14,587790
60	Kab. Madiun	2013	185.514.724.351	1.140.996.797.668	16,259005
		2014	239.470.373.397	1.313.183.118.403	18,235871
		2015	327.742.397.091	1.581.057.648.337	20,729314
61	Kab. Magetan	2013	131.065.762.797	1.136.484.303.509	11,532563
		2014	190.932.555.694	1.321.682.295.906	14,446176
		2015	239.657.455.207	1.589.421.037.874	15,078286
62	Kab. Malang	2013	436.501.502.528	2.322.862.598.075	18,791533
		2014	501.503.673.434	2.749.971.318.846	18,236687
		2015	714.192.895.223	3.538.236.408.629	20,184996
63	Kab. Ngawi	2013	189.236.101.557	1.353.881.705.143	13,977300
		2014	243.988.354.559	1.518.827.492.936	16,064257
		2015	313.226.242.409	1.836.690.671.905	17,053837
64	Kab. Pacitan	2013	132.854.725.599	1.036.980.098.890	12,811695
		2014	200.429.181.165	1.202.651.576.766	16,665607
		2015	268.151.647.437	1.408.458.278.765	19,038665
65	Kab. Pamekasan	2013	146.091.858.518	1.165.791.677.040	12,531558
		2014	240.818.085.179	1.383.026.462.476	17,412399
		2015	447.685.501.909	1.751.155.310.592	25,565151
66	Kab. Ponorogo	2013	110.848.141.315	1.395.545.015.934	7,943000
		2014	176.983.715.062	1.624.975.126.096	10,891472
		2015	324.169.328.852	1.894.974.865.711	17,106788
67	Kab. Probolinggo	2013	211.259.728.570	1.329.410.577.152	15,891233
		2014	219.199.470.248	1.524.038.393.412	14,382805
		2015	343.189.339.904	1.879.876.712.132	18,255949
68	Kab. Sidoarjo	2013	518.682.837.520	2.527.542.286.127	20,521233

		2014	691.163.487.699	2.853.419.135.831	24,222291
		2015	936.192.614.541	3.662.799.265.945	25,559485
69	Kab. Situbondo	2013	264.570.994.896	1.150.103.067.653	23,004112
		2014	325.053.037.623	1.305.647.017.406	24,895935
		2015	340.683.173.357	1.480.028.872.079	23,018684
70	Kab. Trenggalek	2013	206.760.394.222	1.161.539.043.719	17,800555
		2014	280.962.369.854	1.365.575.905.809	20,574643
		2015	327.136.709.459	1.552.970.281.991	21,065227
71	Kab. Tuban	2013	267.152.793.943	1.489.827.940.912	17,931788
		2014	362.402.236.927	1.689.069.984.372	21,455727
		2015	386.655.657.749	1.998.111.557.092	19,351055
72	Kab. Tulungagung	2013	153.095.137.771	1.612.796.984.483	9,492524
		2014	315.546.166.050	1.967.387.289.454	16,038843
		2015	444.587.079.517	2.317.348.435.617	19,185163
73	Kota Batu	2013	155.842.580.700	551.750.308.109	28,245128
		2014	136.626.885.534	612.859.578.584	22,293343
		2015	281.882.302.047	819.751.076.487	34,386329
74	Kota Madiun	2013	180.111.320.995	775.087.201.814	23,237556
		2014	201.533.941.749	853.473.318.174	23,613385
		2015	182.413.227.390	877.219.888.409	20,794470
75	Kota Mojokerto	2013	67.646.320.365	511.091.545.446	13,235656
		2014	141.591.947.931	631.979.414.510	22,404519
		2015	135.968.848.097	706.783.751.689	19,237687
76	Kota Pasuruan	2013	78.111.929.389	552.338.988.277	14,142027
		2014	108.978.646.061	637.201.523.936	17,102697
		2015	159.178.160.741	740.796.890.630	21,487423
77	Kota Probolinggo	2013	68.161.679.883	655.932.038.460	10,391577
		2014	106.923.357.839	778.254.103.608	13,738875
		2015	74.291.701.183	731.680.260.277	10,153575
78	Kab. Lebak	2013	357.008.796.915	1.514.838.642.901	23,567447
		2014	395.207.514.996	1.697.760.636.892	23,278165
		2015	464.213.655.293	2.092.695.058.672	22,182575
79	Kab. Serang	2013	382.931.103.844	1.706.378.016.007	22,441165
		2014	356.764.744.910	1.909.367.171.714	18,684973
		2015	414.261.378.033	2.342.220.890.626	17,686691
80	Kota Cilegon	2013	206.273.890.562	1.002.109.782.540	20,583961
		2014	317.544.837.119	1.222.804.814.553	25,968563
		2015	373.027.108.025	1.464.005.370.994	25,479900

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah 2013-2015 (diolah)

Lampiran IV. Hasil Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (X3)

No	Pemda	Tahun	PDRB1	PDRB0	%
1	Kab. Bandung Barat	2013	22.937.000.000.000	21.652.000.000.000	5,9347866
		2014	24.261.000.000.000	22.937.000.000.000	5,7723329
		2015	25.477.000.000.000	24.261.000.000.000	5,0121594
2	Kab. Bekasi	2013	186.207.000.000.000	175.280.000.000.000	6,2340256
		2014	197.159.000.000.000	186.207.000.000.000	5,8816264
		2015	205.596.000.000.000	197.159.000.000.000	4,2792873
3	Kab. Ciamis	2013	16.027.000.000.000	15.214.000.000.000	5,3437623
		2014	16.839.000.000.000	16.027.000.000.000	5,0664504
		2015	17.780.000.000.000	16.839.000.000.000	5,5882178
4	Kab. Cianjur	2013	22.883.000.000.000	21.817.000.000.000	4,8860980
		2014	24.042.000.000.000	22.883.000.000.000	5,0648953
		2015	25.355.000.000.000	24.042.000.000.000	5,4612761
5	Kab. Cirebon	2013	25.042.000.000.000	23.858.000.000.000	4,9626960
		2014	26.312.000.000.000	25.042.000.000.000	5,0714799
		2015	27.594.000.000.000	26.312.000.000.000	4,8723016
6	Kab. Garut	2013	29.138.000.000.000	27.815.000.000.000	4,7564264
		2014	30.541.000.000.000	29.138.000.000.000	4,8150182
		2015	31.918.000.000.000	30.541.000.000.000	4,5086932
7	Kab. Karawang	2013	120.295.000.000.000	111.424.000.000.000	7,9614805
		2014	126.749.000.000.000	120.295.000.000.000	5,3651440
		2015	132.446.000.000.000	126.749.000.000.000	4,4947100
8	Kab. Kuningan	2013	11.649.000.000.000	10.963.000.000.000	6,2574113
		2014	12.385.000.000.000	11.649.000.000.000	6,3181389
		2015	13.175.000.000.000	12.385.000.000.000	6,3786839
9	Kab. Majalengka	2013	15.013.000.000.000	14.307.000.000.000	4,9346474
		2014	15.750.000.000.000	15.013.000.000.000	4,9090788
		2015	16.590.000.000.000	15.750.000.000.000	5,3333333
10	Kab. Purwakarta	2013	34.216.000.000.000	31.934.000.000.000	7,1459886
		2014	36.173.000.000.000	34.216.000.000.000	5,7195464
		2015	37.892.000.000.000	36.173.000.000.000	4,7521632
11	Kab. Sukabumi	2013	33.517.000.000.000	31.768.000.000.000	5,5055402
		2014	35.521.000.000.000	33.517.000.000.000	5,9790554
		2015	37.264.000.000.000	35.521.000.000.000	4,9069564
12	Kab. Sumedang	2013	17.195.000.000.000	16.401.000.000.000	4,8411682
		2014	18.003.000.000.000	17.195.000.000.000	4,6990404
		2015	37.264.000.000.000	35.521.000.000.000	4,9069564
13	Kab. Tasikmalaya	2013	17.991.000.000.000	17.192.000.000.000	4,6475105

		2014	18.852.000.000.000	17.991.000.000.000	4,7857262
		2015	18.945.000.000.000	18.003.000.000.000	5,2324613
14	Kota Banjar	2013	2.374.000.000.000	2.251.000.000.000	5,4642381
		2014	2.492.000.000.000	2.374.000.000.000	4,9705139
		2015	2.624.000.000.000	2.492.000.000.000	5,2969502
15	Kota Bekasi	2013	49.741.000.000.000	46.907.000.000.000	6,0417422
		2014	52.534.000.000.000	49.741.000.000.000	5,6150861
		2015	55.463.000.000.000	52.534.000.000.000	5,5754369
16	Kota Bogor	2013	22.485.000.000.000	21.204.000.000.000	6,0413130
		2014	23.835.000.000.000	22.485.000.000.000	6,0040027
		2015	25.296.000.000.000	23.835.000.000.000	6,1296413
17	Kota Cimahi	2013	16.072.000.000.000	15.212.000.000.000	5,6534315
		2014	16.955.000.000.000	16.072.000.000.000	5,4940269
		2015	17.876.000.000.000	16.955.000.000.000	5,4320260
18	Kota Cirebon	2013	11.864.000.000.000	11.309.000.000.000	4,9075957
		2014	12.541.000.000.000	11.864.000.000.000	5,7063385
		2015	13.268.000.000.000	12.541.000.000.000	5,7969859
19	Kota Depok	2013	32.806.000.000.000	30.703.000.000.000	6,8494935
		2014	35.193.000.000.000	32.806.000.000.000	7,2761080
		2015	37.525.000.000.000	35.193.000.000.000	6,6263177
20	Kota Sukabumi	2013	6.302.000.000.000	5.978.000.000.000	5,4198729
		2014	6.644.000.000.000	6.302.000.000.000	5,4268486
		2015	6.983.000.000.000	6.644.000.000.000	5,1023480
21	Kota Tasikmalaya	2013	10.962.000.000.000	10.325.000.000.000	6,1694915
		2014	11.637.000.000.000	10.962.000.000.000	6,1576355
		2015	12.370.000.000.000	11.637.000.000.000	6,2988743
22	Kab. Banjarnegara	2013	11.043.000.000.000	10.473.000.000.000	5,4425666
		2014	11.625.000.000.000	11.043.000.000.000	5,2703070
		2015	12.262.000.000.000	11.625.000.000.000	5,4795699
23	Kab. Banyumas	2013	27.793.000.000.000	25.982.000.000.000	6,9702101
		2014	29.368.000.000.000	27.793.000.000.000	5,6668945
		2015	12.262.000.000.000	11.625.000.000.000	5,4795699
24	Kab. Blora	2013	11.713.000.000.000	11.177.000.000.000	4,7955623
		2014	12.227.000.000.000	11.713.000.000.000	4,3882865
		2015	12.883.000.000.000	12.227.000.000.000	5,3651754
25	Kab. Boyolali	2013	16.266.000.000.000	15.370.000.000.000	5,8295381
		2014	17.147.000.000.000	16.266.000.000.000	5,4162056
		2015	18.190.000.000.000	17.147.000.000.000	6,0826967
26	Kab. Brebes	2013	23.812.000.000.000	22.482.000.000.000	5,9158438
		2014	25.073.000.000.000	23.812.000.000.000	5,2956493
		2015	26.571.000.000.000	25.073.000.000.000	5,9745543

27	Kab. Grobogan	2013	14.475.000.000.000	13.842.000.000.000	4,5730386
		2014	15.064.000.000.000	14.475.000.000.000	4,0690846
		2015	15.963.000.000.000	15.064.000.000.000	5,9678704
28	Kab. Karanganyar	2013	19.257.000.000.000	18.219.000.000.000	5,6973489
		2014	20.262.000.000.000	19.257.000.000.000	5,2188814
		2015	21.285.000.000.000	20.262.000.000.000	5,0488599
29	Kab. Kebumen	2013	14.333.000.000.000	13.707.000.000.000	4,5670096
		2014	15.164.000.000.000	14.333.000.000.000	5,7978093
		2015	16.118.000.000.000	15.164.000.000.000	6,2912160
30	Kab. Kendal	2013	22.386.000.000.000	21.076.000.000.000	6,2156007
		2014	23.544.000.000.000	22.386.000.000.000	5,1728759
		2015	24.761.000.000.000	23.544.000.000.000	5,1690452
31	Kab. Magelang	2013	17.021.000.000.000	16.071.000.000.000	5,9112687
		2014	17.851.000.000.000	17.021.000.000.000	4,8763292
		2015	18.806.000.000.000	17.851.000.000.000	5,3498403
32	Kab. Pati	2013	22.330.000.000.000	21.072.000.000.000	5,9700076
		2014	23.364.000.000.000	22.330.000.000.000	4,6305419
		2015	24.760.000.000.000	23.364.000.000.000	5,9750043
33	Kab. Pekalongan	2013	12.305.000.000.000	11.355.000.000.000	8,3663584
		2014	12.630.000.000.000	12.305.000.000.000	2,6412028
		2015	13.234.000.000.000	12.630.000.000.000	4,7822644
34	Kab. Pemasang	2013	13.172.000.000.000	12.477.000.000.000	5,5702493
		2014	13.900.000.000.000	13.172.000.000.000	5,5268752
		2015	14.655.000.000.000	13.900.000.000.000	5,4316547
35	Kab. Purbalingga	2013	12.778.000.000.000	12.138.000.000.000	5,2726973
		2014	13.527.000.000.000	12.778.000.000.000	5,8616372
		2015	14.256.000.000.000	13.527.000.000.000	5,3892216
36	Kab. Purworejo	2013	9.871.000.000.000	9.406.000.000.000	4,9436530
		2014	10.314.000.000.000	9.871.000.000.000	4,4878938
		2015	10.842.000.000.000	10.314.000.000.000	5,1192554
37	Kab. Rembang	2013	9.781.000.000.000	9.277.000.000.000	5,4327908
		2014	10.284.000.000.000	9.781.000.000.000	5,1426235
		2015	10.848.000.000.000	10.284.000.000.000	5,4842474
38	Kab. Semarang	2013	25.758.000.000.000	24.307.000.000.000	5,9694738
		2014	27.263.000.000.000	25.758.000.000.000	5,8428449
		2015	28.743.000.000.000	27.263.000.000.000	5,4286029
39	Kab. Sragen	2013	19.102.000.000.000	17.902.000.000.000	6,7031617
		2014	20.169.000.000.000	19.102.000.000.000	5,5858025
		2015	21.388.000.000.000	20.169.000.000.000	6,0439288
40	Kab. Tegal	2013	18.050.000.000.000	16.912.000.000.000	6,7289499
		2014	18.958.000.000.000	18.050.000.000.000	5,0304709

		2015	19.991.000.000.000	18.958.000.000.000	5,4488870
41	Kab. Temanggung	2013	11.299.000.000.000	10.741.000.000.000	5,1950470
		2014	11.871.000.000.000	11.299.000.000.000	5,0623949
		2015	12.484.000.000.000	11.871.000.000.000	5,1638447
42	Kab. Wonogiri	2013	15.303.000.000.000	14.605.000.000.000	4,7791852
		2014	16.115.000.000.000	15.303.000.000.000	5,3061491
		2015	16.975.000.000.000	16.115.000.000.000	5,3366429
43	Kab. Wonosobo	2013	10.334.000.000.000	9.936.000.000.000	4,0056361
		2014	10.839.000.000.000	10.334.000.000.000	4,8867815
		2015	11.395.000.000.000	10.839.000.000.000	5,1296245
44	Kota Magelang	2013	4.755.000.000.000	4.484.000.000.000	6,0437110
		2014	4.988.000.000.000	4.755.000.000.000	4,9001052
		2015	5.241.000.000.000	4.988.000.000.000	5,0721732
45	Kota Pekalongan	2013	5.456.000.000.000	5.152.000.000.000	5,9006211
		2014	5.755.000.000.000	5.456.000.000.000	5,4802053
		2015	6.043.000.000.000	5.755.000.000.000	5,0043440
46	Kota Salatiga	2013	6.989.000.000.000	6.575.000.000.000	6,2965779
		2014	7.376.000.000.000	6.989.000.000.000	5,5372729
		2015	7.756.000.000.000	7.376.000.000.000	5,1518438
47	Kota Surakarta	2013	25.632.000.000.000	24.124.000.000.000	6,2510363
		2014	26.984.000.000.000	25.632.000.000.000	5,2746567
		2015	28.453.000.000.000	26.984.000.000.000	5,4439668
48	Kota Tegal	2013	8.084.000.000.000	7.650.000.000.000	5,6732026
		2014	8.491.000.000.000	8.084.000.000.000	5,0346363
		2015	8.952.000.000.000	8.491.000.000.000	5,4292781
49	Kab. Bantul	2013	14.139.000.000.000	13.407.000.000.000	5,4598344
		2014	14.867.000.000.000	14.139.000.000.000	5,1488790
		2015	15.611.000.000.000	14.867.000.000.000	5,0043721
50	Kab. Kulon Progo	2013	5.742.000.000.000	5.475.000.000.000	4,8767123
		2014	6.003.000.000.000	5.742.000.000.000	4,5454545
		2015	6.282.000.000.000	6.003.000.000.000	4,6476762
51	Kab. Sleman	2013	25.367.000.000.000	23.957.000.000.000	5,8855449
		2014	26.741.000.000.000	25.367.000.000.000	5,4164860
		2015	28.160.000.000.000	26.741.000.000.000	5,3064582
52	Kota Yogyakarta	2013	20.240.000.000.000	19.189.000.000.000	5,4770963
		2014	21.312.000.000.000	20.240.000.000.000	5,2964427
		2015	22.412.000.000.000	21.312.000.000.000	5,1614114
53	Kab. Bondowoso	2013	10.140.000.000.000	9.583.000.000.000	5,8123761
		2014	10.652.000.000.000	10.140.000.000.000	5,0493097
		2015	11.179.000.000.000	10.652.000.000.000	4,9474277

54	Kab. Gresik	2013	71.314.000.000.000	67.249.000.000.000	6,0446995
		2014	76.337.000.000.000	71.314.000.000.000	7,0434978
		2015	81.359.000.000.000	76.337.000.000.000	6,5787233
55	Kab. Jember	2013	39.519.000.000.000	37.262.000.000.000	6,0571091
		2014	41.969.000.000.000	39.519.000.000.000	6,1995496
		2015	44.204.000.000.000	41.969.000.000.000	5,3253592
56	Kab. Jombang	2013	20.672.000.000.000	19.515.000.000.000	5,9287727
		2014	21.793.000.000.000	20.672.000.000.000	5,4227941
		2015	22.960.000.000.000	21.793.000.000.000	5,3549305
57	Kab. Kediri	2013	21.733.000.000.000	20.538.000.000.000	5,8184828
		2014	22.889.000.000.000	21.733.000.000.000	5,3191000
		2015	24.005.000.000.000	22.889.000.000.000	4,8757045
58	Kab. Lamongan	2013	19.849.000.000.000	18.563.000.000.000	6,9277595
		2014	21.100.000.000.000	19.849.000.000.000	6,3025845
		2015	22.317.000.000.000	21.100.000.000.000	5,7677725
59	Kab. Lumajang	2013	16.950.000.000.000	16.053.000.000.000	5,5877406
		2014	17.852.000.000.000	16.950.000.000.000	5,3215339
		2015	18.678.000.000.000	17.852.000.000.000	4,6269326
60	Kab. Madiun	2013	9.654.000.000.000	9.136.000.000.000	5,6698774
		2014	10.170.000.000.000	9.654.000.000.000	5,3449347
		2015	10.705.000.000.000	10.170.000.000.000	5,2605703
61	Kab. Magetan	2013	9.793.000.000.000	9.251.000.000.000	5,8588261
		2014	10.292.000.000.000	9.793.000.000.000	5,0954764
		2015	10.824.000.000.000	10.292.000.000.000	5,1690634
62	Kab. Malang	2013	49.572.000.000.000	47.076.000.000.000	5,3020647
		2014	52.550.000.000.000	49.572.000.000.000	6,0074235
		2015	55.316.000.000.000	52.550.000.000.000	5,2635585
63	Kab. Ngawi	2013	10.094.000.000.000	9.568.000.000.000	5,4974916
		2014	10.681.000.000.000	10.094.000.000.000	5,8153358
		2015	11.224.000.000.000	10.681.000.000.000	5,0837937
64	Kab. Pacitan	2013	8.158.000.000.000	7.705.000.000.000	5,8792992
		2014	8.582.000.000.000	8.158.000.000.000	5,1973523
		2015	9.020.000.000.000	8.582.000.000.000	5,1037054
65	Kab. Pamekasan	2013	8.375.000.000.000	7.894.000.000.000	6,0932354
		2014	8.846.000.000.000	8.375.000.000.000	5,6238806
		2015	9.317.000.000.000	8.846.000.000.000	5,3244404
66	Kab. Ponorogo	2013	10.554.000.000.000	10.038.000.000.000	5,1404662
		2014	11.104.000.000.000	10.554.000.000.000	5,2112943
		2015	11.686.000.000.000	11.104.000.000.000	5,2413545
67	Kab. Probolinggo	2013	17.809.000.000.000	16.937.000.000.000	5,1484915
		2014	18.681.000.000.000	17.809.000.000.000	4,8964007

		2015	19.570.000.000.000	18.681.000.000.000	4,7588459
68	Kab. Sidoarjo	2013	99.993.000.000.000	93.544.000.000.000	6,8940819
		2014	106.435.000.000.000	99.993.000.000.000	6,4424510
		2015	112.012.000.000.000	106.435.000.000.000	5,2398177
69	Kab. Situbondo	2013	9.994.000.000.000	9.412.000.000.000	6,1835954
		2014	10.572.000.000.000	9.994.000.000.000	5,7834701
		2015	11.086.000.000.000	10.572.000.000.000	4,8618994
70	Kab. Trenggalek	2013	9.497.000.000.000	8.959.000.000.000	6,0051345
		2014	9.998.000.000.000	9.497.000.000.000	5,2753501
		2015	10.501.000.000.000	9.998.000.000.000	5,0310062
71	Kab. Tuban	2013	33.679.000.000.000	31.816.000.000.000	5,8555444
		2014	35.519.000.000.000	33.679.000.000.000	5,4633451
		2015	37.255.000.000.000	35.519.000.000.000	4,8875250
72	Kab. Tulungagung	2013	20.164.000.000.000	18.999.000.000.000	6,1319017
		2014	21.265.000.000.000	20.164.000.000.000	5,4602261
		2015	22.327.000.000.000	21.265.000.000.000	4,9941218
73	Kota Batu	2013	8.019.000.000.000	7.474.000.000.000	7,2919454
		2014	8.572.000.000.000	8.019.000.000.000	6,8961217
		2015	9.146.000.000.000	8.572.000.000.000	6,6962203
74	Kota Madiun	2013	7.471.000.000.000	6.938.000.000.000	7,6823292
		2014	7.966.000.000.000	7.471.000.000.000	6,6256191
		2015	8.455.000.000.000	7.966.000.000.000	6,1385890
75	Kota Mojokerto	2013	3.567.000.000.000	3.358.000.000.000	6,2239428
		2014	3.775.000.000.000	3.567.000.000.000	5,8312307
		2015	3.991.000.000.000	3.775.000.000.000	5,7218543
76	Kota Pasuruan	2013	4.315.000.000.000	4.051.000.000.000	6,5169094
		2014	4.561.000.000.000	4.315.000.000.000	5,7010429
		2015	4.813.000.000.000	4.561.000.000.000	5,5251041
77	Kota Probolinggo	2013	5.911.000.000.000	5.552.000.000.000	6,4661383
		2014	6.262.000.000.000	5.911.000.000.000	5,9380815
		2015	6.629.000.000.000	6.262.000.000.000	5,8607474
78	Kab. Lebak	2013	14.888.000.000.000	14.006.000.000.000	6,2973012
		2014	15.787.000.000.000	14.888.000.000.000	6,0384202
		2015	16.722.000.000.000	15.787.000.000.000	5,9225945
79	Kab. Serang	2013	40.137.000.000.000	37.850.000.000.000	6,0422721
		2014	42.541.000.000.000	40.137.000.000.000	5,9894860
		2015	44.729.000.000.000	42.541.000.000.000	5,1432735
80	Kota Cilegon	2013	54.733.000.000.000	51.300.000.000.000	6,6920078
		2014	57.433.000.000.000	54.733.000.000.000	4,9330386
		2015	60.193.000.000.000	57.433.000.000.000	4,8055996

Sumber: Laporan PDRB Badan Pusat Statistik 2013-2015 (diolah)

Lampiran V. Hasil Penghitungan Pendapatan Asli Daerah (X4)

Pemda	Tahun	PAD	Total Pendapatan	%
Kab. Bandung Barat	2013	187.170.467.143	1.671.362.339.915	11,199
	2014	248.697.185.723	1.911.843.587.107	13,008
	2015	314.621.268.983	2.154.209.101.626	14,605
Kab. Bekasi	2013	1.154.525.309.151	3.363.441.159.067	34,326
	2014	1.547.787.549.382	3.924.316.667.938	39,441
	2015	1.843.836.910.285	4.522.879.992.990	40,767
Kab. Ciamis	2013	117.475.935.245	2.196.493.936.848	5,348
	2014	182.320.228.014	2.005.675.846.801	9,090
	2015	180.304.950.790	2.292.554.400.814	7,865
Kab. Cianjur	2013	266.100.616.612	2.247.859.248.345	11,838
	2014	411.538.567.543	2.628.333.894.106	15,658
	2015	454.627.908.742	3.114.043.188.214	14,599
Kab. Cirebon	2013	250.848.893.157	2.316.011.665.105	10,831
	2014	452.870.109.028	2.733.579.597.223	16,567
	2015	478.690.101.565	3.161.706.817.061	15,140
Kab. Garut	2013	240.631.630.078	2.741.528.022.330	8,777
	2014	373.261.713.306	3.150.458.860.769	11,848
	2015	419.201.758.615	3.540.619.065.782	11,840
Kab. Karawang	2013	660.841.119.615	2.691.829.177.177	24,550
	2014	909.158.490.944	3.198.292.288.528	28,426
	2015	1.056.535.776.486	3.628.718.508.162	29,116
Kab. Kuningan	2013	112.517.242.678	1.625.738.990.778	6,921
	2014	203.022.596.133	1.897.340.119.754	10,700
	2015	229.170.387.972	2.373.001.450.080	9,657
Kab. Majalengka	2013	142.505.677.495	1.791.764.985.114	7,953
	2014	223.120.890.621	2.057.001.723.549	10,847
	2015	283.735.793.231	2.493.539.229.256	11,379
Kab. Purwakarta	2013	173.764.159.823	1.371.139.969.587	12,673
	2014	293.833.261.345	1.599.303.021.481	18,373
	2015	331.073.426.247	1.759.356.611.741	18,818
Kab. Sukabumi	2013	273.452.383.011	2.408.355.096.103	11,354
	2014	457.059.973.435	2.942.653.333.980	15,532
	2015	509.484.993.709	3.212.187.230.041	15,861
Kab. Sumedang	2013	189.612.071.920	1.715.190.458.849	11,055
	2014	301.800.842.760	2.087.159.777.352	14,460

	2015	327.369.262.021	2.357.057.542.810	13,889
Kab. Tasikmalaya	2013	70.474.192.115	2.213.623.318.967	3,184
	2014	154.255.170.573	2.566.519.525.451	6,010
	2015	186.487.256.315	2.749.892.273.083	6,782
Kota Banjar	2013	70.625.135.392	620.917.335.500	11,374
	2014	118.592.601.620	672.708.492.252	17,629
	2015	119.829.130.610	735.145.003.963	16,300
Kota Bekasi	2013	969.741.298.062	2.962.609.186.288	32,733
	2014	1.205.265.728.280	3.480.363.127.729	34,630
	2015	1.497.596.390.244	3.949.393.849.629	37,920
Kota Bogor	2013	464.695.880.485	1.574.372.008.958	29,516
	2014	544.835.708.254	1.757.697.381.840	30,997
	2015	627.597.050.141	1.913.210.404.036	32,803
Kota Cimahi	2013	191.599.456.904	975.350.197.043	19,644
	2014	227.949.120.181	1.117.121.948.298	20,405
	2015	268.816.074.332	1.186.804.131.668	22,650
Kota Cirebon	2013	206.019.069.726	1.009.950.399.239	20,399
	2014	298.540.660.324	1.234.067.584.543	24,192
	2015	319.893.842.205	1.483.866.685.439	21,558
Kota Depok	2013	581.207.570.935	1.921.402.778.745	30,249
	2014	659.173.522.492	2.207.866.591.868	29,856
	2015	818.204.601.265	2.462.139.246.349	33,231
Kota Sukabumi	2013	175.539.318.476	844.635.562.884	20,783
	2014	258.467.192.313	996.914.566.265	25,927
	2015	276.845.561.835	1.066.745.506.697	25,952
Kota Tasikmalaya	2013	172.883.279.898	1.365.593.492.674	12,660
	2014	253.450.505.778	1.595.664.661.290	15,884
	2015	242.979.820.518	1.604.649.868.226	15,142
Kab. Banjarnegara	2013	98.975.318.350	1.279.702.465.966	7,734
	2014	161.652.537.773	1.403.398.262.639	11,519
	2015	180.561.068.549	1.693.503.657.927	10,662
Kab. Banyumas	2013	308.349.434.319	2.037.636.075.236	15,133
	2014	435.597.688.642	2.308.424.398.455	18,870
	2015	502.281.349.460	2.654.284.992.375	18,923
Kab. Blora	2013	95.192.786.972	1.292.799.169.613	7,363
	2014	144.724.169.929	1.516.483.308.534	9,543
	2015	156.402.924.037	1.648.791.900.900	9,486
Kab. Boyolali	2013	227.516.495.964	1.673.664.647.062	13,594
	2014	227.516.495.964	1.673.664.647.062	13,594

	2015	260.633.637.928	1.937.150.203.967	13,454
Kab. Brebes	2013	133.836.336.686	1.781.873.278.077	7,511
	2014	267.770.613.635	2.043.920.281.708	13,101
	2015	301.953.709.818	2.417.210.235.716	12,492
Kab. Grobogan	2013	143.586.365.567	1.549.709.105.117	9,265
	2014	235.295.346.622	1.710.966.445.735	13,752
	2015	272.718.439.175	2.017.588.934.756	13,517
Kab. Karanganyar	2013	161.715.929.349	1.369.051.826.396	11,812
	2014	215.298.860.199	1.616.249.807.725	13,321
	2015	255.445.549.750	1.834.209.380.841	13,927
Kab. Kebumen	2013	131.481.736.502	1.626.530.654.021	8,084
	2014	242.079.502.075	1.967.047.779.137	12,307
	2015	245.159.255.421	2.326.188.256.641	10,539
Kab. Kendal	2013	136.029.702.522	1.388.635.845.964	9,796
	2014	216.294.085.780	1.546.101.820.182	13,990
	2015	239.564.403.981	1.720.521.350.832	13,924
Kab. Magelang	2013	173.253.651.914	1.428.243.260.343	12,131
	2014	242.448.677.267	1.655.674.485.031	14,643
	2015	261.569.091.783	1.945.956.251.171	13,442
Kab. Pati	2013	169.127.415.979	1.706.030.888.000	9,914
	2014	279.254.884.135	1.940.575.704.131	14,390
	2015	310.063.640.827	2.181.691.961.101	14,212
Kab. Pekalongan	2013	147.687.255.201	1.232.399.277.067	11,984
	2014	255.037.017.191	1.474.500.636.377	17,297
	2015	251.558.970.834	1.697.594.551.515	14,819
Kab. Pemasang	2013	136.362.281.618	1.486.773.783.371	9,172
	2014	217.345.439.974	1.687.338.257.907	12,881
	2015	230.435.212.865	1.966.423.490.803	11,718
Kab. Purbalingga	2013	122.858.738.938	1.186.532.497.797	10,354
	2014	202.593.689.614	1.345.621.795.678	15,056
	2015	215.622.047.787	1.567.587.735.546	13,755
Kab. Purworejo	2013	127.565.801.410	1.289.037.659.296	9,896
	2014	200.258.601.329	1.444.353.240.854	13,865
	2015	233.934.134.286	1.842.491.063.926	12,697
Kab. Rembang	2013	126.808.083.812	1.165.433.076.124	10,881
	2014	165.530.925.487	1.329.587.756.593	12,450
	2015	193.122.759.857	1.408.950.534.486	13,707
Kab. Semarang	2013	215.679.554.472	1.373.383.023.313	15,704
	2014	248.213.019.938	1.528.999.468.156	16,234

	2015	278.851.900.617	1.677.158.224.329	16,626
Kab. Sragen	2013	146.721.552.108	1.468.966.588.879	9,988
	2014	254.392.449.817	1.761.964.575.867	14,438
	2015	267.711.820.479	2.024.057.424.890	13,226
Kab. Tegal	2013	156.244.859.788	1.574.068.555.274	9,926
	2014	253.716.602.369	1.843.352.063.500	13,764
	2015	304.000.970.135	2.097.095.623.983	14,496
Kab. Temanggung	2013	102.080.197.094	1.053.845.571.760	9,686
	2014	160.726.943.432	1.226.139.568.046	13,108
	2015	212.498.139.929	1.469.482.958.105	14,461
Kab. Wonogiri	2013	111.592.606.315	1.489.307.551.589	7,493
	2014	182.149.063.108	1.712.184.966.496	10,638
	2015	211.208.601.200	1.963.704.538.729	10,756
Kab. Wonosobo	2013	108.729.508.524	1.144.182.522.595	9,503
	2014	175.319.364.867	1.277.145.669.965	13,727
	2015	182.607.628.797	1.432.159.651.029	12,751
Kota Magelang	2013	107.739.838.961	634.759.985.140	16,973
	2014	164.927.631.230	735.116.114.407	22,436
	2015	186.677.410.081	781.335.799.509	23,892
Kota Pekalongan	2013	114.252.438.719	675.375.467.702	16,917
	2014	144.065.424.017	762.110.364.355	18,903
	2015	152.044.596.332	809.733.612.473	18,777
Kota Salatiga	2013	106.100.450.499	603.204.201.915	17,589
	2014	165.747.645.080	727.619.868.812	22,779
	2015	167.010.555.173	750.581.558.962	22,251
Kota Surakarta	2013	298.400.846.632	1.385.005.106.508	21,545
	2014	335.660.206.641	1.525.575.850.953	22,002
	2015	372.798.426.790	1.568.482.686.616	23,768
Kota Tegal	2013	176.377.335.075	723.968.861.085	24,363
	2014	241.936.166.929	818.667.346.500	29,552
	2015	271.601.407.419	947.468.621.453	28,666
Kab. Bantul	2013	224.197.864.231	1.520.301.695.802	14,747
	2014	357.411.062.723	1.813.917.142.696	19,704
	2015	390.624.492.073	1.951.223.236.705	20,019
Kab. Kulon Progo	2013	95.991.512.851	1.003.179.221.523	9,569
	2014	158.623.927.338	1.120.424.776.127	14,157
	2015	170.822.326.558	1.227.474.672.766	13,917
Kab. Sleman	2013	449.270.304.865	1.899.525.535.839	23,652
	2014	573.337.599.560	2.076.820.131.084	27,607

	2015	643.130.079.828	2.294.622.764.756	28,028
Kota Yogyakarta	2013	383.052.140.420	1.309.580.194.014	29,250
	2014	470.641.528.444	1.459.742.435.084	32,241
	2015	510.548.522.810	1.434.009.288.219	35,603
Kab. Bondowoso	2013	79.559.722.884	1.266.838.948.992	6,280
	2014	134.684.701.402	1.534.483.291.062	8,777
	2015	158.974.210.144	1.800.277.754.980	8,831
Kab. Gresik	2013	502.767.029.904	1.840.556.214.829	27,316
	2014	700.587.792.877	2.206.389.315.226	31,753
	2015	799.884.870.103	2.436.173.613.495	32,834
Kab. Jember	2013	308.376.581.786	2.366.370.839.532	13,032
	2014	440.462.012.491	2.797.468.559.470	15,745
	2015	461.882.363.147	3.116.544.378.911	14,820
Kab. Jombang	2013	185.091.678.240	1.567.610.980.537	11,807
	2014	304.065.301.093	1.905.860.374.275	15,954
	2015	363.963.252.972	2.151.287.884.053	16,918
Kab. Kediri	2013	203.212.445.367	1.790.936.818.008	11,347
	2014	295.295.340.021	2.065.936.833.905	14,294
	2015	314.229.578.679	2.317.562.354.065	13,559
Kab. Lamongan	2013	161.087.916.085	1.674.655.717.105	9,619
	2014	272.409.285.216	1.969.782.922.683	13,829
	2015	321.667.133.176	2.436.090.963.267	13,204
Kab. Lumajang	2013	112.406.824.133	1.299.318.897.389	8,651
	2014	194.076.104.164	1.545.618.399.754	12,557
	2015	212.585.093.436	1.707.539.550.204	12,450
Kab. Madiun	2013	83.428.636.445	1.182.864.757.088	7,053
	2014	121.390.771.374	1.386.252.157.502	8,757
	2015	149.628.355.468	1.622.962.461.464	9,219
Kab. Magetan	2013	87.859.707.871	1.225.384.220.297	7,170
	2014	141.162.943.324	1.471.812.527.967	9,591
	2015	164.564.899.426	1.544.927.313.562	10,652
Kab. Malang	2013	262.267.260.455	2.529.685.862.152	10,368
	2014	411.185.107.107	3.058.671.277.833	13,443
	2015	461.887.704.825	3.471.281.006.611	13,306
Kab. Ngawi	2013	85.636.138.392	1.414.456.951.801	6,054
	2014	169.237.013.272	1.684.599.358.255	10,046
	2015	191.166.217.182	1.912.183.743.923	9,997
Kab. Pacitan	2013	62.988.926.126	1.061.397.988.848	5,935
	2014	101.276.945.022	1.260.505.396.064	8,035

	2015	126.449.078.417	1.426.596.968.333	8,864
Kab. Pamekasan	2013	89.462.536.536	1.219.849.024.309	7,334
	2014	171.518.204.167	1.527.493.494.941	11,229
	2015	170.258.936.684	1.681.794.669.633	10,124
Kab. Ponorogo	2013	134.097.320.781	1.452.191.618.349	9,234
	2014	198.730.421.480	1.704.809.253.589	11,657
	2015	210.695.348.135	1.866.869.447.088	11,286
Kab. Probolinggo	2013	108.511.361.748	1.381.933.213.625	7,852
	2014	123.039.103.223	1.364.735.643.012	9,016
	2015	207.370.345.161	1.842.200.787.638	11,257
Kab. Sidoarjo	2013	858.433.670.218	2.695.270.157.665	31,850
	2014	1.115.332.938.500	3.273.379.955.995	34,073
	2015	1.266.786.727.409	3.556.219.138.762	35,622
Kab. Situbondo	2013	78.043.407.932	1.109.471.305.727	7,034
	2014	129.640.577.934	1.359.193.724.049	9,538
	2015	148.507.958.983	1.520.359.975.571	9,768
Kab. Trenggalek	2013	77.799.518.146	1.206.677.943.038	6,447
	2014	132.951.069.332	1.498.350.372.381	8,873
	2015	155.254.334.899	1.545.252.147.340	10,047
Kab. Tuban	2013	227.120.525.358	1.526.016.153.881	14,883
	2014	291.079.944.393	1.823.513.656.640	15,963
	2015	345.965.620.446	2.017.855.147.213	17,145
Kab. Tulungagung	2013	174.981.706.538	1.774.874.063.728	9,859
	2014	276.577.973.500	2.114.558.431.869	13,080
	2015	309.646.333.189	2.369.737.223.685	13,067
Kota Batu	2013	59.544.940.728	585.302.322.932	10,173
	2014	80.493.920.959	703.680.192.404	11,439
	2015	104.233.584.925	725.754.996.854	14,362
Kota Madiun	2013	96.011.481.200	809.078.381.918	11,867
	2014	134.584.344.293	938.517.341.039	14,340
	2015	164.681.136.058	973.919.348.172	16,909
Kota Mojokerto	2013	74.944.029.536	568.900.569.597	13,173
	2014	105.277.492.018	689.559.351.473	15,267
	2015	129.258.132.763	717.544.079.472	18,014
Kota Pasuruan	2013	66.110.651.059	576.598.456.068	11,466
	2014	100.647.029.803	701.582.534.365	14,346
	2015	114.734.243.910	738.780.208.092	15,530
Kota Probolinggo	2013	78.355.777.788	682.356.282.136	11,483
	2014	135.062.805.888	872.815.764.198	15,474

	2015	142.434.720.375	859.993.069.407	16,562
Kab. Lebak	2013	136.180.145.486	1.475.432.194.169	9,230
	2014	244.448.053.657	1.796.231.788.248	13,609
	2015	301.542.032.432	2.237.617.202.823	13,476
Kab. Serang	2013	417.677.400.299	1.766.523.728.157	23,644
	2014	464.326.280.197	2.012.068.317.407	23,077
	2015	579.605.446.965	2.304.837.741.509	25,147
Kota Cilegon	2013	291.943.565.049	1.096.751.657.161	26,619
	2014	467.950.299.677	1.304.405.754.202	35,875
	2015	579.585.574.661	1.409.261.799.808	41,127

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah 2013-2015 (diolah)

Lampiran VI. Hasil Penghitungan Sampel

Pemda	Tahun	ICW	UP	BM	PDRB	PAD
Kab. Bandung Barat	2013	9	28,54546110	18,96252	5,93479	11,19868
	2014	9	29,16215744	18,92308	5,77233	13,00824
	2015	9	28,73390263	19,93206	5,01216	14,60495
Kab. Bekasi	2013	12	29,74842389	32,91786	6,23403	34,32572
	2014	10	30,11140294	32,69279	5,88163	39,44094
	2015	10	29,98190263	29,59818	4,27929	40,76688
Kab. Ciamis	2013	3	29,12395748	17,95865	5,34376	5,34834
	2014	7	28,90614292	18,50178	5,06645	9,09021
	2015	7	28,55855206	23,36621	5,58822	7,86481
Kab. Cianjur	2013	6	29,10723145	14,40057	4,88610	11,83796
	2014	7	29,24439676	18,11546	5,06490	15,65777
	2015	7	29,13515604	21,61935	5,46128	14,59928
Kab. Cirebon	2013	5	28,79471933	14,36370	4,96270	10,83107
	2014	6	28,98734327	12,97935	5,07148	16,56693
	2015	2	28,75923926	16,37337	4,87230	15,14024
Kab. Garut	2013	7	28,90159507	23,59751	4,75643	8,77728
	2014	13	29,00897189	16,01315	4,81502	11,84785
	2015	7	28,73920310	16,30575	4,50869	11,83979
Kab. Karawang	2013	15	29,20272145	20,68750	7,96148	24,54989
	2014	7	29,35244702	18,81286	5,36514	28,42637
	2015	7	29,06818200	17,45975	4,49471	29,11595
Kab. Kuningan	2013	8	28,85932393	16,48354	6,25741	6,92099
	2014	8	28,85532459	12,28020	6,31814	10,70038
	2015	8	28,65832978	18,52735	6,37868	9,65741
Kab. Majalengka	2013	7	28,93914119	22,30602	4,93465	7,95337
	2014	3	29,05314783	26,36463	4,90908	10,84690
	2015	6	28,96924808	28,13793	5,33333	11,37884
Kab. Purwakarta	2013	11	28,22293390	17,11200	7,14599	12,67297
	2014	10	28,43678289	21,88467	5,71955	18,37258
	2015	8	28,30967932	21,72891	4,75216	18,81787
Kab. Sukabumi	2013	15	29,07701021	16,20417	5,50554	11,35432
	2014	10	29,16799412	15,41688	5,97906	15,53224
	2015	9	28,85687272	17,61103	4,90696	15,86100
Kab. Sumedang	2013	8	28,58129748	15,45196	4,84117	11,05487
	2014	3	28,76476822	19,33874	4,69904	14,45988
	2015	4	28,43250732	25,02853	4,90696	13,88890
Kab. Tasikmalaya	2013	5	28,81717280	22,55715	4,64751	3,18366

	2014	5	29,08664114	24,04643	4,78573	6,01029
	2015	5	29,00984375	18,53356	5,23246	6,78162
Kota Banjar	2013	4	28,06292114	34,24734	5,46424	11,37432
	2014	3	28,17333846	24,20590	4,97051	17,62912
	2015	3	27,93242589	28,82621	5,29695	16,30007
Kota Bekasi	2013	15	29,58861190	30,01539	6,04174	32,73268
	2014	12	29,68216029	23,15745	5,61509	34,63046
	2015	9	29,77079621	32,20554	5,57544	37,91965
Kota Bogor	2013	9	29,32443857	15,78214	6,04131	29,51627
	2014	10	29,46574907	29,32160	6,00400	30,99713
	2015	12	29,51360132	23,66740	6,12964	32,80335
Kota Cimahi	2013	11	28,31054178	13,08980	5,65343	19,64417
	2014	4	28,42787189	14,52572	5,49403	20,40503
	2015	9	28,37559659	16,81763	5,43203	22,65042
Kota Cirebon	2013	10	28,66712972	17,37631	4,90760	20,39893
	2014	5	28,84707750	19,69391	5,70634	24,19160
	2015	12	28,90239097	19,52875	5,79699	21,55813
Kota Depok	2013	6	29,57264878	34,80128	6,84949	30,24913
	2014	4	29,73492162	28,93632	7,27611	29,85568
	2015	7	29,62045508	28,26279	6,62632	33,23145
Kota Sukabumi	2013	8	28,07394356	13,77891	5,41987	20,78285
	2014	11	28,30514052	12,65710	5,42685	25,92671
	2015	9	27,97667991	15,71241	5,10235	25,95235
Kota Tasikmalaya	2013	7	28,84186961	19,93723	6,16949	12,65994
	2014	7	28,96591599	19,02005	6,15764	15,88369
	2015	7	28,68873032	20,81074	6,29887	15,14223
Kab. Banjarnegara	2013	5	28,72120611	14,96571	5,44257	7,73424
	2014	6	28,78567439	15,29856	5,27031	11,51865
	2015	5	28,95891940	20,45698	5,47957	10,66198
Kab. Banyumas	2013	10	29,37301653	16,06688	6,97021	15,13270
	2014	11	29,15152518	16,27627	5,66689	18,86991
	2015	5	29,23971738	16,27543	5,47957	18,92341
Kab. Blora	2013	15	28,46445333	19,75416	4,79556	7,36331
	2014	7	28,64195887	22,82624	4,38829	9,54341
	2015	7	28,41972647	19,56946	5,36518	9,48591
Kab. Boyolali	2013	5	28,57433789	18,77963	5,82954	13,59391
	2014	2	28,70902612	19,76512	5,41621	13,59391
	2015	10	28,49076154	18,82785	6,08270	13,45449
Kab. Brebes	2013	13	28,60983800	19,61400	5,91584	7,51099
	2014	6	28,76293279	14,38475	5,29565	13,10083
	2015	7	28,54926238	19,62836	5,97455	12,49183

Kab. Grobogan	2013	13	28,48718728	23,45215	4,57304	9,26538
	2014	11	28,14430669	18,25989	4,06908	13,75219
	2015	9	28,37779511	16,80675	5,96787	13,51705
Kab. Karanganyar	2013	10	28,55388239	11,53534	5,69735	11,81226
	2014	4	28,50080149	14,46271	5,21888	13,32089
	2015	6	28,60150235	14,65573	5,04886	13,92674
Kab. Kebumen	2013	4	28,81324802	18,53528	4,56701	8,08357
	2014	4	28,74884445	25,51779	5,79781	12,30674
	2015	5	28,99465168	23,02651	6,29122	10,53910
Kab. Kendal	2013	9	28,74069452	12,23015	6,21560	9,79592
	2014	5	28,57050887	17,78815	5,17288	13,98964
	2015	10	28,81087021	16,66771	5,16905	13,92394
Kab. Magelang	2013	14	28,60101884	8,63197	5,91127	12,13054
	2014	7	28,72945420	19,27533	4,87633	14,64350
	2015	7	28,69203311	14,65500	5,34984	13,44167
Kab. Pati	2013	10	28,33515163	12,33560	5,97001	9,91350
	2014	9	28,14177856	12,74231	4,63054	14,39031
	2015	3	29,03177008	15,21310	5,97500	14,21207
Kab. Pekalongan	2013	14	28,54032064	15,06906	8,36636	11,98372
	2014	5	28,64089931	13,89043	2,64120	17,29650
	2015	13	28,40855024	13,29024	4,78226	14,81855
Kab. Pemasang	2013	9	28,62538854	16,92336	5,57025	9,17169
	2014	8	28,47768372	10,72606	5,52688	12,88096
	2015	7	28,62844682	15,06019	5,43165	11,71849
Kab. Purbalingga	2013	8	28,38380581	10,00991	5,27270	10,35444
	2014	6	28,11122212	9,20072	5,86164	15,05577
	2015	5	28,29753408	13,14526	5,38922	13,75502
Kab. Purworejo	2013	16	28,41866186	15,66719	4,94365	9,89620
	2014	5	28,18369945	15,94950	4,48789	13,86493
	2015	3	28,31827490	16,18983	5,11926	12,69662
Kab. Rembang	2013	12	28,17366355	12,77028	5,43279	10,88077
	2014	7	28,00316443	11,87036	5,14262	12,44979
	2015	7	28,12116881	4,95244	5,48425	13,70685
Kab. Semarang	2013	13	28,42035506	17,74267	5,96947	15,70425
	2014	5	28,52049643	18,75723	5,84284	16,23369
	2015	4	28,59201185	15,26562	5,42860	16,62645
Kab. Sragen	2013	11	28,49089767	10,02869	6,70316	9,98808
	2014	6	28,61846976	15,61369	5,58580	14,43800
	2015	7	28,48622305	17,09423	6,04393	13,22649
Kab. Tegal	2013	10	28,56332747	14,09886	6,72895	9,92618
	2014	6	28,23936892	13,18385	5,03047	13,76387

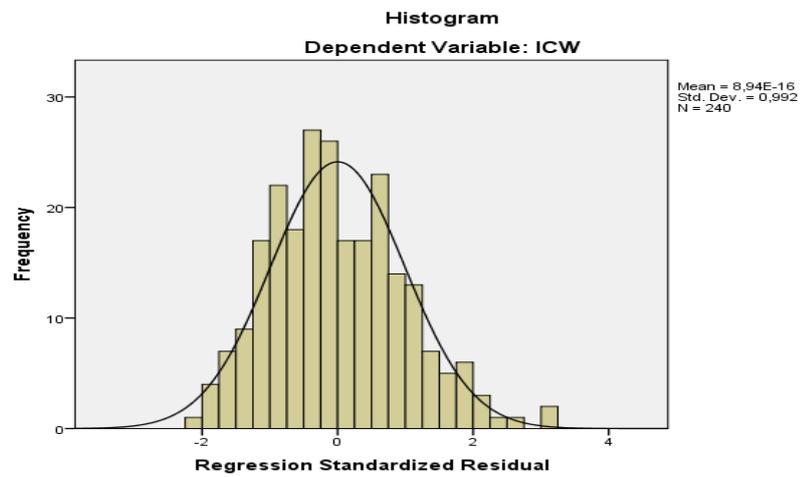
	2015	5	28,44561435	13,19382	5,44889	14,49629
Kab. Temanggung	2013	12	28,30419448	10,92267	5,19505	9,68645
	2014	6	28,41324157	16,94894	5,06239	13,10837
	2015	6	28,58973602	21,28490	5,16384	14,46074
Kab. Wonogiri	2013	9	28,97000574	13,47941	4,77919	7,49292
	2014	9	28,82181215	13,84052	5,30615	10,63840
	2015	4	28,65129629	16,61443	5,33664	10,75562
Kab. Wonosobo	2013	9	28,53458534	13,98589	4,00564	9,50281
	2014	7	28,01069112	16,88880	4,88678	13,72744
	2015	7	28,11241336	17,22517	5,12962	12,75051
Kota Magelang	2013	12	28,38404109	22,60258	6,04371	16,97332
	2014	3	28,53008317	18,72078	4,90011	22,43559
	2015	7	28,57612610	19,19071	5,07217	23,89208
Kota Pekalongan	2013	7	28,43703824	19,77122	5,90062	16,91688
	2014	5	28,20894811	21,60481	5,48021	18,90349
	2015	7	28,26961118	19,89402	5,00434	18,77711
Kota Salatiga	2013	11	28,19891203	13,07615	6,29658	17,58947
	2014	5	28,08799375	18,62422	5,53727	22,77943
	2015	13	28,15871903	15,90069	5,15184	22,25082
Kota Surakarta	2013	12	29,59047403	17,81245	6,25104	21,54511
	2014	5	29,53676247	19,35980	5,27466	22,00220
	2015	8	29,58527279	15,38828	5,44397	23,76809
Kota Tegal	2013	11	28,32534253	14,97748	5,67320	24,36256
	2014	9	28,11073478	14,76171	5,03464	29,55244
	2015	8	28,23574146	21,62754	5,42928	28,66601
Kab. Bantul	2013	13	28,79604572	13,20655	5,45983	14,74693
	2014	5	28,93542064	18,25595	5,14888	19,70383
	2015	11	28,47945198	17,32168	5,00437	20,01947
Kab. Kulon Progo	2013	10	28,02539007	12,78407	4,87671	9,56873
	2014	5	28,17797583	13,85464	4,54545	14,15748
	2015	6	27,95178480	18,18528	4,64768	13,91657
Kab. Sleman	2013	5	28,95722468	12,21473	5,88554	23,65171
	2014	11	29,08099417	15,48690	5,41649	27,60651
	2015	7	28,97953736	18,32668	5,30646	28,02770
Kota Yogyakarta	2013	8	29,08508138	13,55164	5,47710	29,24999
	2014	7	29,11542198	14,44537	5,29644	32,24141
	2015	4	28,56601485	16,65229	5,16141	35,60287
Kab. Bondowoso	2013	9	28,42835295	19,83287	5,81238	6,28018
	2014	4	28,58866544	21,17426	5,04931	8,77720
	2015	7	28,21097565	22,77895	4,94743	8,83054
Kab. Gresik	2013	13	29,33344875	22,01933	6,04470	27,31604

	2014	10	29,45759447	24,11419	7,04350	31,75268
	2015	7	29,18793151	23,09903	6,57872	32,83366
Kab. Jember	2013	7	29,26138661	20,38892	6,05711	13,03163
	2014	10	29,39210157	19,94446	6,19955	15,74502
	2015	9	28,91045616	18,04391	5,32536	14,82034
Kab. Jombang	2013	7	29,03081470	13,91702	5,92877	11,80725
	2014	3	29,14078189	20,80726	5,42279	15,95423
	2015	6	28,52762503	18,62487	5,35493	16,91839
Kab. Kediri	2013	8	28,82151415	18,31980	5,81848	11,34671
	2014	6	28,96988775	17,80051	5,31910	14,29353
	2015	6	28,85719810	20,12747	4,87570	13,55862
Kab. Lamongan	2013	7	28,92182827	14,96497	6,92776	9,61917
	2014	7	29,06736006	18,49306	6,30258	13,82941
	2015	3	28,83599522	19,07900	5,76777	13,20423
Kab. Lumajang	2013	8	28,45658299	13,17888	5,58774	8,65121
	2014	5	28,58972326	16,07751	5,32153	12,55653
	2015	7	28,37321777	14,58779	4,62693	12,44979
Kab. Madiun	2013	5	29,29036062	16,25900	5,66988	7,05310
	2014	12	29,34938818	18,23587	5,34493	8,75676
	2015	7	28,92835730	20,72931	5,26057	9,21946
Kab. Magetan	2013	9	28,60517877	11,53256	5,85883	7,16997
	2014	4	28,75110316	14,44618	5,09548	9,59110
	2015	7	28,15897643	15,07829	5,16906	10,65195
Kab. Malang	2013	8	29,41340856	18,79153	5,30206	10,36758
	2014	7	29,54450518	18,23669	6,00742	13,44326
	2015	5	29,27347334	20,18500	5,26356	13,30597
Kab. Ngawi	2013	6	28,54312175	13,97730	5,49749	6,05435
	2014	5	28,68535176	16,06426	5,81534	10,04613
	2015	5	28,56091755	17,05384	5,83794	9,99727
Kab. Pacitan	2013	3	28,06806659	12,81169	5,87930	5,93452
	2014	5	28,19213686	16,66561	5,19735	8,03463
	2015	5	28,25078152	19,03866	5,10371	8,86369
Kab. Pamekasan	2013	10	28,55950686	12,53156	6,09324	7,33390
	2014	7	28,65891005	17,41240	5,62388	11,22874
	2015	8	28,55213271	25,56515	5,32444	10,12365
Kab. Ponorogo	2013	4	28,63011773	7,94300	5,14047	9,23413
	2014	5	28,77803914	10,89147	5,21129	11,65705
	2015	6	28,37159697	17,10679	5,24135	11,28602
Kab. Probolinggo	2013	9	28,57035608	15,89123	5,14849	7,85214
	2014	11	28,71516234	14,38280	4,89640	9,01560
	2015	9	28,41932758	18,25595	4,75885	11,25666

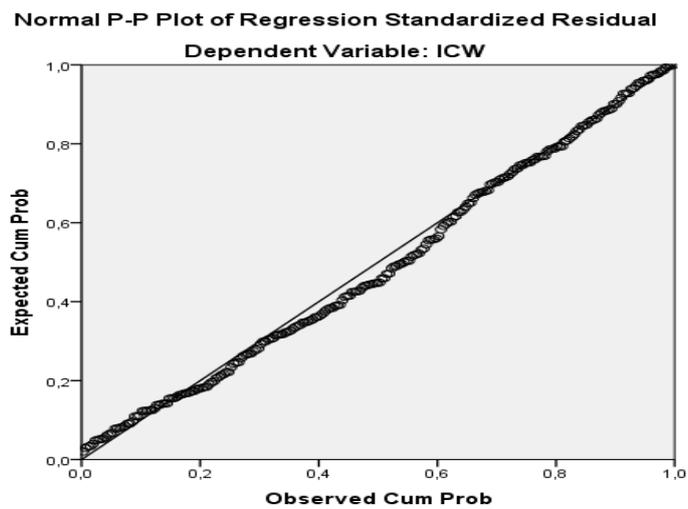
Kab. Sidoarjo	2013	13	29,79510765	20,52123	6,89408	31,84963
	2014	9	29,90422856	24,22229	6,44245	34,07282
	2015	10	29,54465645	25,55948	5,23982	35,62173
Kab. Situbondo	2013	9	28,35503841	23,00411	6,18360	7,03429
	2014	10	28,82013649	24,89594	5,78347	9,53805
	2015	5	28,68834470	23,01868	4,86190	9,76795
Kab. Trenggalek	2013	10	28,28744431	17,80055	6,00513	6,44741
	2014	11	28,50987716	20,57464	5,27535	8,87316
	2015	10	28,26311781	21,06523	5,03101	10,04718
Kab. Tuban	2013	8	28,94384469	17,93179	5,85554	14,88323
	2014	6	29,23633441	21,45573	5,46335	15,96259
	2015	6	29,12730025	19,35105	4,88752	17,14522
Kab. Tulungagung	2013	8	28,39095273	9,49252	6,13190	9,85882
	2014	11	28,57409743	16,03884	5,46023	13,07970
	2015	3	28,45137526	19,18516	4,99412	13,06669
Kota Batu	2013	11	27,80724310	28,24513	7,29195	10,17336
	2014	10	27,97737106	22,29334	6,89612	11,43899
	2015	10	27,82971375	34,38633	6,69622	14,36209
Kota Madiun	2013	6	28,75980941	23,23756	7,68233	11,86677
	2014	4	28,44016601	23,61339	6,62562	14,34010
	2015	5	28,21244452	20,79447	6,13859	16,90911
Kota Mojokerto	2013	14	28,14426286	13,23566	6,22394	13,17348
	2014	11	28,27251003	22,40452	5,83123	15,26736
	2015	5	28,11775173	19,23769	5,72185	18,01396
Kota Pasuruan	2013	4	27,95553085	14,14203	6,51691	11,46563
	2014	5	28,05617180	17,10270	5,70104	14,34571
	2015	11	28,29158826	21,48742	5,52510	15,53023
Kota Probolinggo	2013	8	28,10767981	10,39158	6,46614	11,48312
	2014	10	28,21880765	13,73887	5,93808	15,47438
	2015	6	27,97050172	10,15357	5,86075	16,56231
Kab. Lebak	2013	9	29,23430027	23,56745	6,29730	9,22985
	2014	8	29,32497399	23,27816	6,03842	13,60894
	2015	6	29,05748780	22,18258	5,92259	13,47603
Kab. Serang	2013	12	28,96985256	22,44116	6,04227	23,64403
	2014	5	29,07876080	18,68497	5,98949	23,07706
	2015	8	28,90504654	17,68669	5,14327	25,14734
Kota Cilegon	2013	9	28,67344294	20,58396	6,69201	26,61893
	2014	12	28,82357874	25,96856	4,93304	35,87460
	2015	10	28,62090723	25,47990	4,80560	41,12689

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017

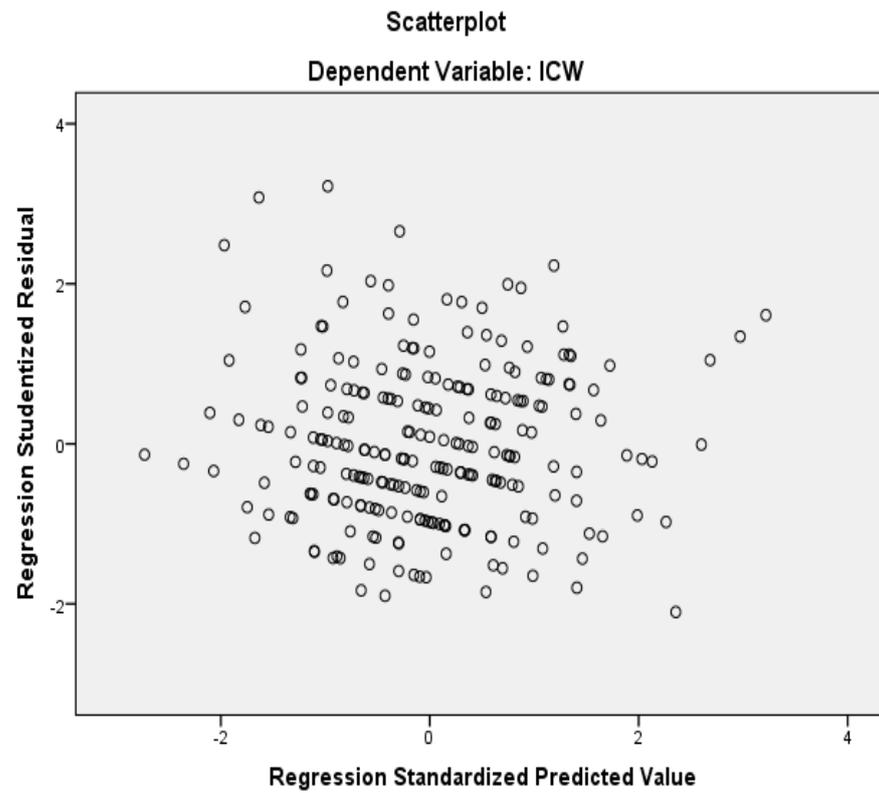
Lampiran VII. Uji Normalitas Histogram dan P-Plot



Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017



Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Lampiran VIII. Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 22, 2017

Lampiran IX. Pemerintah Daerah yang Belum Publikasi

No	Pemerintah Daerah
1	Kota Bandung
2	Kabupaten Bogor
3	Kabupaten Batang
4	Kabupaten Cilacap
5	Kabupaten Demak
6	Kabupaten Jepara
7	Kabupaten Klaten
8	Kabupaten Kudus
9	Kabupaten Sukoharjo
10	Kota Semarang
11	Kabupaten Gunung Kidul
12	Kabupaten Banyuwangi
13	Kabupaten Bojonegoro
14	Kabupaten Blitar
15	Kabupaten Nganjuk
16	Kabupaten Pasuruan
17	Kabupaten Sampang
18	Kabupaten Sumenep
19	Kota Blitar
20	Kota Kediri
21	Kota Malang
22	Kota Surabaya
23	Kabupaten Tangerang
24	Kota Serang
25	Kota Tangerang
26	Kota Tangerang Selatan

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 (diolah)

RIWAYAT HIDUP



Yulianti, anak tunggal yang lahir dari pasangan Muhamad dan Ratih di Sukabumi, 27 Juli 1995. Saat ini, peneliti tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.

Pendidikan formal peneliti dimulai dari SDN Paris tahun 2000-2006, SMP Negeri 2 Cibadak tahun 2006-2009, SMA Negeri 1 Cibadak tahun 2009-2012.

Pendidikan ditunda satu tahun dikarenakan peneliti bekerja di PT. Longvin Sukabumi selama 7 bulan sebagai Staff *Outgoing Quality Control* (OQC). Selanjutnya, peneliti mengikuti seleksi SBMPTN yang menghantarkannya ke Universitas Negeri Jakarta pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi di tahun 2013.

Peneliti aktif di organisasi selama perkuliahan. Peneliti pernah menjadi Staf Kesekretariatan BSO KSEI FE UNJ dan pada tahun berikutnya di angkat menjadi Kepala Biro Inventaris dan Kesekretariatan BSO KSEI FE UNJ. Peneliti banyak terlibat dalam kegiatan kepanitiaan seperti *Sharia Economics Celebration*, *Sharia Economics Informal Study*, Baksos, Diklat Ekonomi Islam, dan sebagainya. Penulis pernah mengikuti KKL ke Bursa Malaysia, PKL di PT.Waskita Beton Precast Tbk dan Program KKN di Banten. Peneliti pernah bekerja 7 bulan sebagai Staf Akuntansi di PT. Rentang Telekomunikasi Asia saat menjelang semester 4.